CBI

Negara Kesejahteraan Indonesia

Pemikiran Denny JA Soal Model Pemerintahan yang Membahagiakan Warga

ERIYANTO

CBI

Negara Kesejahteraan Indonesia

Pemikiran Denny JA Soal Model Pemerintahan yang Membahagiakan Warga

ERIYANTO

NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA
Pemikiran Denny JA Soal Model Pemerintahan yang Membahagiakan Warga

Eriyanto
Editor: Anick HT

Cetakan Pertama, Desember 2023

Diterbitkan Oleh:
Cerah Budaya Indonesia
Menara Kuningan lt. 9G
Jalan HR. Rasuna Said Kav V Blok X-7, Jakarta Selatan

Negara Kesejahteraan Indonesia

Pemikiran Denny JA Soal Model Pemerintahan yang Membahagiakan Warga

ERIYANTO

Daftar Isi

I. Pendahuluan

Buku kecil ini membahas pemikiran Denny Januar Ali (selanjutnya ditulis Denny JA) mengenai negara kesejahteraan. Topik mengenai negara kesejahteraan adalah salah satu pemikiran Denny JA selain topik mengenai keberagaman, Islam, moderasi agama, dan spiritualitas. Gagasan Denny JA mengenai negara kesejehteraan ini tersebar dalam buku, artikel di surat kabar hingga tulisan populer di media sosial dan podcast di Youtube. Sayangnya, Denny JA belum menyusun buku khusus atau artikel jurnal mengenai negara kesejahteraan yang mengeksplorasi pemikirannya mengenai negara kesejahteraan. Pemikiran mengenai negara kesejahteraan tersebut tersebar di dalam banyak medium, dari buku, kumpulan tulisan, artikel surat kabar, puisi, hingga lukisan. Buku ini berusaha merangkum pemikiran Denny JA mengenai negara kesejahteraan.

Denny JA sendiri adalah seorang polymath (berpengetahuan di berbagai bidang). Bidang utama keahliannya adalah politik, lebih spesifik perbandingan politik, sesuai dengan pendidikan formalnya sebagai doktor dalam bidang politik. Selain politik, ia juga menyukai psikologi, peradaban dan pemikiran agama. Denny menulis banyak buku. Ia juga produktif membuat artikel di surat kabar. Ia juga suka melukis, bermain musik, dan membuat puisi. Meski menekuni banyak bidang, ada benang merah dalam tulisan dan karya Denny JA. Salah satu benang merah tersebut adalah soal kebahagiaan. Topik mengenai kebahagiaan ini banyak mewarnai karya-karya Denny JA.

Pada tahun 2017, Denny JA menulis buku berjudul "Bahagia itu Mudah dan Ilmiah: Lima Kebiasaan dan Pola Pikir Bahagia". Buku ini adalah hasil perenungan selama puluhan tahun dan bacaan yang luas mengenai literatur kebahagiaan. Di dalam buku ini, Denny JA mengusulkan model kebahagiaan. Buku ini dilanjutkan dengan buku "Spirituality of Happiness" yang terbit tahun 2020. Dalam buku kedua ini, Denny JA banyak mengulas mengenai tantangan kebahagiaan di era modern. Kedua buku ini menggambarkan minat sekaligus perhatian Denny JA mengenai kebahagiaan. Meski tidak secara spesifik berbicara mengenai kebahagiaan, puisi dan karya-karya Denny JA yang lain punya benang merah dengan upaya manusia dalam mencapai kebahagiaan. Buku kumpulan puisi "Roti untuk Hati" dan "Agama Cinta: Jalaluddin Rumi dalam Meme" berisi tentang pergulatan manusia dalam mencapai kebahagiaan.

Gambar 1.1. Buku Denny JA Mengenai Kebahagiaan

Dalam berbagai buku tersebut, Denny menegaskan bahwa tujuan manusia adalah mencapai hidup yang bahagia. Minat dan perhatian pada kebahagiaan ini membuat Denny tertarik untuk mengenalkan konsep kebahagiaan pada level negara. Jika tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan, maka negara seharusnya juga menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama. Tujuan bernegara adalah membuat warganya merasa bahagia. Dalam berbagai kesempatan, Denny JA sering mengutip indeks kebahagiaan yang dibuat oleh PBB sejak tahun 2012. Dalam buku "Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Islam" Denny JA menyoroti fenomena rendahnya kebahagiaan di negara-negara mayoritas Islam. Ia mempertanyakan mengapa negara-negara berpenduduk Islam tidak mampu membuat warganya bahagia. Topik mengenai kebahagiaan juga tercermin dalam buku "Rumah Bersama Bernama Indonesia" dan "Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi".

SISTEMATIKA BUKU

Buku ini berusaha menjabarkan gagasan Denny JA mengenai negara kesejahteraan. Bagian awal (bab II) buku ini akan membahas mengenai kebahagiaan. Topik ini penting karena benang merah dari negara kesejahteraan adalah kebahagiaan. Bab ini akan mengulas pemikiran Denny JA mengenai kebahagiaan. Bagian selanjutnya membahas mengenai bagaimana kebahagiaan pada level individu diterapkan pada level negara. Bab ini akan mengulas detail indeks kebahagiaan yang banyak dikutip dalam tulisan Denny JA. Bab berikutnya membahas mengenai sistem ekonomi politik apa yang bisa menjamin kebahagiaan. Bab berikutnya membahas mengenai konsep negara kesejahteraan dan model-model negara kesejahteraan. Bagian terakhir mengulas mengenai model negara kesejahteraan yang cocok diterapkan di Indonesia.

II. Kebahagiaan Sebagai Tujuan

Pemikiran Denny JA mengenai negara kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dengan pemikirannya mengenai kebahagiaan. Bab ini akan membahas mengenai kebahagiaan dan pemikiran Denny JA mengenai kebahagiaan.

KONSEP KEBAHAGIAAN

Kita hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Semua agama hampir semuanya menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Kata "kebahagiaan" itu sendiri juga seringkali diucapkan, dalam berbagai peristiwa. Ketika ada teman kita yang menikah, kita selalu mengucapkan "semoga berbahagia". Kalau ada yang sedang ulang tahun kita juga tidak pernah lupa menyampaikan agar yang berulang tahun tersebut hidup bahagia. Lihatlah semua cerita, film, novel mengenai petualangan dan misteri, semuanya diakhiri dengan kata-kata "hidup bahagia selamanya".

Kalau bahagia itu begitu penting, pertanyaannya adalah apa sebenarnya bahagia itu? Bagaimana mengukur dan menentukan bahwa seseorang berbahagia? Konsep mengenai "bahagia" itu sendiri adalah konsep yang relatif baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Meskipun kata ini sering diucapkan, kata ini sering hanya dianggap sebagai

gambaran ideal dari kehidupan yang bersifat abstrak. Orang lebih suka menggunakan kata-kata seperti kesejahteraan atau kemakmuran, dibandingkan dengan kebahagiaan. Tidak mengherankan jika statistik-statistik di suatu negara lebih mengukur mengenai kesejahteraan dibandingkan dengan kebahagiaan.

Perubahan terjadi sekitar tahun 1990-an yang ditandai oleh sebuah gerakan di kalangan ahli-ahli psikologi (dipelopori di antaranya oleh Martin Seligman, Barbara Fredrickson, Mihalyi Csikszentmihalyi) yang dikenal dengan nama psikologi positif. Sesuai dengan namanya, gerakan ini memusatkan perhatian pada studi-studi yang berkaitan dengan hal-hal yang positif (kebalikan dengan psikologi sebelumnya yang banyak membahas mengenai gangguan atau penyakit psikologi). Psikologi positif memusatkan perhatian pada karakter dan hal-hal yang membuat manusia bisa menjadi pribadi yang baik (Seligman, 2001). Jika psikologi sebelumnya tertarik dengan fenomena gangguan kejiwaan, disorientasi, patologi dan berbagai penyakit lain, psikologi positif justru tertarik dengan kondisi dan karakter positif (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Jørgensen& Nafstad, 2012: 17-18). Kebahagiaan menjadi konsep kunci dari psikologi positif. Bahkan seringkali digambarkan, kebahagiaan menjadi titik sentral atau konsep kunci dari psikologi positif. Sejak saat itu, berbagai penelitian mengenai kebahagiaan dan definisi kebahagiaan bermunculan dan terus disempurnakan. Mulai muncul statistik mengenai kebahagiaan, yang membandingkan kondisi kebahagiaan antarnegara di dunia.

Salah satu definisi mengenai kebahagiaan yang diterima secara luas oleh ahli adalah definisi yang diberikan oleh Martin Seligman. Seligman sendiri dikenal sebagai tokoh utama dari kelahiran psikologi positif. Menurut Seligman (2002, 2012), kata kebahagiaan itu karena seringkali diucapkan, maka kerap kehilangan arti yang sebenarnya. Untuk memperjelas arti dari kebahagiaan, Seligman membedakan dengan kesenangan *(pleasure).* Dua hal ini sering dianggap sama, padahal berbeda.

Kebahagiaan tidak boleh dirancukan dengan kesenangan. Kesenangan adalah perasaan yang dirasakan ketika sebuah hasrat terpenuhi, baik itu hasrat badani (makan, minum, seksual) ataupun psikologi (misalnya hasrat untuk dipuji dan diperhatikan, dan sebagainya). Dalam kesenangan, ukuran yang penting adalah seberapa besar sensasi nikmat *(hedonic tone)* dari sebuah kebutuhan itu terpenuhi. Misalnya, Anda bercita-cita memiliki sebuah rumah dengan bangunan gaya Romawi. Ketika keinginan Anda tersebut terpenuhi, ada sebuah perasaan sensasi kenikmatan yang muncul karena hasrat tersebut terpenuhi. Apa yang Anda rasakan tersebut sebenarnya bukan kebahagiaan, tetapi kesenangan. Tiap hari kita sebenarnya berhadapan dengan banyak kesenangan--dari makan, mendapatkan nilai bagus saat ujian, hingga tim favorit sepak bola meraih kemenangan. Sementara kebahagiaan adalah sebuah kepuasan batin atau sukacita jiwa *(the joy of soul)* saat seseorang menggunakan karakter yang dipunyai secara optimal untuk melakukan sesuatu yang bermakna (Arif, 2016). Kebahagiaan tidak selalu harus disertai dengan peristiwa yang menyenangkan. Bahkan dalam kesedihan ataupun penderitaan, orang tetap bisa mendapatkan kebahagiaan.

Banyak orang yang kehidupannya tampak sempurna dan menyenangkan, ternyata di balik itu mempunyai kehidupan yang tidak bahagia. Kita sering membaca berita ada pesohor terkenal yang kehidupannya tampak sempurna (kekayaan yang berlimpah, karier dan nama yang terkenal), tetapi kehidupannya ternyata rapuh. Beberapa di antaranya kemudian memilih jalan bunuh diri karena merasa hidupnya tidak bermakna dan tidak bahagia. Sebaliknya ada orang lain yang mempunyai kehidupan yang kontras, serba terbatas ternyata bisa hidup bahagia. Kebahagiaan adalah sebuah konsep batin, kegembiraan jiwa ketika seseorang menggunakan daya dan karakter yang dimilikinya untuk mengisi hidupnya agar bermakna.

Seligman (2002) sendiri menyebut kebahagiaan itu sebagai kebahagiaan yang otentik (authentic happiness). Ini untuk membedakan

dengan kesenangan *(pleasure).* Yang dimaksud Seligman dengan kebahagiaan otentik adalah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari segala aktivitas. Kebahagiaan yang real adalah tujuan akhir dari kehidupan. Tidak ada tujuan lain yang hendak diraih selain kebahagiaan itu sendiri. Pikirkan sejenak, apa yang saat ini menjadi keinginan Anda? Lulus kuliah? Bekerja di perusahaan yang diidamkan? Menikah dengan orang yang dicintai? Memiliki rumah? Dan seterusnya. Setelah semua keinginan Anda itu tercapai, pertanyaan berikutnya adalah: selanjutnya apa? Tujuan-tujuan yang Anda tetapkan itu (dari lulus kuliah, bekerja, menikah hingga memiliki rumah) pada dasarnya adalah tujuan antara untuk mencapai tujuan akhir yang lebih besar yakni kebahagiaan. Semua pergumulan Anda tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan.

Konsep Seligman mengenai kebahagiaan yang otentik *(authentic happiness)* mendapat inspirasi dari gagasan Aristoteles mengenai eudomania yakni hidup yang dijalani dengan baik (Arif, 2016; Jørgensen & Nafstad, 2012: 21-24). Dalam pandangan Aristoteles, hidup yang baik bukanlah hidup yang diliputi oleh kesenangan dan kenikmatan, melainkan hidup yang ditandai oleh kesadaran sehingga berbuah makna dan kebajikan, serta hidup di mana pribadi dan karakter dari masing-masing orang telah didayagunakan dengan penuh, baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Orang yang bahagia bukanlah orang yang terhindar dari kesulitan dan penderitaan, serta menikmati kesenangan bermacam-macam. Orang yang bahagia sebaliknya adalah orang yang mampu mengolah hidupnya, menggunakan karakter yang dipunyai (seperti kerja keras, bersyukur, optimis dan sebagainya) sehingga hidupnya kemudian bisa bermakna bagi dirinya dan masyarakat (Jørgensen & Nafstad, 2012).

Apa yang membuat seseorang bahagia? Faktor apa yang menentukan tingkat kebahagiaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, dalam kurun waktu yang lama, kurang mendapat perhatian dalam lapangan ilmiah, khususnya psikologi. Ahli psikologi lebih

tertarik mempelajari berbagai masalah dan gangguan kejiwaan dari pada menyelidiki kebahagiaan. Pada tahun 1990-an mulai muncul kesadaran di kalangan ilmuan untuk memulai penelitian mengenai kebahagiaan. Kesadaran tersebut bahkan berwujud dalam sebuah gerakan di kalangan ahli-ahli psikologi yang dikenal dengan nama psikologi positif. Kebahagiaan menjadi konsep kunci dari psikologi positif. Setelah melakukan banyak penelitian lapangan, ahli-ahli di bidang psikologi positif meyakini bahwa kebahagiaan bisa diukur dan diteliti. Kebahagiaan seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yang bisa dirumuskan sebagai berikut (lihat Seligman, 2002).

H = S+C+V

H = Happiness (kebahagiaan)
S = Set Range (batasan tingkat kebahagiaan seseorang, disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir)
C = Circumstance (kondisi atau situasi, kejadian sehari-hari yang menyenangkan atau menyedihkan)
V = *Voluntary Activities* (tindakan atau perilaku, dilakukan secara sengaja)

Faktor pertama yang menentukan kebahagiaan adalah batasan kebahagiaan *(set range)* karena faktor genetik. Mirip dengan penyakit (ada orang yang lebih mudah sakit dan sebaliknya ada orang yang dilahirkan sehat), kebahagiaan sebagian juga dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir. Ada orang yang mudah bahagia, di mana peristiwa yang sedikit saja menyenangkan bisa membuat orang bahagia. Tetapi ada orang yang sulit bahagia, di mana dibutuhkan peristiwa besar yang luar biasa menyenangkan baru bisa membuat orang tersebut bahagia. Perhatikan orang di sekitar Anda. Anda mungkin melihat ada orang yang mudah tertawa, tetapi ada orang lain yang sulit sekali tertawa. Kondisi ini disebut dengan batasan kebahagiaan. Faktor genetik (bawaan sejak

lahir) menentukan batasan kebahagiaan seseorang.

Batasan kebahagiaan ini bisa berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Anda misalnya menginginkan sebuah sepeda motor. Anda membayangkan diri Anda akan sangat bahagia kalau mempunyai sepeda motor. Karena itu Anda bekerja keras, hidup hemat dan menabung agar memiliki motor. Ketika motor itu kemudian berhasil Anda dapatkan, Anda akan sangat senang dan bahagia. Tetapi lama kelamaan, tingkat kegembiraan ini mulai berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan itu terjadi karena batasan kebahagiaan *(set range)* Anda telah berubah. Memiliki motor tidak lagi membuat Anda merasa bahagia. Anda kemungkinan akan membuat batasan kebahagiaan baru, seperti memiliki mobil, dan seterusnya.

Faktor kedua yang memengaruhi kebahagiaan adalah kondisi atau situasi yang dialami oleh seseorang. Setiap saat kita mengalami berbagai situasi, baik menyenangkan atau menyedihkan. Situasi tersebut berada di luar kendali seseorang seperti kecelakaan, kematian anggota keluarga, menang undian, mendapatkan bonus, dan sebagainya. Kondisi atau situasi itu memang bisa dikontrol dan dikendalikan, tetapi acapkali tidak bisa diprediksikan karena di luar kendali kita sebagai manusia. Betapapun kita sudah merencanakan hidup kita sebaik-baiknya, ada berbagai peristiwa yang berada di luar kekuasaan kita seperti bencana alam, sakit atau kematian.

Faktor terakhir yang menentukan kebahagiaan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu. Tindakan itu sering disebut sebagai *voluntary activities,* yakni perilaku yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang agar mendapatkan kebahagiaan. Misalnya, kebiasaan untuk selalu bersyukur, memandang hidup secara positif, mengelola emosi, menjalin hubungan persahabatan yang tulus dengan orang lain, dan sebagainya. Kebahagiaan pada dasarnya bisa diciptakan lewat perilaku kita sehari-hari. Misalnya, ada orang yang sudah memiliki segalanya (kekayaan, karier yang bagus) tetapi selalu merasa kurang dan tidak bahagia. Sebaliknya ada orang yang hidupnya pas-pasan, memiliki banyak masalah hidup, tetapi bisa bahagia. Perbedaan

di antara kedua orang ini disebabkan oleh perilaku atau tindakan mereka. Orang yang berbahagia (meskipun miskin dan banyak masalah hidup) memiliki sikap untuk selalu bersyukur *(gratitude)*, menerima dan bersikap positif apapun masalah hidup yang menimpa.

Dari tiga faktor tersebut, mana faktor yang paling menentukan kebahagiaan? Lewat penelitian yang intensif, Lyubomirsky (et.al, 2005:116) menemukan bahwa faktor set range (batas kebahagiaan) menyumbang sekitar 50%, situasi *(circumstance)* sekitar 10% dan perilaku (voluntary activities) sekitar 40%. Dengan kata lain, jika dirumuskan, kebahagiaan itu bisa dicapai lewat rumus = 50% *set range* +10% *circumstance* + 40% *voluntary activities.*

Kebahagiaan pada dasarnya bisa diciptakan. Seligman (2012) memberi istilah kebahagiaan itu sebagai hidup yang tumbuh *(flourishing)*. Ini merupakan keadaan di mana seseorang mampu mendayagunakan dan menunjukkan perkembangan yang subur *(flourish)* pribadi sehingga potensi yang ada dalam dirinya keluar dan hidupnya kemudian bermakna bagi orang lain dan masyarakat. Istilah "kebahagiaan otentik" atau "kebahagiaan yang bertumbuh" sebenarnya mirip. Hanya saja, lewat kata tumbuh *(flourish),* Seligman ingin menekankan bahwa kebahagiaan pada dasarnya adalah diciptakan. Memang kebahagiaan sebagian ditentukan oleh faktor genetik (bawaan sejak lahir) dan situasi atau kondisi di luar diri manusia. Tetapi kita tidak boleh terpaku dengan nasib atau menggantungkan diri pada situasi. Sebaliknya, kita harus aktif dalam menciptakan kebahagiaan.

Jika dilihat lagi, kebahagiaan ditentukan oleh batasan kebahagiaan akibat faktor genetik (50%), situasi (10%) dan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu (40%). Jika disederhanakan, kebahagiaan itu ditentukan oleh faktor di luar diri kita (60%, gabungan dari batasan kebahagiaan + situasi) dan perilaku atau tindakan kita sendiri (40%).

Faktor genetik (50%) dan situasi (10%) berada di luar diri kita dan karenanya tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Faktor genetik adalah takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan dan

karenanya harus kita terima. Faktor situasi juga berada di luar jangkauan kita. Betapapun kita sudah merencanakan hidup kita sebaik mungkin, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari dan di masa mendatang. Peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Jika faktor genetik dan situasi tidak bisa kita kendalikan, berbeda dengan faktor perilaku *(voluntary activities).* Faktor ini sepenuhnya berada di tangan kita. Kitalah yang bisa menentukan, apakah kita ingin bahagia ataukah tidak. Dalam diri manusia, menurut Seligman, terkandung potensi-potensi untuk hidup bahagia. Potensi tersebut harus dibiarkan tumbuh. Hanya dengan membiarkan potensi itu tumbuh *(flourish)*, maka kebahagiaan itu bisa dicapai.

Dari tiga faktor yang menentukan kebahagiaan tersebut, faktor yang paling penting adalah perilaku *(voluntary activities).* Ada dua alasan. Pertama, faktor ini menempatkan kita sebagai individu yang bisa menentukan sendiri kebahagiaan. Kebahagiaan tidak harus diterima sebagai nasib yang harus kita terima (genetik) atau tidak harus pasrah dengan kondisi yang menimpa kita (situasi), sebaliknya kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Lewat faktor ini, kita bisa mengupayakan kebahagiaan yang kita inginkan. Kedua, dengan perilaku *(voluntary activities)* kita bisa mengendalikan faktor genetik dan situasi yang tidak membahagiakan, menjadi membahagiakan.

Menurut Seligman (2002, 2012), perilaku dan karakter yang kita punyai merupakan jangkar pengaman yang bisa membuat seseorang bisa menetralisir kehidupannya karena bawaan dari lahir (genetik) atau situasi yang sangat menyedihkan atau menggembirakan. Sebagai ilustrasi, ada seseorang yang mengalami situasi yang sangat menyedihkan--korban bencana alam, semua anggota keluarganya meninggal, tempat tinggalnya hancur dan harta bendanya ikut hilang. Pada awalnya, kehidupan orang tersebut akan meluncur ke bawah, tingkat kebahagiaannya sangat rendah. Mungkin saja orang itu akan merasa bahwa ia adalah orang paling tidak beruntung di dunia. Bagaimana orang ini bisa bertahan dan kemudian membalik keadaan

menjadi kehidupan yang bahagia? Jawabannya terletak pada karakter orang tersebut dalam menghadapi situasi. Dengan karakter dan perilaku itu, orang akan bersikap terhadap situasi yang menyedihkan sehingga ia bisa melewati semua kemalangan dengan selamat dan bahagia. Misalnya, karakter berupa mudah bersyukur *(gratitude).* Dengan karakter itu, ia tidak menyalahkan alam atau lingkungan, sebaliknya ia menghadapi semua cobaan dengan rasa bersyukur--seperti beruntung masih bisa hidup dan sehat sementara banyak teman dan tetangganya yang meninggal. Dengan karakter itu, ia akan merasa bahagia karena tetap sehat dan bisa selamat dari bencana. Bandingkan jika orang tidak punya karakter mudah menerima dan bersyukur (gratitude). Orang itu mungkin akan membenci Allah yang telah memberi musibah besar dalam kehidupannya. Sepanjang hidup ia akan dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian kepada Allah. Contoh ini memperlihatkan, bagaimana kebahagiaan itu dicapai lewat perilaku yang kita lakukan.

Seligman (2012) bersama dengan kolega dan mahasiswanya, membuat penelitian yang intensif mengenai perilaku apa yang bisa mendorong orang bisa mencapai kebahagiaan. Perilaku itu diidentifikasi oleh Seligman sebagai karakter pribadi, yakni pilihan-pilihan saat menyikapi berbagai situasi dan kondisi dirinya. Karakter-karakter yang menyumbangkan kebahagiaan itu, setelah diperas bisa dikelompokkan menjadi lima jenis, dan dirumuskan sebagai berikut.

V = P+E+R+M+A

V = *Voluntary activities* (tindakan atau perilaku, dilakukan secara sengaja)
P = *Positive emotion* (emosi positif)
E = *Engagement* (keterlibatan, tujuan yang lebih besar)
R = *Relationship* (relasi atau hubungan yang positif dengan orang lain)
M = *Meaning of life* (makna hidup)
A = *Accomplishment* (prestasi atau pencapaian)

Pertama, emosi yang positif *(positive emotions)*. Sesuai dengan namanya, emosi ini berkaitan dengan hal-hal yang positif atau menyenangkan, seperti sukacita, rasa damai, cinta, dan sebagainya. Lawan dari sikap positif, adalah sikap negatif, seperti marah, frustrasi, takut, depresi, dan sebagainya. Menurut banyak studi dalam lapangan psikologi positif (lihat Arif, 2016), emosi positif mampu membuka hati dan pikiran pada berbagai kemungkinan dan kesempatan yang bisa memunculkan eksplorasi kreatif. Jika emosi negatif membuat atensi menyempit, sikap positif membuat atensi menjadi melebar dan terbuka. Hati dan pikiran jadi terbuka pada berbagai nuansa realitas dan potensi kreatif. Sikap ini juga membuat kita cenderung terbuka pada orang lain, menjadi lebih peka dengan kehadiran orang lain. Bayangkan Anda pulang ke rumah dari seharian kerja di kantor. Jika emosi positif yang dibawa, Anda akan diliputi oleh kebahagiaan hati dan pikiran yang terbuka, menyambut anak dan istri di rumah dengan rasa suka dan bersyukur, diwarnai oleh canda tawa. Sebaliknya, jika emosi kita diliputi oleh emosi yang negatif, kita pulang ke rumah dengan rasa marah, membawa persoalan di kantor ke rumah, dan seterusnya.

Kedua, keterlibatan *(engagement)*. Secara sederhana, engagement berarti melibatkan diri dengan sepenuh hati dengan total, berkomitmen dalam suatu relasi dengan seseorang/kelompok/kegiatan dengan tujuan tertentu yang bermakna bagi individu. Kebalikan dari engagement adalah berjarak *(disengagement),* di mana seseorang hanya menjalani aktivitas tanpa komitmen (tidak melibatkan hati), berjarak, tidak mau menanggung risiko dan hanya menjalankannya sesuai aturan atau ketentuan yang ada. Engagement dapat terjadi dalam segala bentuk hubungan, mulai hubungan interpersonal (misalnya pernikahan, persahabatan), organisasi di tempat kerja, hingga hubungan kita dengan warga masyarakat. Orang yang tidak mempunyai keterlibatan *(engagement)*, hanya bekerja dengan menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan, tidak total dan sepenuh hati. Datang ke kantor tepat waktu, bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya, untuk kemudian pulang tepat waktu. Bandingkan dengan orang yang

mempunyai mempunyai keterlibatan tinggi *(engagement).* Ia akan bekerja secara total, sepenuh hati, kadang kala harus menanggung risiko untuk kemajuan organisasi di mana ia bekerja. Ia bekerja tidak semata untuk mendapatkan gaji, tetapi mempunyai tujuan lain yang lebih besar, yang ditunjukkan dengan komitmen dan tanggung jawab.

Ketiga, menjalin hubungan yang baik *(positive relationship).* Kebahagiaan juga terbangun ketika kita menjalin hubungan positif dengan orang lain. Perilaku ini bisa menghindarkan kita dari kemungkinan merasa sendirian (alienasi) dari orang lain. Banyak contoh kasus bagaimana orang merasa dirinya sendirian padahal berada dalam kerumunan, berada di tengah banyak orang. Lewat hubungan yang positif dengan orang lain, kita akan belajar dan mengembangkan sikap saling percaya *(trust),* kerja sama, cinta, empati, belas kasih *(compassion)* dengan orang lain. Hubungan yang positif membuat hidup kita menjadi lebih kaya dan membahagiakan, karena kita belajar untuk menghargai kehadiran orang lain dan bekerja sama dengan orang lain.

Keempat, makna hidup *(meaning of life)*. Kebahagiaan juga bisa ditumbuhkan dengan cara memberi makna hidup yang lebih baik. Makna hidup oleh Seligman (2012) dipahami sebagai pengikatan diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Setiap peristiwa yang kita alami punya makna, dan dengan mengambil pelajaran serta makna hidup dari semua peristiwa yang dialami, maka hidup kemudian juga menjadi bermakna. Kematian adalah peristiwa yang membuat hidup kita tidak bahagia. Tetapi jika kita percaya dengan keberadaan kita dan makna dari setiap peristiwa atau di balik peristiwa, kita akan menjadi lebih menerima kepergian anggota keluarga kita. Tindakan memberikan sejumlah uang kepada orang miskin, mungkin terlihat tidak efisien dan produktif. Tetapi bagi orang yang memandang hidup dengan bermakna, menyumbang adalah perilaku yang membahagiakan. Hidup akan membahagiakan ketika melihat orang lain juga bahagia, dan orang bisa tumbuh dengan bantuan yang kita berikan.

Kelima, prestasi atau pencapaian *(accomplishment)*. Hidup juga membahagiakan jika kita bisa mencapai sesuatu. Pencapaian ini semacam buah dari perilaku dan kerja yang sudah kita lakukan. Pencapaian ini tidak harus berupa sesuatu yang sangat besar (misalnya mendapatkan medali emas di suatu kejuaraan olahraga atau mendapatkan piala). Pencapaian itu juga bisa bersahaja, misalnya keberhasilan dalam mendidik anak dan menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan tinggi, keberhasilan menghilangkan kebiasaan buruk (seperti merokok, makan tidak sehat) dan sebagainya. Pencapaian terhadap sesuatu akan ditandai dengan kepuasan batin karena kerja keras yang dilakukan seperti terbayar dengan hasil yang baik. Menurut Seligman (2012), pencapaian ini harus dilihat bukan hanya dari hasil tetapi juga proses. Ketika seorang mahasiswa lulus mata kuliah dengan kerja keras akan lebih membahagiakan dibandingkan lulus dengan hasil bagus tetapi hasil mencontek. Uang yang kita dapat dari kerja keras akan jauh lebih membahagiakan dibandingkan dengan mendapatkan uang banyak tetapi hasil dari korupsi.

Kelima karakter atau perilaku tersebut (emosi positif, keterlibatan, menjalin relasi yang baik, makna hidup, dan pencapaian) bisa dipelajari dan diupayakan sehingga menjadi bagian dari perilaku atau karakter hidup seseorang sehari-hari. Lima karakter itu bukan bawaan sejak lahir. Sebaliknya, setiap individu bisa memilih dan berupaya untuk menciptakan dan mendapatkan kebahagiaannya.

PEMIKIRAN DENNY JA MENGENAI KEBAHAGIAAN

Denny JA (2017) membuat model karakter yang bisa menciptakan kebahagiaan. Sama dengan pendapat Seligman (2002, 2012), Denny JA berpendapat bahwa kebahagiaan ditentukan oleh faktor bawaan, situasi, dan aktivitas atau perilaku yang bisa mendorong kebahagiaan. Faktor

bawaan dan situasi, berada di luar diri individu, sementara karakter atau perilaku berada dalam kontrol individu. Kita bisa menentukan dan membentuk kebahagiaan kita sendiri dengan mengembangkan karakter yang positif.

Voluntary activities didefinisikan oleh penulis sebagai pola pikir *(mindset)* dan kebiasaan *(habit)*. Kebiasaan adalah pola perilaku otomatik yang dilakukan individu, terbentuk karena perilaku yang berulang terjadi. Sementara pola pikir *(mindset)* adalah kerangka berpikir yang membenarkan dan menghasilkan sebuah kebiasaan. Mereka yang memiliki kebiasaan merokok setiap pagi, sebagai misal, akan membentuk perilaku otomatis: bangun tidur, tanpa berpikir lagi ia langsung mencari rokok lalu menyalakannya. Mereka yang punya kebiasaan berdoa setiap pagi juga melakukannya secara otomatis. Ketika mata terbuka, tanpa perlu berpikir ia segera berdoa. Kebiasaan merokok dan berdoa sangat sulit diubah jika individu bersangkutan mengembangkan pola pikir dan kerangka berpikir yang melegitimasi kebiasaan itu. Kebahagiaan adalah juga hasil dari kebiasaan dan pola pikir. Mereka yang bahagia dan tidak, dapat terlihat dari pola pikir dan kebiasaannya. Hidup seseorang berpotensi berubah lebih bahagia jika menggunakan kebiasaan (habit) yang baik. Dengan mempelajari literatur kontemporer di bidang psikologi, sosiologi, ekonomi, politik hingga neurosains, penulis merangkum karakter yang bisa membentuk kebahagiaan ini dengan rumus berikut.

V = 3P+2S

V = *Voluntary activities* (tindakan atau perilaku, dilakukan secara sengaja)
P (1) = P*ersonal relationship* (hubungan personal)
P (2) = *Positivity* (sikap hidup positif)
P (3) = *Passion* (keterlibatan pada sesuatu dengan sepenuh hati)

S (1) = *Small winning* (kemenangan kecil)
S (2) = *Spiritual life* (hidup yang dilandasi oleh spiritualitas)

Pertama, hubungan personal. Kebahagiaan ditentukan oleh hubungan pribadi, hubungan interpersonal seseorang dengan orang lain dalam keluarga dan lingkungan sosial lainnya. Pola pikir dan kebiasaan bahagia di antaranya bersumber dari hubungan yang personal, yang akrab. Semakin beragam lingkungan persahabatan, semakin kaya nuansa relasi personal. Berdasarkan riset akademik, mereka yang paling bahagia dikelilingi para sahabat, dan hidup dalam komunitas yang akrab. Kelompok orang yang paling tidak bahagia hidup menyendiri, atau sulit bersahabat dan hidup jauh dari komunitas. Hidup yang bahagia tidak hanya buah dari relasi individu dengan lingkungan mikronya: keluarga, teman main, atau lingkungan kerja. Tapi juga ditentukan oleh lingkungan sosial makro: kondisi ekonomi, kultur dominan, bahkan juga kebebasan berekspresi masyarakat di tempat ia hidup.

Kedua, sikap hidup positif. *Positivity* atau sikap hidup yang positif selalu melahirkan perspektif yang juga positif, perspektif yang bukan saja dapat membantu kita melihat realitas lebih apa adanya, namun juga menumbuhkan emosi positif. Itulah perspektif yang menumbuhkan optimisme, memberi harapan, berkarakter membantu orang lain (bukan sebaliknya menyusahkan orang lain), ceria, bersyukur. Ada berbagai macam sikap hidup yang positif, di antaranya: kebiasaan memberi, menolong orang lain, termasuk orang yang tak dikenal sekalipun, mudah bersyukur *(gratitude),* sikap hidup yang bajik, optimis, dan pro-sosial.

Ketiga, keterlibatan pada sesuatu dengan sepenuh hati *(passion).* Passion adalah kebiasaan melibatkan diri secara total, dengan semangat sepenuh hati atas aktivitas apa pun yang dianggap penting. Passion membuat hidup seseorang lebih berwarna, dan pada gilirannya akan membuat lebih bahagia. Passion ini bisa berupa

olahraga, hobi, pekerjaan, atau aktivitas yang membuat seseorang mencurahkan segenap pikiran dan sepenuh hati.

Keempat, kemenangan kecil (*small winning*). Hidup yang dipenuhi oleh aneka kemenangan kecil akan menjadi hidup yang bergelora, hidup bersemangat. Kemenangan ini membuat seseorang merasa ada yang dibanggakan, bertambah semangat, lebih berdisiplin, lebih bergairah dengan kehidupan sosial yang lebih bermakna. Aroma kemenangan memberikan emosi positif yang ceria, bahagia, dan relaksasi. Bermacam riset akademik membuktikan persepsi menang memengaruhi hingga ke level hormon individu. Karena pentingnya perasaan menang, sementara di sisi lain kita tak sering mengalami kemenangan besar dalam hidup, maka perlu kita ciptakan hidup yang dipenuhi oleh serial kemenangan kecil (small wins). Hal apa pun dalam hidup dapat kita buatkan target realistiknya (yang bisa dicapai dalam jumlah banyak). Dengan demikian, secara rutin kita akan selalu menikmati dan merayakan serial kemenangan kecil itu.

Kelima. hidup yang dilandasi oleh spiritualitas (*spiritual life*). Yang dimaksud dengan *spiritual life* adalah hidup yang diperkaya oleh dimensi spiritual. Seorang individu tak hanya kumpulan benda, peristiwa, dan kepentingan pribadinya semata. Spiritual life memperkaya hidup individu, membuatnya lebih bermakna, bahwa hidup punya tujuan yang lebih besar dari sekadar dirinya pribadi. Dalam kekayaan spiritual, ada suasana perjuangan di sana. Ada mimpi untuk ingin ikut berkorban menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ada makna yang lebih besar dibandingkan penderitaan dan kesulitan yang datang. Aneka riset akademik membuktikan, mereka yang berjuang, yang punya sense of purpose, hidup untuk sesuatu yang besar, justru lebih merasakan hidup yang bermakna.

III. Kebahagiaan: Dari Individu ke Negara

Kebahagiaan semula hanya digunakan untuk menggambarkan kondisi individu. Individu yang bahagia adalah individu yang berkembang (*flourishing*), yang ditandai oleh emosi yang positif, mempunyai penilaian yang baik atas kehidupan mereka, terlibat, dan mempunyai makna atau tujuan hidup (Seligman, 2002). Pertanyaan yang penting, jika kebahagiaan adalah tujuan dari semua orang, apakah mungkin menerapkan ukuran kebahagiaan ini untuk negara? Apakah mungkin menetapkan indikator untuk menentukan ukuran kemajuan suatu negara, berdasar kebahagiaan warganya? Apakah kita bisa mengategorikan negara berdasarkan kebahagiaan? Diskusi ini muncul pada awal tahun 2000-an. Kebahagiaan yang pada awalnya banyak dibahas dalam studi psikologi, kemudian diterapkan pada kebijakan publik (Diener & Seligman, 2004). Bab ini akan mendiskusikan diskusi dan perdebatan mengenai penggunaan indikator kebahagiaan untuk mengukur kemajuan suatu negara.

PADA MULANYA ADALAH PDB

Kemajuan suatu negara, pada awalnya diukur melalui ukuran yang disebut dengan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto*/PDB). PDB menghitung nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi

di dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Umumnya, PDB dihitung melalui pendekatan pengeluaran, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh semua pihak di dalam satu negara (rumah tangga, investasi, sektor swasta, pemerintah, dan sebagainya). Bayangkan seseorang pergi ke kantor naik mobil. Ia membeli kopi dan sarapan pagi di semua kedai kopi, kemudian membeli bensin dan uang tol, membelanjakan uang untuk makan di restoran ketika waktu makan siang, sampai menonton film di malam hari. Semua pengeluaran setiap orang tersebut kemudian ditotal. Ini ditambah dengan pengeluaran dari sektor swasta dan pemerintah. Total pengeluaran tersebut mencerminkan total pengeluaran suatu negara di satu periode tertentu. Pada tahun 2023, total PDB Indonesia mencapai Rp21.000 triliun.

Dalam waktu yang panjang, PDB digunakan untuk mengukur kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu negara. Ketika PDB negara turun, ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang lesu, uang beredar yang turun, dan pendapatan warga mengalami penurunan. PDB juga menjadi indikator yang baik untuk menggambarkan kenaikan atau penurunan lapangan pekerjaan. Apakah PDB menggambarkan ukuran dari kesejahteraan dari warga negara? Tentu saja tidak. PDB adalah PDB, hanya sebatas alat ukur untuk mengukur kemajuan atau kemunduran ekonomi. Ketika PDB negara naik, tidak secara otomatis warganya mengalami kemajuan ekonomi, apalagi digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan. Angka PDB yang besar mungkin saja disumbang oleh segelintir orang kaya. Orang kaya yang membelanjakan uangnya untuk membeli mobil mewah, makan di restoran, liburan mewah, membeli baju mahal di pusat perbelanjaan, pasti akan menyumbangkan nilai PDB ratusan atau ribuan kali lipat dibandingkan dengan warga miskin. PDB juga hanya mengukur aktivitas ekonomi di pasar. Ia tidak menghitung aktivitas yang tidak mempunyai nilai ekonomi, seperti makan dari hasil pertanian sendiri, merawat anak, memperbaiki rumah sendiri, dan sebagainya.

PDB bukan hanya tidak mencerminkan kesejahteraan seseorang, tetapi juga kerap kali kontradiktif dengan kesejahteraan. Gertner (2010) menggambarkan dengan baik kontradiksi PDB ini melalui perbedaan "Manusia PDB Tinggi" (banyak melakukan aktivitas ekonomi) dan "Manusia PDB Rendah" (kurang melakukan aktivitas ekonomi). Berikut pandangan Gertner yang dikutip panjang di bawah ini:

> "*Pertimbangkan, misalnya, hidup dua orang ini: kita sebut saja Manusia PDB Tinggi dan Manusia PDB Rendah. Manusia PDB Tinggi harus memakan waktu lama ke tempat kerja dan mengendarai mobil yang boros bensin, memaksanya keluar banyak uang untuk bahan bakar. Lalu lintas pagi dan stres yang ditimbulkannya tidak baik buat mobilnya (yang ia ganti tiap sekian tahun sekali) dan tidak baik pula buat kesehatan kardiovaskularnya (yang ia obati dengan prosedur medis dan obat-obatan yang mahal). Manusia PDB Tinggi bekerja keras, juga berfoya-foya. Ia suka pergi ke bar-bar dan restoran, suka televisi layar datar dan mengagumi rumah besarnya, yang ia jaga pada suhu sejuk sepanjang tahun dan dilindungi dengan sistem pengamanan canggih. Manusia PDB Tinggi dan istrinya membayar pengasuh (buat anak-anak mereka) dan panti jompo (buat orang tua mereka yang sudah sepuh). Mereka tak sempat melakukan pekerjaan rumah tangga, jadi mereka sewa pekerja rumah tangga penuh waktu. Mereka tak punya waktu buat masak, jadi biasanya mereka pesan saja. Mereka terlampau sibuk untuk mengambil liburan panjang.*
>
> *Ternyata, semua hal itu—memasak, bersih-bersih, merawat di rumah, liburan tiga minggu, dst—adalah aktivitas-aktivitas yang membuat Manusia PDB Rendah dan istrinya sibuk. Manusia PDB Tinggi suka mesin cucinya yang berpengering; Manusia PDB Rendah tidak keberatan menjemur cuciannya di tiang jemuran. Manusia*

PDB Tinggi membeli sayur yang sudah dicuci di swalayan; Manusia PDB Rendah menanam sayuran di kebunnya. Ketika Manusia PDB Tinggi ingin buku, ia beli; Manusia PDB Rendah meminjam di perpustakaan. Ketika Manusia PDB Tinggi ingin berolah raga, ia mendaftar di pusat kebugaran; Manusia PDB Rendah mengeluarkan sepatu lamanya dan lari-lari keliling perumahan. Pada rute pagi harinya, Manusia PDB Tinggi berkendara melewati Manusia PDB Rendah, yang berjalan ke tempat kerja dengan baju dril yang agak kisut. Berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi, tak syak lagi Manusia PDB Tinggi mengungguli Manusia PDB Rendah. Gajinya lebih tinggi, pengeluarannya lebih banyak, aktivitas ekonominya lebih meriah. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa menurut standar modern Manusia PDB Tinggi bermanfaat lebih besar bagi negaranya. Yang tidak bisa kita katakan dengan pasti adalah apa benar hidupnya lebih sejahtera".

PDB tidak bisa menggambarkan kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan warga terlalu kompleks untuk hanya diukur berdasarkan pengeluaran yang dilakukan. Belum lagi ukuran ini juga tidak menggambarkan kondisi real dari mayoritas warga. Jika PDB bukan alat ukur yang tepat untuk menggambarkan kesejahteraan, lalu alat ukur apa yang bisa dipakai untuk menggambarkan kesejahteraan?

Pada tahun 2008, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy membentuk suatu komisi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Komisi ini bernama *Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress* (*Commission sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social*/CMEPSP). Komisi ini beranggotakan tiga ahli ekonomi terkemuka, yakni Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi. Pada tahun 2009, komisi ini menyelesaikan laporan, di mana laporan ini kemudian banyak sekali dikutip dan menjadi rujukan dalam membangun

indikator baru sebagai pengganti PDB (lihat Stiglitz, et.al, 2009).

Hasil dari komisi tersebut merekomendasikan perlunya ukuran baru untuk menggantikan PDB sebagai indikator utama kemajuan negara. PDB tidak mencerminkan kesejahteraan warga negara. PDB yang besar mungkin saja disumbang oleh beberapa orang. Menurut laporan tersebut, PDP termasuk PDB per kapita (perhitungan rata-rata atas pendapatan dan kekayaan per kapita) tidak memberi indikasi bagaimana sumber daya yang ada itu terdistribusi antarindividu atau antar rumah tangga. Misalnya, pendapatan rata-rata per kapita tetap tak berubah sekalipun distribusi pendapatan menjadi kian timpang. Indikator yang lebih menggambarkan kesejahteraan adalah pendapatan atau konsumsi median. Pendapatan median adalah pendapatan yang setengah dari individu-individu yang dihitung berada di atas nilai pendapatan tersebut dan setengahnya lagi di bawah. Dalam beberapa hal, individu median adalah individu 'tipikal'. Jika ketimpangan meningkat, perbedaan antara median dan rata-rata akan ikut melebar, sehingga fokus kepada rata-rata tidak akan memberikan gambaran akurat mengenai kesejahteraan ekonomi 'tipikal' anggota masyarakat. Sebagai contoh, jika semua kenaikan pendapatan masyarakat diterima oleh mereka yang berada di 10% teratas, maka pendapatan median bisa tetap tak berubah, sementara pendapatan rata-rata akan naik.

Komisi CMEPSP atau dikenal dengan Komisi Stiglitz (Stiglitz, et.al, 2009) memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk pengukuran PDB di masa mendatang. Pertama, memusatkan perhatian pada sudut pandang rumah tangga. Daripada memusatkan pada angka produk agregat nasional yang tidak menggambarkan kesejahteraan warga, pengukuran seharusnya memusatkan perhatian pada sudut pandang rumah tangga. Sekalipun informatif melacak kinerja perekonomian secara keseluruhan, tren-tren dalam standar kehidupan material masyarakat akan teramati lebih baik jika ditelusuri dari besaran pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Penggunaan sudut pandang

rumah tangga mengharuskan diperhitungkannya kaitan pembayaran antar sektor, seperti misalnya pajak yang masuk ke pemerintah, jaminan sosial yang datang dari pemerintah, dan pembayaran bunga atas kredit rumah tangga yang masuk pada perusahaan-perusahaan finansial. Jika dirumuskan secara tepat, pendapatan dan konsumsi rumah tangga semestinya juga mencerminkan semua layanan yang disediakan oleh pemerintah, antara lain subsidi perawatan kesehatan dan pendidikan.

Pertama, perhitungan seharusnya memperhatikan pendapatan dan kekayaan. Pendapatan dan konsumsi penting untuk menilai standar hidup, tapi pada akhirnya poin-poin ini hanya dapat diukur apabila disertai dengan informasi mengenai kekayaan. Rumah tangga yang menghabiskan kekayaannya pada barang-barang konsumsi meningkatkan kesejahteraannya di masa kini namun mengorbankan kesejahteraannya di masa datang. Konsekuensi dari tindakan tersebut akan terlihat dalam neraca keuangan rumah tangga, dan hal yang sama juga berlaku pada sektor-sektor perekonomian lainnya, serta perekonomian secara keseluruhan. Mengukur kekayaan penting untuk menilai keberlanjutan. Apa yang akan dibawa ke masa datang perlu digambarkan sebagai cadangan bahan baku—yakni berupa modal fisik, alam, manusia, dan sosial.

Kedua, memberi perhatian pada distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan. Nilai pendapatan, konsumsi, dan kekayaan rata-rata adalah hitungan statistik yang berguna, namun tidak memberi gambaran keseluruhan tentang standar hidup. Misalnya, kenaikan pendapatan rata-rata dapat berlangsung tidak secara merata pada seluruh anggota kelompok, sehingga kondisi beberapa rumah tangga relatif memburuk dibandingkan yang lain. Pengukuran rata-rata atas pendapatan, konsumsi, dan kekayaan idealnya dibarengi dengan indikator-indikator yang mencerminkan distribusinya. Hitungan median atas konsumsi (pendapatan, kekayaan) memberi pengukuran yang lebih baik atas apa yang terjadi pada diri individu atau rumah tangga "umumnya" dibandingkan hitungan rata-rata atas konsumsi (pendapatan atau kekayaan).

Ketiga, memperluas pengukuran pada aktivitas non-pasar. Terjadi banyak perubahan besar dalam cara rumah tangga dan masyarakat berfungsi. Misalnya, banyak jasa yang dulu diterima dari anggota keluarga yang lain kini dibeli di pasar. Dalam hitungan pendapatan nasional, pergeseran ini diterjemahkan ke dalam naiknya pendapatan, dan bisa memberi kesan keliru bahwa telah terjadi perubahan standar hidup, padahal itu hanya merefleksikan peralihan dari penyediaan jasa non-pasar ke pasar. Banyak layanan yang diproduksi oleh rumah tangga untuk diri mereka sendiri tidak terhitung dalam statistik-statistik resmi pendapatan dan produksi, padahal mereka mewakili aspek penting dari aktivitas ekonomi.

DARI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KE INDEKS KEBAHAGIAAN

Dengan berbagai kelemahan PDB sebagai indikator kemajuan negara, mulai muncul berbagai alternatif pengganti PDB. Salah satu alternatif awal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang dibuat sejak tahun 2010. Indeks ini disusun oleh ekonom asal Pakistan, Mahbub ul-Haq. Indeks ini disusun berdasar konsep kapabilitas dari ekonom asal India, Amartya Sen (1993).

Indeks ini disusun berdasar tiga dimensi utama pembangunan manusia. Pertama, umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*). Dimensi ini terkait dengan kesehatan. Kesejahteraan manusia, hanya bisa dicapai jika warga sehat. Dimensi ini diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yakni rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Indeks harapan hidup dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Kedua, pengetahuan (*knowledge*). Dimensi ini mengacu kepada seberapa baik akses warga kepada pendidikan. Semakin tinggi akses pada pendidikan, akan semakin membuat orang lebih sejahtera. Pendidikan membuat orang memiliki kapabilitas untuk memaksimalkan kemampuan dirinya, seperti mendapat pekerjaan, memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Dimensi ini diukur lewat dua indikator yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah merujuk pada kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Ketiga, standar hidup layak (*decent standard of living*). Agar bisa hidup sejahtera, warga harus memiliki standar hidup layak yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimensi ini diukur melalui indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. PNB per kapita diperoleh dengan membagi semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dengan jumlah penduduk.
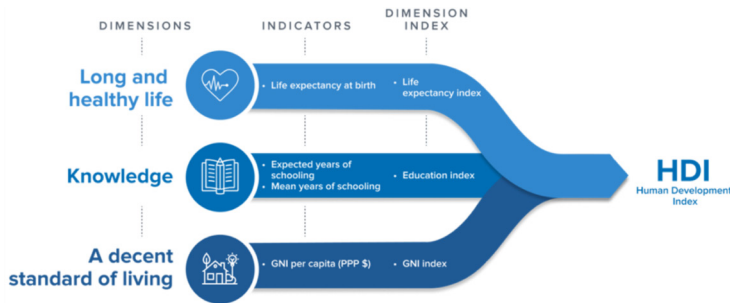
Gambar 3.1. Model Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber: UNDP (2022)

Indeks IPM menggeser perhatian kemajuan suatu negara dari semula hanya berdasar PDB ke indikator yang mencerminkan kesejahteraan (seperti pendidikan dan kesehatan). Meski demikian, indeks ini memiliki sejumlah kelemahan (lihat kritik atas Gartner, 2010). Pertama, indeks ini menggunakan skala arbitrer (tinggi-rendah) yang membuat perbedaan di antara negara relatif kecil. Kedua, indeks ini menunjukkan ketimpangan yang besar di antara negara maju dan negara tidak maju. Indikator pendidikan dan kesehatan, umumnya sangat tinggi di negara maju yang menyebabkan tidak ada perbedaan (kemajuan atau kemunduran) di banyak negara dari tahun satu ke tahun yang lain. Ketiga, indeks ini belum memasukkan dimensi yang penting seperti demokrasi, dan lingkungan hidup. Meski mempunyai banyak kelemahan, indeks ini tetap berguna terutama menggambarkan kemajuan atau kemunduran negara-negara berkembang. Indeks ini bisa menunjukkan, apakah ada kemajuan di negara dunia berkembang terkait dengan pemenuhan kualitas manusia.

Berdasar kelemahan tersebut, pada tahun 2000-an mulai muncul alternatif lain seperti indeks kebahagiaan. Dalam laporan yang dibuat oleh Komisi Stiglitz (Stiglitz, et.al, 2009), direkomondasikan agar PDB diganti dengan pengukuran yang lebih menunjukkan tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan warga negara. Komisi menyarankan dimasukkannya dimensi-dimensi yang mencerminkan kesejahteraan. Ada 8 dimensi: (a) Standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan kekayaan); (b) kesehatan; (c) pendidikan; (d) aktivitas individu termasuk bekerja; (e) suara politik dan tata pemerintahan; (f) hubungan dan kekerabatan sosial; (g) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); (h) ketidakamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Kesemua dimensi ini membentuk kesejahteraan warga negara.

Menurut laporan dalam komisi tersebut (Stiglitz, et.al, 2009), pengukuran kesejahteraan bukan menafikan PDB dan pengukuran-

pengukuran produksi. Ukuran-ukuran itu lahir dari kepedulian mengenai produksi pasar dan lapangan kerja, dan ukuran-ukuran itu tetap menyediakan jawaban atas banyak pertanyaan penting, misalnya pemantauan aktivitas ekonomi. Tapi menekankan kesejahteraan itu penting karena tampak adanya kesenjangan yang semakin lebar antara informasi yang terkandung dalam data PDB agregat dengan apa yang penting bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

PDB VERSUS KEBAHAGIAAN

Indikator kemajuan menggunakan PDB berbeda dengan kebahagiaan. Negara dengan PDB tinggi tidak menjamin bahwa warga di negara tersebut memiliki tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan yang tinggi. Ini bukan berarti PDB tidak penting. PDB tetap penting, hanya saja seharusnya ditempatkan bukan sebagai satu-satunya faktor yang menunjukkan kesejahteraan warga negara. Ini sama dengan yang sudah dibahas di Bab II, mengenai uang dan kebahagiaan. Uang penting, namun uang bukan satu-satunya yang membuat orang menjadi bahagia. Ada orang yang memiliki uang banyak, tetapi hidupnya tidak bahagia.

Hubungan antara PDB dengan kebahagiaan atau kesejahteraan bisa dilihat dalam gambar berikut. Dalam jangka waktu 60 tahun, di Amerika terjadi peningkatan PDB dalam jumlah yang besar. Kenaikan PDB ini ternyata tidak diikuti oleh kepuasan atas hidup. Dari periode 1940-2000, kepuasan publik Amerika relatif datar, tidak ada peningkatan dan penurunan (Diener & Seligman, 2004). Data ini menunjukkan tidak ada hubungan antara PDB dengan tingkat kesejahteraan. Kenaikan PDB tidak diikuti oleh kenaikan kesejahteraan. Kekayaan negara (misalnya diukur dari PDB per kapita) penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang menjamin kebahagiaan atau kesejahteraan. Gambar ini memperlihatkan pola hubungan antara PDB dengan tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan. Ketika PDB per kapita dari suatu

negara di atas US $10.000, hampir tidak ada peningkatan yang signifikan atas kebahagiaan (Diener & Seligman, 2004). Ini sama dengan pola hubungan di tingkat individu. Bagi individu, uang penting tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang. Ketika individu telah mencapai pendapatan dalam taraf tertentu, uang tidak menjadi faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang.
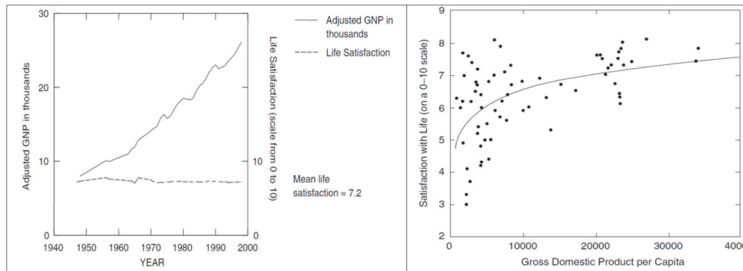
Gambar 3.2. Hubungan PDB dan Kebahagiaan

Sumber: Diener & Seligman (2004)

KEBAHAGIAAN SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF

Jika kebahagiaan digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan suatu negara, bagaimana cara mengukurnya? Mengukur kesejahteraan atau kebahagiaan tentu saja lebih rumit dibandingkan dengan PDB. Hal ini karena kesejahteraan atau kebahagiaan berkaitan dengan rasa, emosi positif tidak hanya berdasarkan materi kebendaaan. Para ahli memperkenalkan dua bentuk kebahagiaan, yakni kebahagiaan subjektif dan objektif (lihat Dolan & White, 2007; Forgeard, et.al, 2011).

Kebahagiaan Subjektif

Kebahagiaan terkait dengan perasaan, penilaian subjektif atau emosi seseorang. Orang yang mempunyai banyak uang, belum tentu hidupnya sejahtera dan bahagia. Cara terbaik untuk mengetahui apakah

seseorang bahagia atau sejahtera adalah dengan menanyakan langsung kepada mereka, perasaan atau emosi mereka. Kebahagiaan seperti ini disebut dengan kebahagiaan subjektif. Kebahagiaan tidak diukur lewat ukuran material, sebaliknya diketahui dengan menanyakan penilaian subjektif orang atas kondisi kehidupannya saat ini.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur kebahagiaan subjektif (selengkapnya lihat Forgeard, et.al, 2011). Pertama, menanyakan secara langsung tingkat kebahagiaan seseorang. Salah satu contoh terkenal adalah skala kebahagiaan subjektif dari Lyubomirsky dan Lepper (Dolan & White, 2007). Publik diberikan pertanyaan dengan skala Likert 7 poin apakah mereka menganggap diri mereka sebagai bukan orang yang sangat bahagia (skor 1) hingga orang yang sangat bahagia (skor 7). Pertanyaan lain, publik juga bisa ditanyakan tingkat kebahagiaan mereka dibandingkan dengan orang lain (misalnya teman, anggota keluarga atau masyarakat pada umumnya).

Kedua, emosi positif. Orang yang sejahtera atau bahagia ditandai oleh adanya emosi positif (seperti gembira, riang, optimis, dan sebagainya). Kesejahteraan atau kebahagiaan diukur dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai emosi positif atau negatif. Publik kemudian diminta untuk menilai perasaan mereka atas sederet emosi tersebut. Salah satu contoh terkenal dari pengukuran emosi ini adalah memberikan publik atau responden dengan 10 emosi positif (misalnya: bersemangat, gembira, waspada) dan 10 emosi negatif (misalnya, kesal, merah, kecewa, malu dan sebagainya). Responden diminta untuk menilai perasaan mereka pada periode waktu tertentu (misalnya dalam 1 bulan terakhir atau 2 minggu terakhir. Kelemahan dari metode ini adalah individu dapat menggunakan perasaan mereka pada saat mereka menjawab untuk menentukan bagaimana perasaan mereka dalam jangka waktu yang lebih lama (terutama jika kuesioner memerlukan jangka waktu yang lebih lama). Responden juga dapat mengalami bias memori, seperti kecenderungan untuk mengingat pengalaman terbaik dan paling menonjol (Forgeard, et.al, 2011).

Ketiga, keterlibatan. Keterlibatan mengacu pada keadaan psikologis di mana individu fokus pada apa yang mereka lakukan. Tingkat keterlibatan yang tinggi ditandai dengan karakteristik berikut: individu memiliki tujuan yang jelas dan secara intrinsik tertarik pada tugas yang sedang dikerjakan; menghadirkan tantangan yang memenuhi tingkat keterampilan individu; tugas memberikan umpan balik langsung dan segera kepada individu; individu mempertahankan rasa kontrol pribadi atas aktivitas tersebut; dan tindakan dan kesadaran menjadi menyatu, sehingga individu menjadi benar-benar tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Individu yang bahagia adalah individu yang terlibat dengan apa yang dilakukan. Orang merasa nyaman dan berkonsentrasi penuh dengan pilihan-pilihan (misalnya pekerjaan). Kepada responden diberikan seperangkat pertanyaan dan diminta menilai kondisi mereka dalam situasi tertentu (misalnya: (a) Saya merasa dapat menangani tuntutan situasi, (b) Saya tahu dengan jelas apa yang seharusnya saya lakukan; dan sebagainya (Forgeard, et.al, 2011).

Keempat, makna dan tujuan hidup. Individu yang bahagia juga ditandai oleh adanya tujuan lain yang dikejar dalam kehidupan. Misalnya, publik diminta untuk menilai pencarian makna secara subjektif. Kepada responden diberikan seperangkat pertanyaan dengan skala Likert 7 poin (misalnya: (a) Hidup saya memiliki tujuan yang jelas; (b) Saya sedang mencari makna dalam hidup saya, dan sebagainya).

Kelima, kepuasan hidup. Bentuk pertanyaan ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam pengukuran kebahagiaan subjektif. Publik atau responden diminta menjawab pertanyaan seperti, "Seberapa puaskah Anda dengan hidup Anda?" Jenis pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan mengenai emosi atau perasaan. Pada pertanyaan evaluasi hidup, publik diminta untuk lebih reflektif dan evaluatif dalam mempertimbangkan kehidupan dirinya (Dolan & White, 2007). Penilaian kepuasan hidup tergantung pada standar yang telah ditetapkan individu untuk diri mereka sendiri. Individu dengan keadaan objektif yang serupa mungkin menilai hidup mereka lebih

atau kurang memuaskan. Penggunaan ukuran kepuasan hidup sebagai indikator kesejahteraan atau kebahagiaan telah dikritik (Forgeard, et.al, 2011). Paralel kritik terhadap emosi positif, beberapa peneliti telah mengkritik ukuran kepuasan hidup karena jawaban mungkin sering menggunakan seberapa baik perasaan mereka saat ditanya sebagai dasar penilaian yang mereka buat. Ukuran kepuasan hidup karena itu dapat terkontaminasi oleh suasana hati saat wawancara dilakukan.

Kebahagiaan Objektif

Pada kebahagiaan subjektif, kebahagiaan diperoleh dengan cara menanyakan secara langsung penilaian subjektif publik atas kondisi dan perasaan mereka. Sementara pada kebahagiaan objektif, diukur dari kondisi-kondisi objektif yang membuat orang bisa bahagia. Pertanyaan utama dalam kebahagiaan objektif adalah: dalam kondisi seperti apa warga di sebuah negara bisa bahagia? Apa syarat yang diperlukan oleh warga negara agar bisa bahagia?

Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk menilai kebahagiaan objektif. Pendekatan yang terkenal adalah pendekatan kapabilitas dari ekonom pemenang hadiah nobel, Amartya Sen (1999). Menurut Sen, setiap manusia agar hidupnya sejahtera dan bermartabat membutuhkan dua kebebasan, yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif adalah kebebasan dari koersi dan kontrol dari pihak luar (seperti bebas dari diskriminasi, bebas untuk memeluk agama dan keyakinan, bebas berorganisasi, dan sebagainya). Sementara kebebasan positif adalah kebebasan yang memungkinkan seseorang melakukan apa yang dianggap bernilai dalam hidupnya. Kebebasan positif ini membutuhkan syarat minimal, yakni kapabilitas. Orang membutuhkan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita capai di dalam hidup. Kebebasan positif dan negatif tersebut saling berkaitan. Misalnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Orang membutuhkan kebebasan negatif, agar tidak mendapatkan ancaman dan paksaan ketika menyampaikan pendapat.

Sebaliknya, orang juga membutuhkan kebebasan positif, karena untuk dapat menyampaikan pendapat seseorang membutuhkan kemampuan, seperti kemampuan baca tulis, kemampuan berargumentasi, kemampuan mendapatkan informasi, dan sebagainya. Seandainya seseorang tinggal di sebuah negara yang menjamin kebebasan orang untuk berpendapat tanpa rasa takut, orang tersebut tetap tidak akan mampu menggunakan haknya kalau ia tidak memiliki kapabilitas baca tulis, mencari informasi, dan seterusnya.

Kapabilitas adalah kemampuan seseorang untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang dianggap bernilai (Sen, 2009). Kesejahteraan hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki kapabilitas. Orang yang bahagia dan sejahtera adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berfungsi atau meraih. Kemiskinan kerap terjadi karena keterbatasan kapabilitas seseorang. Karena kapabilitas yang rendah (misalnya tidak berpendidikan atau sakit), orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, dan sebagai akibatnya jatuh miskin. Karena pendidikan yang rendah, orang mungkin juga tidak mendapatkan akses informasi mengenai program bantuan sosial pemerintah, dan sebagainya.

Menurut pandangan ini, kesejahteraan dan kebahagiaan membutuhkan syarat yakni kapabilitas. Kapabilitas adalah syarat objektif yang memungkinkan seseorang hidup bahagia dan sejahtera. Nussbaum (2006) merinci lebih detail bentuk-bentuk kapabilitas yang memungkinkan seseorang hidupnya sejahtera. Ada 10 bentuk kapabilitas, yakni: kehidupan, kesehatan tubuh, indra/imajinasi/pemikiran, emosi, alasan praktis, afiliasi, hidup dalam hubungan dengan spesies lain, bermain, dan kontrol atas lingkungan. Dari pandangan Sen dan Nussbaum ini terlihat bahwa kesejahteraan atau kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan. Ini bukan berarti uang tidak penting. Uang tetap penting, tetapi tidak bisa menjamin bahwa seseorang yang memiliki uang pasti hidupnya bahagia. Kebahagiaan terjadi ketika orang bisa bebas mencapai

atau meraih apa yang diinginkan dan dianggap bernilai. Misalnya, kapabilitas berupa kesehatan. Jika seseorang sakit, orang tidak akan bahagia meskipun memiliki banyak uang. Kondisi sakit, membatasi kemampuan seseorang untuk meraih tujuan hidupnya.

Pendekatan lain yang banyak digunakan adalah pendekatan barang primer (*primary goods*), dari filsuf Amerika John Rawls (1971). Menurut Rawls, prinsip keadilan hanya bisa dicapai jika setiap orang mempunyai barang primer. Barang primer didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan warga negara agar bisa menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang normal dan sosial. Barang primer ini bisa dibagi ke dalam barang primer alami dan barang primer sekunder. Barang primer alami diperoleh secara alami oleh seseorang, seperti kecerdasan, imajinasi, kesehatan, kekuasaan, dan sebagainya. Sementara barang primer sosial diperoleh melalui alokasi distribusi oleh lembaga-lembaga sosial, seperti hak sosial (hak sipil dan hak politik), kebebasan, pendapatan dan kekayaan, basis sosial harga diri, dan sebagainya. Pendekatan barang primer menekankan pada syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa memaksimalkan hidupnya sebagai manusia yang bermartabat. Negara harus menjamin agar setiap orang bisa mendapatkan barang-barang primer tersebut.

Hubungan Kebahagiaan Objektif dan Subjektif

Kebahagiaan objektif dan subjektif tidak bisa dilepaskan. Hubungan antara kebahagiaan objektif dan subjektif bisa dilihat pada Gambar di bawah ini. Kebahagiaan adalah penilaian subjektif, yang bisa diketahui dengan menanyakan secara langsung kepada individu kondisi dirinya. Seseorang disebut bahagia jika hidupnya merasa berkembang dengan emosi yang positif. Perasaan positif ini tidak muncul dari langit, membutuhkan kondisi objektif tertentu. Sulit membayangkan orang yang hidupnya berada dalam kemiskinan, negaranya sedang mengalami perang, bisa merasakan hidup yang bahagia.

Kebahagiaan objektif adalah kondisi yang memungkinkan kebahagiaan muncul. Kondisi objektif ini adalah serangkaian kapabilitas (Sen) atau barang primer (Rawls) yang diperlukan agar orang bisa bahagia. Bentuk kapabilitas atau barang primer ini ada berbagai macam, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kebebasan menentukan pilihan hidup, dan sebagainya. Dalam konteks negara, hubungan antara kebahagiaan objektif dan subjektif bisa digambarkan sebagai berikut. Jika tujuan negara adalah membuat warga bahagia, maka negara harus melakukan upaya agar warga negara memiliki penilaian yang baik atas kehidupan mereka, terlibat, dan memiliki makna atau tujuan hidup. Negara tidak cukup hanya mengejar PDB tinggi, yang belum tentu berdampak langsung pada kebahagiaan dan kesejahteraan warga. Negara harus melakukan upaya yang bisa menjamin perasaan dan penilaian positif tersebut hadir, misalnya dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, kebebasan individu, menyediakan pekerjaan yang layak, dan sebagainya.
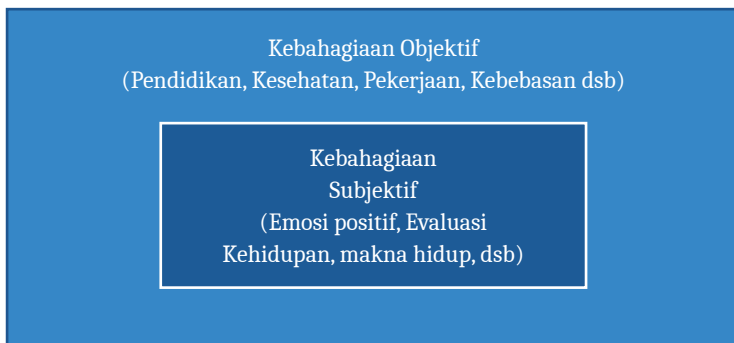
Gambar 3.3. Hubungan Kebahagiaan Objektif dan Subjektif

IV. Menjadikan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Sebagai Tujuan Negara

Pasca publikasi Komisi Stiglitz (lihat Bab III), kesejahteraan dan kebahagiaan mulai mendapatkan tempat dalam dalam kebijakan negara. Pada awalnya kemajuan suatu negara hanya diukur dari Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*/GDP). Negara dianggap mengalami kemajuan jika terjadi peningkatan aktivitas ekonomi. Pemimpin negara fokus mendorong pertumbuhan dengan menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Yang dilupakan dalam target itu adalah: apakah kualitas kehidupan warga menjadi meningkat? Apakah warga menjadi lebih sejahtera dan bahagia? Hasil dari Komisi Stiglitz menjadi inspirasi dari banyak negara untuk menerapkan ukuran baru. Berbagai lembaga internasional juga mulai membangun ukuran dan model dengan memasukkan kualitas dan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama.

PDB bukan tidak penting. Ia tetap penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dari suatu negara. Hanya saja, PDB tidak sama dengan kesejahteraan. Negara dengan PDB tinggi tidak selalu berarti

negara yang bisa menyejahterakan negaranya. PDB juga tidak mengukur keberlangsungan pembangunan (seperti dampak lingkungan dan sebagainya). Negara membutuhkan suatu ukuran yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menilai: apakah negara telah berada pada jalan yang benar untuk menyejahterakan warga.

Bab ini akan menguraikan beberapa model pembangunan yang lahir pasca publikasi Komisi Stiglitz. Inti dari berbagai model ini adalah menempatkan warga di posisi utama. Pembangunan yang dilakukan oleh negara tidak boleh meminggirkan warga. Negara tidak boleh hanya mengejar kemajuan ekonomi (pertumbuhan PDB), sebaliknya harus fokus pada upaya untuk menyejahterakan dan membahagiakan warga negara. Model-model ini bisa disebut sebagai upaya untuk melampaui produk domestik bruto (*beyond GDP*). Prioritas dan target negara harus ditujukan untuk mengejar kesejahteraan warga.

MODEL OECD

Salah satu model terkenal dibuat oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* /OECD), sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara anggota yang menerima prinsip pasar bebas. Lembaga ini membuat model untuk mengukur kemajuan negara, dengan tidak hanya bersandar pada PDB. Model ini dibangun berdasar hasil studi dan rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Stiglitz. Model bisa digambarkan sebagai berikut.

Seperti terlihat dalam gambar, model ini menempatkan kesejahteraan (*well-being*) warga di posisi utama. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara seharusnya ditujukan untuk membuat warga lebih bahagia dan sejahtera. OECD (2011) juga merekomendasikan pengukuran baru untuk mengukur kemajuan suatu negara lewat penelitian dan indeks kesejahteraan dan kebahagiaan warga. Model

OECD ini tidak mengabaikan PDB, hanya PDB ditempatkan sebagai elemen kecil yang harus dikejar oleh negara. PDB tidak boleh menjadi tujuan. Ia hanya sarana yang bisa digunakan untuk membuat warga lebih sejahtera. Dengan PDB yang tinggi, aktivitas ekonomi negara bisa bergerak, lapangan pekerjaan tersedia, dan sebagainya. Tetapi tidak boleh menempatkan PDB menjadi tujuan sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat terabaikan.

Kesejahteraan membutuhkan kondisi objektif. Jika kondisi objektif ini tidak tersedia, kebahagiaan dan kesejahteraan warga tidak akan berhasil dicapai. Ada dua kondisi objektif.

Pertama, kualitas kehidupan. Warga hanya bisa sejahtera jika kualitas kehidupannya baik. Kualitas kehidupan ini meliputi 8 aspek. (a) Kesehatan. Warga hanya bisa sejahtera jika tidak sakit atau kalau sakit mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak ada orang yang bahagia ketika sedang sakit. (b) Pekerjaan dan keseimbangan hidup. Warga juga akan sejahtera ketika mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Selain pekerjaan, warga juga memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas untuk keseimbangan hidup (seperti liburan, melakukan hobi, dan sebagainya). (c) Pendidikan dan keterampilan. Kesejahteraan juga akan tercipta jika warga memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik. Lewat pendidikan, seseorang bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya yang membuat seseorang menjadi makin bahagia. (d) Koneksi sosial. Orang juga makin bahagia jika terhubung dengan orang lain. Hubungan-hubungan yang sifatnya personal membuat kehidupan seseorang makin berwarna dan membuat makin bahagia.

Kondisi objektif yang lain, adalah: (e) Keterlibatan sipil. Kesejahteraan juga membutuhkan syarat objektif berupa akses pada setiap orang untuk terlibat dalam masalah-masalah publik. Orang memiliki kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berorganisasi hingga menyampaikan kritik pada pemerintah. Kebebasan dalam menjalankan pilihan hidup dan mengekspresikan pendapat bisa

membuat orang makin sejahtera. (f) Kualitas lingkungan. Kesejahteraan juga membutuhkan kondisi lingkungan yang baik. Lingkungan yang asri, taman-taman di perkotaan misalnya, membuat orang makin bahagia. Kualitas lingkungan tempat tinggal memengaruhi kesehatan dan kemampuan untuk melakukan sejumlah kegiatan penting. (g) Keamanan personal. Agar bahagia dan sejahtera, orang juga harus terbebas dari rasa takut dan ancaman personal, seperti kriminalitas. Orang tidak takut untuk bepergian, keluar malam sendirian dan sebagainya. Makin tinggi kriminalitas dan ancaman (seperti terorisme, vandalisme, dan sebagainya) makin membuat orang tidak bahagia dan sejahtera. (h) Kesejahteraan individual. Kesejahteraan bisa dilihat dari bagaimana orang menilai kehidupannya dan merasakan persamaan senang, riang, dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, kondisi material. Kondisi lain yang dibutuhkan agar warga sejahtera adalah kondisi material. Termasuk dalam kondisi material ini di antaranya pendapatan, pekerjaan, dan rumah. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi sulit dibayangkan orang bisa bahagia jika tidak cukup memiliki uang. Hal yang sama adalah pekerjaan dan rumah. Sulit dibayangkan orang bisa sejahtera dan bahagia jika tidak memiliki pekerjaan dengan upah yang layak. Pendapatan dan kekayaan menangkap kemungkinan konsumsi orang saat ini dan masa depan. Ketersediaan pekerjaan penting untuk kesejahteraan materi, bukan hanya karena orang bisa meningkatkan penguasaan atas sumber daya, tetapi juga karena memiliki pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk memenuhi ambisi sendiri dan membangun harga diri. Aspek lain dari kondisi material adalah kepemilikan rumah. Orang yang memiliki rumah lebih cenderung sejahtera dibandingkan yang tidak memiliki rumah. Kepemilikan rumah sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk keamanan pribadi, privasi, dan ruang pribadi.

Model OECD ini juga menempatkan keberlanjutan (sustainabilitas) sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

Selain berorientasi pada kualitas hidup manusia, negara juga harus menjaga dan mengelola agar kesejahteraan bisa berumur panjang. Negara pada dasarnya memiliki modal (kapital) yang harus dikelola dan dikembangkan dalam menjamin kesejahteraan yang berumur panjang. Ada 4 modal penting yang harus dikelola dalam menjaga sustainabilitas, yakni modal sumber daya alam (natural), ekonomi, sosial, hingga sumber daya manusia. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada masa saat ini, tetapi juga berorientasi pada masa depan.
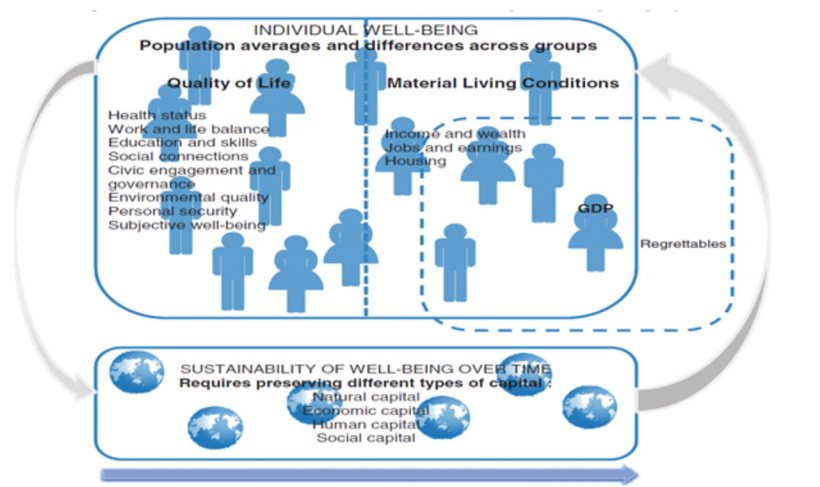
Gambar 4.1. Model OECD

Sumber: OECD (2011)

Model OECD tidak hanya merekomendasikan jalan suatu negara dalam menciptakan kesejahteraan warganya, tetapi juga rekomendasi untuk menilai kemajuan suatu negara. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan negara, tidak cukup hanya dengan menghitung Produk Domestik Bruto. Pengukuran kesejahteraan warga melibatkan ukuran subjektif dan objektif sekaligus. Pengukuran subjektif melibatkan survei dengan menanyakan kepada warga kondisi kehidupan mereka,

apakah mereka puas dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sementara pengukuran objektif dilakukan dengan menghitung sejauh mana pemenuhan aspek-aspek dasar (seperti pendidikan, kesehatan, kontak sosial, dan sebagainya). Antara ukuran subjektif dan objektif saling berhubungan. Tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan (subjektif) dipengaruhi oleh faktor objektif berupa terpenuhinya kesejahteraan subjektif seseorang. Ilustrasi pengukuran kesejahteraan warga bisa dilihat dalam gambar berikut.

Seperti terlihat dalam gambar, untuk mengukur derajat kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang, dilakukan dengan meminta warga memberikan penilaian atas kehidupan mereka. Ada tiga dimensi penilaian atas kebahagiaan, yakni: kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Dimensi kepuasan hidup berkaitan dengan sejauh mana seseorang puas dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dimensi perasaan mengukur emosi berupa senang, tidak khawatir/cemas, dan tidak tertekan. Sementara dimensi makna hidup mencakup kemandirian (kebebasan dalam menentukan diri), pengembangan diri (keinginan untuk selalu mengembangkan potensi yang dimilikinya), serta makna dari waktu ke waktu (mampu mengatasi tekanan sosial ketika berpikir) dan tujuan hidup (cita-cita yang dimiliki tentang masa depan yang membuat seseorang merasa hidup yang dijalani memiliki makna).
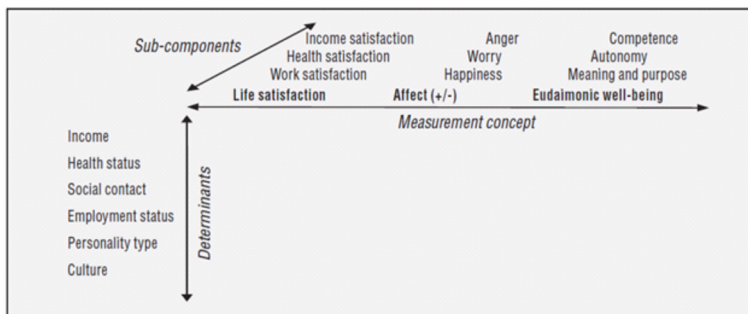
Gambar 4.2. Pengukuran Model OECD
Sumber: OECD (2013)

MODEL HALL

Model lain yang banyak digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara adalah model yang dibuat oleh Hall (et. al, 2010). Model ini menggambarkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan sosial dan ekosistem (lingkungan). Gambar berikut ini memperlihatkan kerangka dari model kesejahteraan. Seperti terlihat dalam gambar, masyarakat terdiri dari dua sistem, yakni sistem manusia dan ekosistem. Dua sistem ini terhubung lewat manajemen sumber daya dan layanan ekosistem. Jika hubungan di antara dua sistem yang terbentuk adalah "manajemen sumber daya" (*resources management*), maka yang terjadi adalah proses satu arah, di mana sistem manusia mengeksploitasi ekosistem. Lingkungan hanya ditempatkan sebagai objek yang digunakan untuk kepentingan sistem manusia. Sementara jika hubungan yang terjadi adalah "layanan ekosistem" (*ecosystem services*) maka terdapat hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Manusia bisa menggunakan alam, sebaliknya alam juga diuntungkan lewat kegiatan konservasi, penghutanan kembali, penyediaan makanan dan air untuk hewan liar dan sebagainya. Hubungan berbentuk "layanan ekosistem" mengarah kepada hubungan yang berkelanjutan. Ekosistem tidak untuk dimanfaatkan dan dihabiskan untuk generasi saat ini, tetapi dirawat untuk keberlanjutan generasi yang akan datang,
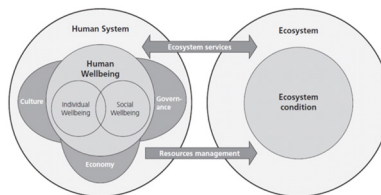
Gambar 4.3. Model Hall
Sumber: Hall (et.al, 2010)

Dalam model ini, kesejahteraan manusia (*human wellbeing*) menjadi tujuan utama. Kesejahteraan manusia terdiri atas kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu dicirikan oleh kesejahteraan dari masing-masing orang. Setiap orang bisa memiliki standar dan kebahagiaan masing-masing. Misalnya kekayaan, kebebasan, pengetahuan, dan sebagainya. Atribut kesejahteraan ini bisa spesifik untuk setiap orang. Masing-masing orang juga bisa mengejar kesejahteraan masing-masing. Sementara kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang terbangun lewat koneksi antara satu individu dengan individu yang lain. Atribut dari kesejahteraan sosial ini di antaranya tingkat dan kualitas hubungan dengan orang lain atau bagaimana kohesivitas dan rasa damai dalam komunitas.

Kesejahteraan manusia didukung oleh tiga ranah: ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Tiga ranah ini bisa disebut sebagai pilar pendukung utama bagi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia hanya bisa terbangun jika tiga ranah ini tercapai.

Pertama, ekonomi. Kesejahteraan hanya bisa terwujud jika memiliki ekonomi yang baik. Ini terjadi baik pada level individu ataupun sosial. Individu hanya bisa sejahtera jika memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat juga hanya akan sejahtera jika memiliki sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama (misalnya layanan sosial).

Kedua, tata kelola pemerintahan. Kesejahteraan juga hanya bisa terwujud jika lingkungan sosial dikelola melalui tata kelola yang baik. Pejabat publik tidak korup, dan bekerja benar-benar untuk melayani rakyat.

Ketiga, budaya. Kesejahteraan juga lebih mungkin terwujud jika terdapat budaya yang mendukung, seperti warga yang saling membantu, kolektivitas, mempunyai rasa menolong sesame yang tinggi, saling percaya di antara warga, dan seterusnya. Tiga aspek atau ranah ini adalah kondisi objektif sebagai prasyarat terjadinya kesejahteraan.

Memiliki ekonomi yang kuat, tata kelola yang efektif, dan budaya yang dinamis bukanlah kesejahteraan itu sendiri, tetapi faktor-faktor ini menyediakan lingkungan yang mendukung di mana kesejahteraan manusia akan terbentuk.

Ekosistem hanya memiliki satu domain (kondisi ekosistem) yang mewakili kesejahteraan

ekosistem. Hubungan antara kesejahteraan manusia dan ekosistem menunjukkan kesejahteraan yang berkelanjutan ataukah tidak. Jika manusia sejahtera dan ekosistem juga sejahtera, akan terbentuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Hall (et.al, 2010) bukan hanya menunjukkan bagaimana kesejahteraan dibangun, tetapi juga menawarkan bagaimana kemajuan suatu negara seharusnya diukur. Kemajuan suatu negara tidak boleh hanya diukur melalui Produk Domestic Bruto. Sebaliknya, kemajuan harusnya menangkap kesejahteraan manusia. Jika model ini digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara, maka ada dua bagian yang harus diukur secara bersama-sama. Pertama, kondisi ekosistem. Ini bisa diukur melalui kualitas lingkungan yang terdiri dari: daratan (geosfer), air tawar, samudra, dan laut (hidrosfer), keanekaragaman hayati (biosfer), udara (atmosfer). Kedua, kesejahteraan manusia. Kondisi kesejahteraan bisa diukur dari kesehatan fisik dan mental, pengetahuan dan pemahaman, pekerjaan, kesejahteraan materi, kebebasan dan penentuan nasib sendiri, dan koneksi sosial.

Kesejahteraan manusia ini hanya bisa terbentuk lewat kondisi objektif. Tiga kondisi objektif masing-masing bisa diukur. Kualitas ekonomi bisa diukur menggunakan indikator seperti: pendapatan nasional, kekayaan nasional. Tata kelola pemerintahan bisa diukur melalui indikator: pemenuhan hak asasi manusia, keterlibatan sipil dan politik, keamanan dan kekerasan, rasa saling percaya hingga akses ke layanan sosial. Sementara budaya diukur melalui indikator: warisan budaya, seni, dan rekreasi.

MODEL NEF

Model lain yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan adalah model yang dibangun oleh NEF (*New Economic Foundations*), sebuah lembaga penelitian dan think-tank asal Inggris. Sama dengan model Hall (et.al) dan OECD, model ini juga menempatkan Produk Domestik Bruto hanyalah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, dan bukan kesejahteraan itu sendiri.

Gambar berikut ini menyajikan kerangka kerja untuk memahami kemajuan masyarakat. Tujuan masyarakat dicapai melalui berbagai sistem manusia, yang bergantung pada penggunaan sumber daya. Masyarakat yang berkelanjutan adalah masyarakat yang mencapai tujuannya tanpa menghabiskan sumber dayanya. Masing-masing bidang pada Gambar 1 ini dapat (dan harus) diukur untuk menentukan keberhasilan nasional. Masyarakat bergantung pada banyak sumber daya untuk mencapai tujuan, karena itu sifat sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan menjadi perhatian utama. Manusia dapat memperbaiki bangunan yang rusak, tidak dapat mengisi kerak bumi dengan minyak mentah, atau (dengan mudah) mengekstraksi CO2 dari atmosfer untuk menurunkan pemanasan global. Di bidang kanan atas (tujuan) adalah kesejahteraan manusia. Ada banyak tujuan akhir yang penting seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Namun, semua orang umumnya memiliki keinginan untuk berkembang dalam kehidupannya sendiri. Di lingkungan tengah (sistem manusia) adalah proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan menengah yang sangat penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang tinggi.
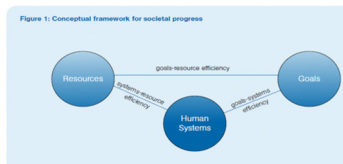
Gambar 4.4. Model NEF
Sumber: NEF (2011)

NEF mendefinisikan kesejahteraan (*wellbeing*) sebagai perasaan individu dan bagaimana individu berfungsi, baik pada tingkat pribadi maupun sosial, dan bagaimana mereka mengevaluasi kehidupan mereka secara keseluruhan. Perasaan mengacu pada emosi seperti kebahagiaan atau kecemasan. Bagaimana individu berfungsi mengacu pada hal-hal seperti rasa kompetensi atau perasaan terhubung dengan orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana orang mengevaluasi hidup mereka secara keseluruhan ditangkap dalam kepuasan mereka dengan hidup mereka, atau bagaimana mereka menilai hidup mereka. Orang dengan kesejahteraan tinggi adalah jika kapasitas mereka berfungsi dengan baik, memiliki perasaan positif sehari-hari dan secara keseluruhan kehidupan mereka berjalan dengan baik. Kesejahteraan dikenal juga dengan "berkembang" (*flourishing*).

Kesejahteraan mengacu pada bagaimana manusia berada dalam diri mereka sendiri--emosi, penilaian, dan pengalaman mereka. Dalam model NEF, kesejahteraan terbangun lewat dua faktor yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yakni internal dan eksternal. Faktor pembentuk kesejahteraan ini adalah hal-hal yang membantu mendorong terpenuhinya kesejahteraan. Faktor internal yang memengaruhi kesejahteraan adalah kesehatan, optimisme dan harga diri. Sementara faktor eksternal adalah pendapatan, perumahan, pendidikan, dan jaringan sosial. Dalam model yang dibuat oleh NEF, kondisi eksternal individu (kiri bawah)–seperti pendapatan, status pekerjaan, dan jaringan sosial–bertindak bersama dengan sumber daya pribadi mereka (seperti kesehatan, ketahanan, dan optimisme mereka) untuk memungkinkan individu bisa berfungsi dengan baik (tengah) dalam interaksi mereka dengan dunia, dan karenanya mengalami emosi positif (atas). Ketika seorang individu berfungsi dengan baik dan mengalami emosi positif sehari-hari, kita dapat menyebut individu tersebut "berkembang " (*flourishing*).
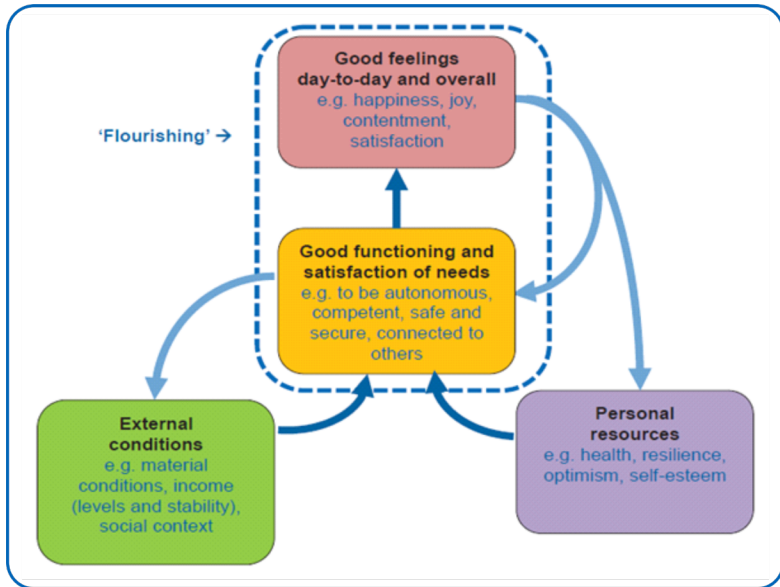
Gambar 4.5. Pengukuran Model NEF

Sumber: NEF (2012)

Model NEF ini bersifat dinamis. Kotak kondisi eksternal menggambarkan kondisi sosial dan material dari kehidupan masyarakat atau kondisi objektif dari kesejahteraan. Sementara kotak sumber daya pribadi menggambarkan bahwa setiap orang mungkin memiliki keragaman kepribadian, pandangan, kekuatan karakter, kecerdasan, keterampilan, dan sebagainya, serta dalam hal anugerah fisik. Ini dianggap sebagai karakteristik orang yang relatif stabil. Manusia dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhannya bergantung pada interaksi antara individu itu sendiri dan kondisinya. Dengan kata lain, kondisi yang sama dapat menyebabkan satu individu berkembang sementara yang lain tidak bahagia.

V. Tingkat Kebahagiaan Negara di Dunia

Sejak tahun 2000-an, telah muncul berbagai alternatif pengukuran kemajuan negara. Alternatif pengukuran yang baru ini menitikberatkan pada subjek manusia. Salah satu alternatif tersebut adalah indeks kebahagiaan yang dibuat oleh *UN Sustainable Development Solutions Network* (SDSN). Sejarah lahirnya indeks ini bermula pada bulan Juli 2011, saat Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 65/309 mengenai Definisi Pembangunan yang Menyeluruh. Resolusi tersebut meminta negara-negara di dunia untuk mengukur kebahagiaan warganya, di mana data tersebut bisa digunakan untuk memandu pembuatan kebijakan publik. Resolusi tersebut kemudian diikuti oleh Pertemuan Tingkat Tinggi PBB yang pertama bertajuk Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Mendefinisikan Paradigma Ekonomi Baru pada tanggal 2 April 2012. Pertemuan tersebut diketuai oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Perdana Menteri Jigmi Thinley dari Bhutan, sebuah bangsa yang mengadopsi *Kebahagiaan Nasional Bruto* alih-alih *Produk Domestik Bruto* sebagai indikator pembangunan utama mereka.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, disusun sebuah indeks yang menggambarkan kondisi dan kemajuan kebahagiaan warga suatu negara. Pengukuran indeks ini dilakukan oleh *UN Sustainable Development Solutions Network* (SDSN). Para ahli yang terlibat dalam pengukuran tersebut di antaranya adalah John F. Helliwell (Vancouver

School of Economics, University of British Columbia); Richard Layard (Wellbeing Programme, Centre for Economic Performance, London School), dan Jeffrey D. Sachs (Director of the Center for Sustainable Development at Columbia University of Economics and Political Science). Setiap tahun, SDSN menghasilkan laporan mengenai indeks kebahagiaan dan ranking kondisi kebahagiaan dari 137 negara di dunia.

BAGAIMANA KEBAHAGIAAN DIUKUR?

Mengukur kebahagiaan tentu berbeda dengan mengukur PDB per kapita atau IPM. Hal ini karena kebahagiaan melibatkan emosi, perasaan, dan penilaian subjektif dari warga mengenai kondisi negaranya. Kebahagiaan tidak identik dengan kekayaan atau jumlah uang, karena ada orang yang mempunyai uang tetapi tidak bahagia. Cara terbaik untuk mengetahui kebahagiaan seseorang adalah dengan menanyakan secara langsung kepada individu apakah diri mereka saat ini bahagia atau tidak. Hal yang sama juga ketika mengukur kebahagiaan suatu negara. Untuk mengetahui level kebahagiaan negara, cara terbaik adalah dengan menanyakan secara langsung kepada warga: apakah mereka bahagia atau tidak.

SDSN mengukur derajat kebahagiaan warga di setiap negara dengan menggunakan tiga indikator: evaluasi kehidupan, emosi positif, dan emosi negatif. SDSN menggunakan data survei Gallup yang secara rutin membuat survei di 137 negara di dunia, dengan sampel masing-masing negara rata-rata 1.000 responden. Indikator evaluasi kehidupan menjadi indikator utama pengukuran kebahagiaan. Gallup meminta responden untuk mengevaluasi kehidupan mereka saat ini secara keseluruhan dengan menggunakan gambar tangga, dengan kemungkinan skor 10 untuk kehidupan yang paling baik dan skor 0 untuk kehidupan yang paling buruk. Indikator emosi positif diukur dengan meminta responden memberikan penilaian (menjawab ya atau tidak) kondisi emosi saat ini yang terdiri dari

tiga emosi: tawa, kesenangan, dan minat. Sementara emosi negatif dihitung dengan meminta responden menilai emosi mereka saat ini atas tiga emosi negatif, yakni khawatir, sedih, dan marah. Hasil dari survei ini kemudian diberikan bobot sesuai dengan proporsi populasi masing-masing negara. Hasil skor mencerminkan kondisi kebahagiaan suatu negara.

SDSN kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kebahagiaan suatu negara. Model yang dibuat oleh SDSN mengidentifikasi 6 faktor yang menjadi penjelas tingkat kebahagiaan negara. Pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi jumlah jumlah produk nasional bruto dengan jumlah penduduk. Variabel ini mencerminkan kekayaan suatu negara. Negara yang kaya lebih mempunyai kemungkinan membuat warganya bahagia dibandingkan dengan negara yang miskin. Negara dengan tingkat kesejahteraan yang rendah sulit membuat warganya bahagia karena warga harus bergulat untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari. SDSN menggunakan data Bank Dunia yang secara rutin menghitung pendapatan per kapita setiap negara di dunia.
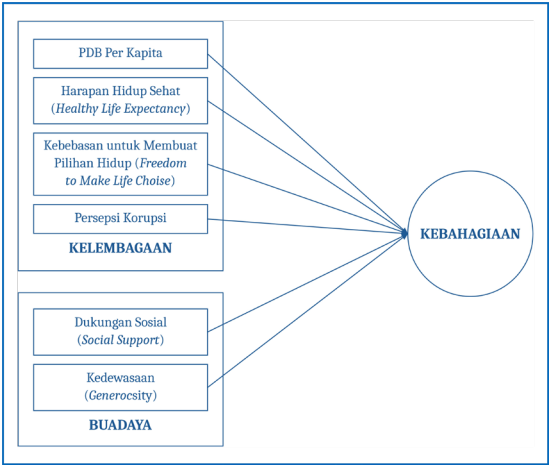
Gambar 5.1. Pengukuran Indeks Kebahagiaan

Kedua, harapan hidup sehat (*healthy life expectancy*). Variabel ini mengacu kepada jumlah rata-rata tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup dalam kesehatan penuh (tidak menderita penyakit). Angka harapan hidup sehat harus dibedakan dengan harapan hidup. Harapan hidup mengukur rata-rata umur warga dalam populasi (misalnya negara), sementara harapan hidup sehat mengukur jumlah rata-rata tahun warga hidup sehat (tidak sakit atau dirawat di rumah sakit). Variabel ini mencerminkan kualitas kesehatan suatu negara. Semakin tinggi harapan hidup sehat, semakin baik negara dalam memberikan layanan kesehatan. Negara memberikan tindakan preventif agar orang tidak sakit, dan kalau sakit memberikan layanan kesehatan yang baik sehingga bisa cepat sembuh. Dalam model SDSN, tingkat harapan hidup sehat mempunyai pengaruh dalam menentukan kebahagiaan warga di suatu negara. Orang yang sehat cenderung akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang sakit. Negara yang bisa menjamin kesehatan warganya akan lebih punya kemungkinan membuat warganya bahagia dibandingkan dengan negara yang tidak memberikan layanan kesehatan yang baik. Data mengenai angka harapan hidup sehat diperoleh SDSN dari data badan kesehatan dunia (WHO).

Ketiga, kebebasan untuk membuat pilihan hidup. Orang yang bahagia adalah orang yang bebas dalam menentukan hidupnya dan bisa mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan. Semakin terkekang seseorang, akan semakin tidak bahagia. Sebaliknya, semakin bebas seseorang dalam membuat pilihan-pilihan hidup, akan semakin bahagia. Pada tingkat negara, variabel ini berkaitan dengan derajat demokrasi suatu negara. Negara yang bisa menjamin dan melindungi warga untuk membuat pilihan hidup secara bebas (seperti kebebasan memeluk agama dan keyakinan, organisasi, kebebasan berpendapat, hingga orientasi seksual) akan memiliki kecenderungan untuk bisa membuat warganya bahagia. Skor derajat kebebasan untuk membuat pilihan hidup ini diperoleh oleh SDSN dengan memanfaatkan data dari Gallup.

Gallup mengukur variabel ini lewat pertanyaan apakah responden puas atau tidak puas dengan kebebasan untuk memilih apa yang dilakukan.

Keempat, persepsi korupsi. Kebahagiaan seseorang ditentukan oleh lingkungan di mana seseorang tinggal. Orang bisa lebih bahagia jika tinggal di suatu wilayah yang dikelola dengan baik, yang menjamin segala kebutuhan dirinya terjamin. Lingkungan yang baik membuat orang mendapat perlakuan yang sama dan kesetaraan di depan hukum yang pada gilirannya akan membuat orang menjadi lebih bahagia. Dalam konteks negara, negara dengan kelembagaan dan birokrasi yang baik lebih mungkin menjamin kebahagiaan warganya. Kelembagaan negara yang baik, menjamin warga bisa dilayani dengan baik, memperoleh kepastian hukum, dan sebagainya. Sebaliknya, negara dengan pengelolaan yang buruk membuat warga merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, tidak dilayani dengan semestinya, dan sebagainya. SDSN mengukur tingkat kelembagaan ini melalui variabel persepsi korupsi. Variabel ini diukur menggunakan dua indikator, di mana responden ditanya persepsinya tentang pemerintahan dan bisnis: Apakah menurut responden, korupsi terbesar luas ataukah tidak di pemerintahan dan bisnis. Persepsi korupsi dipilih untuk menggambarkan sejauh mana negara melayani warganya dengan baik, yang diprediksi bisa menentukan kebahagiaan warga negara. Data mengenai persepsi korupsi ini didapatkan oleh SDSN dari survei Gallup Poll.

Kelima, dukungan sosial. Orang akan lebih bahagia jika hidup di sebuah wilayah di mana warganya saling percaya dan saling tolong menolong. Di lingkungan seperti ini, orang tidak merasa curiga dengan orang lain, tidak mudah marah, yang pada akhirnya menentukan kebahagiaan seseorang. Lingkungan yang baik juga membuat setiap orang merasa percaya bahwa orang tidak sendirian. Akan ada orang yang menolong jika dirinya mendapat kesulitan hidup. Pada level negara, di mana warganya mempunyai rasa percaya yang kuat di antara sesama warga negara dan dukungan sosial yang tinggi, cenderung akan membuat warganya bahagia. Sebaliknya, negara yang warganya saling curiga dan

tidak memiliki dukungan sosial yang tinggi, akan cenderung membuat warga tidak bahagia. SDSN memanfaatkan hasil survei Gallup Poll. Gallup mengukur variabel ini melalui pertanyaan yang menanyakan persepsi responden: apakah jika berada dalam masalah, dirinya memiliki kerabat atau teman yang dapat diandalkan untuk membantunya.

Keenam, kedermawanan sosial. Kebahagiaan juga dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang bisa berbuat sesuatu yang bermakna, seperti menolong orang lain. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh motivasi untuk menolong sesama, cenderung akan membuat dirinya bermakna, yang pada gilirannya akan memengaruhi kebahagiaan. Dalam indeks kebahagiaan yang dibuat oleh SDSN, makna hidup ini diturunkan ke dalam variabel kedermawanan sosial. Variabel ini diukur lewat pertanyaan, apakah warga di suatu negara pernah atau tidak pernah mendonasikan uang untuk amal dalam sebulan terakhir. Data mengenai kedermawanan sosial ini juga diperoleh oleh SDSN dari survei Gallup Poll.

Jika ditelusuri lebih lanjut, enam variabel yang digunakan untuk menjelaskan derajat kebahagiaan suatu negara (pendapatan per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan untuk membuat pilihan hidup, persepsi korupsi, dukungan sosial, dan kedermawanan sosial) memiliki kesejajaran dengan kebahagiaan di tingkat individu. Seperti dijelaskan dalam Bab II, studi-studi mengenai kebahagiaan menemukan ada lima variabel utama yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu. Pertama, emosi yang positif. Variabel ini mirip dengan variabel evaluasi kehidupan yang digunakan dalam indeks kebahagiaan. Kedua, keterlibatan (*engagement*). Variabel ini bisa disejajarkan dengan variabel kebebasan untuk membuat pilihan hidup dalam pengukuran indeks kebahagiaan. Ketiga, relasi sosial. Variabel ini sama dengan variabel dukungan sosial pada indeks kebahagiaan. Keempat, makna hidup. Ini mirip dengan variabel kedermawanan sosial pada indeks kebahagiaan. Kelima, prestasi atau pencapaian. Pada level negara, pencapaian ini bisa disejajarkan dengan variabel pendapatan per kapita pada indeks kebahagiaan.
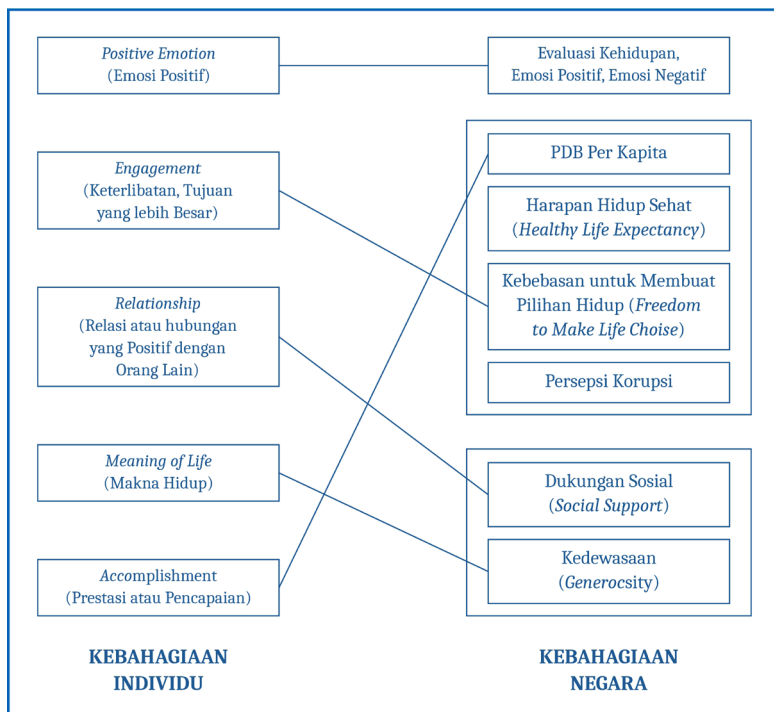
Gambar 5.2. Hubungan Indeks Kebahagiaan Individu dan Negara

Gambar grafik berikut ini menyajikan hasil indeks kebahagiaan tahun 2023. Grafik ini memperlihatkan skor dan ranking indeks kebebasan negara di dunia (ranking 1 hingga 137). Pada tahun 2023, 10 negara dengan indeks tertinggi berturut-turut adalah: Finlandia, Denmark, Islandia, Israel, Belanda, Swedia, Norwegia, Swiss, Luksemburg, dan Selandia Baru. Grafik ini juga memperlihatkan kontribusi dari 6 variabel (pendapatan per kapita, harapan hidup sehat, kebebasan untuk membuat pilihan hidup, persepsi korupsi, dukungan sosial, dan kedermawanan sosial) dalam membentuk indeks kebahagiaan suatu negara. Negara Luksemburg, Irlandia, Singapura dan Bahrain: tingkat kebahagiaannya banyak disumbang oleh variabel

pendapatan per kapita. Sementara negara-negara seperti Finlandia, Denmark dan Islandia, tingkat kebahagiaannya banyak disumbang oleh dukungan sosial. Dan seterusnya.
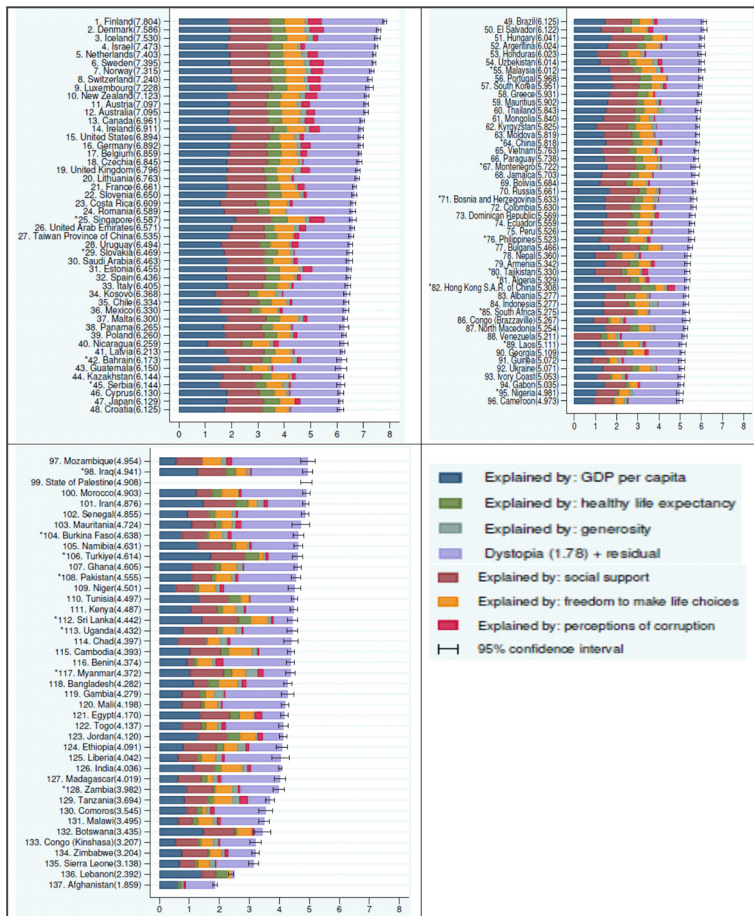
Gambar 5.3. Hasil Indeks Kebahagiaan 2023

Sumber: Helliwell (et.al, 2023)

MENGAPA NEGARA SKANDINAVIA?

Pengukuran indeks kebahagiaan sudah dilakukan sejak tahun 2012. Kecuali tahun 2014, indeks ini dibuat rutin tiap tahun. Tabel menyajikan ranking indeks kebahagiaan dari beberapa negara. Apa yang menarik dari data ini? Posisi 10 besar, selalu diisi oleh negara-negara Nordik/Skandinavia, yakni Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, dan Norwegia. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023, negara-negara Skandinavia menempati posisi 3 besar negara paling bahagia di dunia.

Tabel 5.1. Hasil Indeks Kebahagiaan 2012-2023

NEGARA	RANKING TAHUN										
	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finlandia	2	7	6	5	5	1	1	1	1	1	1
Denmark	1	1	3	1	2	3	2	2	2	2	2
Islandia	20	9	2	3	3	4	4	4	4	3	3
Swiss	6	3	1	2	4	5	6	3	3	4	8
Norwegia	3	2	4	4	1	2	3	5	6	8	7
Swedia	7	5	8	10	9	9	7	7	7	7	6
Belanda	4	4	7	7	6	6	5	6	5	5	5
Luksemburg	16	19	17	20	18	17	14	10	8	6	9
Israel	14	11	11	11	11	19	13	14	12	9	4
Kanada	5	6	5	6	7	7	9	11	14	15	13
Selandia Baru	8	13	9	8	8	8	8	8	9	10	10
Australia	9	10	10	9	10	10	11	12	11	12	12
Austria	13	8	13	12	13	12	10	12	10	11	11
Jerman	30	26	26	16	16	15	17	17	13	14	16
Amerika Serikat	11	17	15	13	14	18	19	18	19	16	15
Irlandia	10	18	18	19	15	14	16	16	15	13	14
Belgium	15	21	19	18	17	16	18	20	20	19	17
Inggris	18	22	21	23	19	11	15	13	17	17	19
Kosta Rika	12	12	12	14	12	13	12	15	16	23	23
Prancis	23	25	29	32	31	23	24	23	21	20	21
Singapura	33	30	24	22	26	34	34	31	32	27	25
Uni Emirat Arab	17	14	20	28	21	20	21	21	25	24	26
Meksiko	24	16	14	21	25	24	23	24	36	46	36
Italia	28	45	50	50	48	47	36	30	28	31	33
Rusia	73	68	64	56	49	59	68	73	76	80	47
Jepang	44	43	46	53	51	54	58	62	56	54	47
Brazil	25	24	16	17	22	28	32	32	35	38	49
China	109	93	84	83	79	86	93	94	84	72	64
Indonesia	80	76	74	79	81	96	92	84	82	87	84

Sumber: diolah dari World Happiness Report, berbagai nomor penerbitan

Warga yang ada di negara Skandinavia (Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, dan Norwegia) memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi. Gambar berikut ini memperlihatkan grafik tingkat kebahagiaan warga di negara-negara di Skandinavia. Ketika warga diminta untuk menilai atau mengevaluasi kehidupan mereka (dari skor 0 sangat buruk hingga 10 sangat baik), warga di Skandinavia rata-rata memberikan skor sekitar 7.8. Warga yang tinggal di negara Skandinavia merasa hidupnya bahagia.
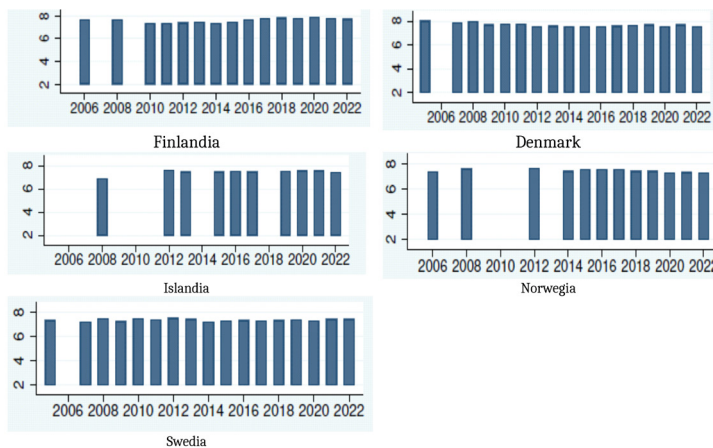
Gambar 5.4. Hasil Indeks Kebahagiaan Negara Skandinavia
Sumber: Helliwell (et.al, 2023)

Tentu bukan kebetulan jika indeks ini menempatkan negara-negara Skandinavia berada di urutan atas. Pertanyaan yang muncul, mengapa warga di Skandinavia mempunyai tingkat kebahagiaan yang tinggi? Apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut sehingga warganya bahagia? Para ahli telah membuat penelitian dan analisis untuk menemukan faktor-faktor yang membuat kebahagiaan warga di Skandinavia tinggi. Disarikan dari studi yang dilakukan oleh Pacek & Radcliff (2008), Inglehart (et.al, 2008) , Samuel & Hadjar (2016) dan Martela (et.al, 2020), setidaknya ada 5 penjelas mengapa kebahagiaan warga di Skandinavia tinggi.

Kemurahan Hati Negara Kesejahteraan

Semua negara Skandinavia, mempraktikkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan ini ditandai oleh ciri utama yakni berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, Negara kesejahteraan melayani semua kebutuhan masyarakat, dicirikan oleh adanya tunjangan atau asuransi (umumnya gratis) untuk pendidikan, kesehatan, pensiun, hingga asuransi pengangguran. Untuk memenuhi pembiayaan, negara kesejahteraan menerapkan pajak yang tinggi pada warganya. Pajak itu kemudian didistribusikan dalam bentuk penyediaan sarana, fasilitas, dan layanan sosial yang luas kepada masyarakat. Karena semua negara Skandinavia mempraktikkan sistem negara kesejahteraan, akan mudah untuk menyimpulkan bahwa tingkat kebahagiaan warga ini berhubungan langsung dengan sistem negara kesejahteraan yang diterapkan.

Studi yang dilakukan oleh Pacek & Radcliff (2008) membuktikan dugaan tersebut. Mereka melakukan studi longitudinal terhadap 18 negara industri dari tahun 1971-2002. Mereka menganalisis bagaimana bentuk negara kesejahteraan (diidentifikasi melalui indeks pensiun, jaminan sosial bagi orang sakit atau cacat, dan tunjangan pengangguran) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan hidup. Menurut Martela (et.al, 2020), kunci kebahagiaan negara Skandinavia adalah kerangka kelembagaan negara kesejahteraan. Di negara-negara tersebut, setiap orang memiliki akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan sosial secara mudah dan murah (gratis). Negara kesejahteraan juga mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan, untuk menghindari eksploitasi pekerja. Ini semua memberikan dampak pada tingkat kebahagiaan warga.

Kualitas Kelembagaan

Sejumlah studi menunjukkan ada hubungan yang kuat antara kebahagiaan warga dengan kualitas kelembagaan di suatu negara. Warga umumnya lebih bahagia tinggal di negara dengan kualitas kelembagaan yang baik. Kualitas demokrasi umumnya diukur lewat dua hal, yakni

pelaksanaan demokrasi dan kualitas kelembagaan (Martela, et.al, 2020). Pelaksanaan demokrasi ditunjukkan oleh jaminan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan stabilitas politik. Sementara kualitas kelembagaan ditandai oleh adanya supremasi hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan efektivitas pemerintahan. Banyak negara di dunia yang berhasil menjalankan demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Hanya saja, sedikit negara yang berhasil menjalankan pemerintahan melalui kualitas kelembagaan yang baik.

Negara-negara dengan tingkat kualitas pemerintahan yang baik (adanya supremasi hukum, birokrasi yang melayani dan pengendalian korupsi) cenderung akan membuat warganya bahagia. Studi yang dilakukan oleh Helliwell (et al, 2008; 2016.) membuktikan dugaan tersebut. Mereka mengkaji kualitas pemerintahan di 157 negara selama tahun 2005-2012 dan menemukan kualitas pemerintah mempunyai korelasi dengan kebahagiaan warga. Negara-negara di Skandinavia adalah contoh dari negara yang berhasil membangun kelembagaan dan pemerintahan yang baik. Negara-negara di Skandinavia bukan hanya menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan adanya pemilihan yang adil dan bebas. Lebih jauh mereka berhasil mengembangkan kualitas pemerintahan yang baik. Ini ditandai oleh korupsi yang hampir tidak ada, adanya jaminan dan supremasi hukum, dan perlakuan yang sama pada semua warga negara.

Mengapa kualitas pemerintahan di suatu negara bisa membuat warga menjadi bahagia? Ini tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan pada institusi politik (*political trust*). Negara dengan pemerintahan dan kelembagaan yang baik membuat warga percaya kepada lembaga negara. Kualitas pemerintahan yang baik memberikan jaminan kepada warga bahwa hidup mereka telah berada di tangan orang tepat. Ketika pemerintah membuat kebijakan (misalnya kenaikan pajak), warga percaya bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik dan percaya bahwa setiap warga negara akan mendapatkan perlakukan

yang sama. Hal yang berseberangan terjadi di negara dengan kualitas pemerintahan yang buruk--seperti birokrasi yang menyulitkan dan korupsi yang tinggi. Di negara-negara ini, warga selalu curiga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas pemerintahan ini pada akhirnya menentukan tingkat kebahagiaan warga negara.

Rendahnya Ketimpangan

Penjelas lain yang penting mengapa warga di negara Skandinavia memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi adalah fakta rendahnya ketimpangan di negara-negara tersebut (lihat Martela, et.al, 2020). Jarak antara warga yang kaya dengan miskin relatif rendah. Rendahnya ketimpangan di negara Skandinavia diakibatkan salah satunya karena pajak progresif. Warga yang berpenghasilan tinggi akan mendapatkan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang berpenghasilan rendah. Kebijakan ini lambat laun menciptakan kesenjangan yang rendah di antara warganya.

Mengapa rendahnya ketimpangan berdampak pada tingkat kebahagiaan warga? Ini tidak bisa dilepaskan dari perasaan keadilan di antara warga. Negara dengan tingkat kesenjangan tinggi akan mengarah pada rendahnya perasaan dan perlakuan tidak adil, tingkat kecemasan yang tinggi serta kurangnya peluang ekonomi dan sosial (Martela, et.al, 2020). Warga selalu merasa bersaing dan terancam, yang mengakibatkan perasaan cemas terus menerus. Hal ini berbeda dengan negara dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Di negara ini, kecemasan warga menjadi berkurang, peluang ekonomi dirasakan lebih terbuka bagi siapa saja, dan adanya persepsi mengenai rasa keadilan yang berkembang luas di masyarakat. Kondisi ini akan berdampak pada perasaan nyaman dan bahagia warganya.

Kebebasan Menentukan Pilihan Hidup

Faktor lain yang menjadi penjelas mengapa warga di negara Skandinavia lebih bahagia adalah karena mereka memiliki kebebasan

dalam menentukan pilihan hidup. Negara memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihan hidup mereka, mulai dari kebebasan memilih agama dan keyakinan, hingga orientasi seksual. Warga bisa melakukan apa saja keinginannya sepanjang tidak melanggar aturan dan hukum. Studi yang dilakukan oleh Inglehart (et.al, 2008) menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kebahagiaan dengan persepsi mengenai kebebasan dalam menentukan pilihan hidup.

Menurut Inglehart (dikutip dari Martela, et.al, 2020), kunci kebahagiaan negara-negara di Skandinavia terletak pada tiga faktor yang saling melengkapi, yaini kemakmuran materi yang membebaskan orang dari kelangkaan, institusi politik demokratis yang membebaskan orang dari penindasan politik, dan nilai-nilai budaya yang lebih toleran dan liberal yang memberi orang lebih banyak ruang untuk mengekspresikan diri dan identitas unik mereka. Negara-negara Nordik merupakan contoh utama modernisasi yang berhasil memaksimalkan kemakmuran, solidaritas sosial, serta kebebasan politik dan pribadi. Banyak negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita tinggi, tetapi tidak membuat warganya bahagia karena tidak memberi kebebasan warga untuk menentukan pilihan hidupnya.

Kohesi Sosial

Warga di Skandinavia juga terkenal memiliki kepercayaan sosial yang tinggi (Martela, et.al, 2020). Cerita yang sering muncul: jika kita mengendarai sepeda ke suatu tempat, kita tidak khawatir akan kehilangan sepeda. Bahkan tanpa dikunci sekalipun, tidak ada yang mencuri. Jika kita kehilangan sesuatu (seperti dompet) di jalan, dalam beberapa hari dompet akan kembali ke kita lengkap dengan isinya. Kondisi seperti ini hanya mungkin dicapai oleh negara-negara dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Warganya saling percaya, tidak saling mencurigai satu sama lain. Selain itu, negara Skandinavia juga dikenal mempunyai solidaritas yang tinggi. Warganya suka menolong, jika ada warga yang kesulitan.

Kepercayaan dan solidaritas sosial memiliki hubungan dengan kebahagiaan warga negara. Studi yang dilakukan oleh Delhey & Dragolov (2016) membuktikan hubungan tersebut. Mereka membagi kohesi sosial ke dalam tiga dimensi, yakni keterhubungan dengan orang lain, memiliki hubungan sosial yang baik, dan memiliki fokus pada kebaikan bersama. Mereka mengkaji sampel 27 negara Eropa. Hasil studinya memperlihatkan adanya korelasi antara kohesi sosial dengan kebahagiaan, baik ketika dilihat secara agregat (dari 3 indikator) ataupun dikaitkan untuk masing-masing indikator. Studi tersebut juga mengkonfirmasi, bahwa negara-negara Skandinavia (dalam studi tersebut menyertakan 3 negara Skandinavia: Denmark, Finlandia, dan Swedia) menempati tiga posisi teratas dalam hal kohesi sosial dan menjelaskan dengan kuat hubungannya dengan tingkat kebahagiaan.

KEUNIKAN NEGARA SKANDINAVIA

Apa yang unik yang dimiliki oleh negara Skandinavia dan tidak dimiliki oleh negara lain? Inglehart (et. al, 2008) merangkum keunikan negara Skandinavia ini dengan tiga kata kunci: (a) Kemakmuran yang membuat warganya terbebas dari kesulitan hidup; (b) Negara demokratis yang memberikan kebebasan warganya untuk menentukan pilihan hidup; dan (c) Budaya toleran yang membuat warganya saling percaya dan memiliki banyak ruang untuk mengekspresikan diri dan identitas unik mereka. Tiga ciri ini menyatu di negara Skandinavia, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Mungkin saja ada negara yang makmur (misalnya negara Singapura, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab), tetapi negara-negara tersebut relatif tidak demokratis. Warga tidak memiliki kebebasan berpendapat dan bersuara, dan tidak bebas dalam menentukan pilihan-pilihan hidup mereka. Ada negara-negara yang

demokratis dan makmur (seperti Amerika Serikat, Hongkong), tetapi di negara tersebut tidak mempunyai budaya kohesi sosial yang kuat. Warga negara tersebut cenderung individualistik dan memiliki tingkat kohesi dan kepercayaan sosial yang relatif rendah. Negara Skandinavia unik, karena ketiga ciri (makmur, demokratis, dan kohesi sosial) dimiliki secara bersama-sama.

Martela (et. al, 2020) juga menyebut tiga keunikan negara Skandinavia yang tidak dimiliki oleh negara lain, yakni; (a) Kemakmuran, ditandai oleh pendapatan per kapita yang tinggi; (b) Kelembagaan dan pemerintahan yang baik, ditandai oleh birokrasi yang melayani dan rendahnya korupsi; dan (c) Budaya yang kuat, ditandai oleh kohesi dan kepercayaan sosial yang tinggi. Menurut mereka, banyak negara maju dengan tingkat pendapatan per kapita warganya yang tinggi, tetapi tidak menjamin kebahagiaan warganya. Kunci kebahagiaan warga Skandinavia adalah mereka bukan hanya sejahtera (pendapatan per kapita yang tinggi) tetapi juga memiliki kualitas institusi dan budaya sosial yang baik.

Kualitas institusi memainkan peran kunci dalam memastikan kebahagiaan warga negara. Ini ditunjukkan dengan meminimalkan korupsi dan memaksimalkan partisipasi dan keterwakilan warga negara dalam berbagai keputusan. Kualitas dan faktor-faktor demokrasi seperti pers yang bebas, warga negara yang berpengetahuan dan berpendidikan, dan masyarakat sipil yang kuat memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan berorientasi pada warga negara. Negara Skandinavia juga memiliki budaya kohesi dan kepercayaan sosial yang tinggi. Ini tercermin dari rasa komunitas, kepercayaan, dan kohesi sosial di antara warga negara. Masyarakat yang terpecah mengalami kesulitan menyediakan jenis barang publik yang secara universal akan mendukung kemampuan setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Dalam masyarakat yang terpecah belah, orang juga cenderung kurang mendukung

berbagai tunjangan kesejahteraan karena khawatir kebijakan ini akan menguntungkan kelompok lain. Ketika orang peduli satu sama lain dan percaya satu sama lain, ini memberikan dasar yang jauh lebih stabil untuk membangun dukungan publik untuk berbagai barang publik dan program kesejahteraan sosial.
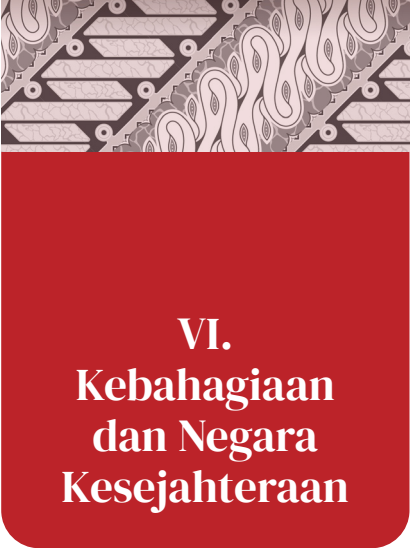
Martela (et.al, 2020) membandingkan karakter dari 5 negara Skandinavia (Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Islandia) dengan 10 negara kaya yang lain (Belanda, Swiss, Luksemburg, Irlandia, Amerika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Singapura, Kuwait, dan Singapura). Tabel menunjukkan data perbandingan tersebut. Dari data ini terlihat, negara-negara di Skandinavia memiliki tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang baik. Rata-rata pendapatan per kapita negara Skandinavia hampir sama dengan negara maju. Tetapi yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju yang lain adalah, negara Skandinavia bukan hanya punya pendapatan per kapita tinggi, tetapi sekaligus juga mempunyai kelembagaan pemerintahan yang baik, kohesi dan soliditas sosial yang baik dan jaminan yang tinggi kepada warga untuk menentukan pilihan hidup.

Kita bisa bandingkan antara negara Skandinavia dengan Arab Saudi, Hongkong, Singapura, atau Kuwait. Negara-negara ini kaya dan dalam banyak kasus juga memiliki pemerintahan yang kuat. Negara Singapura misalnya bahkan menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Tetapi yang tidak dimiliki oleh negara tersebut adalah kohesi dan kepercayaan sosial yang tinggi. Negara di Skandinavia unik, karena semua kebaikan tersebut (kelembagaan yang kuat, budaya kohesi yang tinggi) dan tingkat kekayaan dan kemakmuran, menyatu. Dalam banyak kasus, ada negara yang maju tetapi tidak diimbangi dengan demokrasi yang baik. Atau ada negara kaya dan demokrasi baik, tetapi tidak memiliki budaya kohesi sosial yang baik.

Tabel 5.2. Perbandingan Indikator Beberapa Negara

Country	Life evaluation		Log GDP per capita		Social support		Healthy life expectancy		Freedom		Generosity		Corruption	
	Average	Ranking	Average	Ranking	Average	Ranking	Average	Ranking	Average	Ranking	Average	Ranking	Average	Ranking
Finland	7.77	1	10.61	21	0.96	2	71.80	27	0.95	5	-0.06	91	0.21	4
Denmark	7.60	2	10.75	13	0.95	4	72.10	24	0.95	6	0.10	34	0.18	3
Norway	7.54	3	11.08	6	0.96	3	73.10	13	0.96	3	0.14	23	0.31	8
Iceland	7.49	4	10.72	16	0.98	1	73.00	14	0.94	7	0.27	6	0.69	36
Netherlands	7.49	5	10.79	11	0.93	15	72.20	20	0.92	18	0.21	11	0.39	12
Switzerland	7.48	6	10.96	7	0.94	12	73.80	3	0.93	11	0.12	27	0.31	7
Sweden	7.34	7	10.76	12	0.92	25	72.50	18	0.93	10	0.12	26	0.25	6
Luxembourg	7.09	14	11.46	1	0.92	28	72.60	17	0.89	27	0.01	62	0.36	9
Ireland	7.02	17	11.11	5	0.95	6	72.20	19	0.88	32	0.17	15	0.37	10
United States	6.89	19	10.90	9	0.91	35	68.40	40	0.82	64	0.14	20	0.71	39
United Arab Emirates	6.82	21	11.12	3	0.85	69	66.90	57	0.95	4	0.12	29		–
Saudi Arabia	6.37	28	10.81	10	0.87	61	66.00	74	0.81	65	-0.17	127		–
Singapore	6.26	34	11.34	2	0.91	34	76.50	1	0.92	19	0.13	24	0.10	1
Kuwait	6.06	49	11.12	4	0.84	71	66.30	71	0.85	47	-0.03	78		–
Hong Kong	5.44	75	10.90	8	0.83	75	75.86	2	0.82	57	0.14	21	0.41	14
Nordic average	7.55		10.78		0.95		72.50		0.95		0.12		0.33	
Richest average	6.69		11.05		0.89		71.08		0.88		0.08		0.38	
World average	5.45		9.26		0.81		64.20		0.77		-0.01		0.74	

Sumber: Martela (et. al, 2020)

VI. Kebahagiaan dan Negara Kesejahteraan

Jika kebahagiaan menjadi tujuan dari suatu negara, sistem ekonomi politik negara seperti apa yang lebih berpotensi membuat warganya bahagia? Pada bab sebelumnya dikemukakan bahwa negara-negara Skandinavia (Finlandia, Denmark, Swiss, Norwegia, dan Islandia) adalah negara-negara yang selalu menempati posisi atas dalam survei mengenai kebahagiaan. Negara-negara di Skandinavia ditandai oleh tingkat kesejahteraan warganya yang baik, jaminan akan mendapatkan layanan sosial yang tinggi dari pemerintahnya (pendidikan, kesehatan, pensiun, pengangguran, dan sebagainya). Yang menarik, semua negara Skandinavia menerapkan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Indeks kebahagiaan yang tinggi di negara-negara Skandinavia tentu bukan suatu kebetulan. Ada sesuatu yang dimiliki oleh negara Skandinavia sehingga bisa membuat warganya lebih bahagia. Apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa negara dengan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) lebih punya potensi untuk membuat warganya hidup bahagia? Tulisan dan pemikiran Denny JA banyak mengulas topik ini.

Ada banyak varian bentuk ekonomi politik suatu negara. Para ahli juga memiliki banyak pendapat terkait dengan bentuk-bentuk sistem ekonomi politik negara. Jika disederhanakan, bentuk ekonomi politik negara di dunia bisa dibagi ke dalam tiga spektrum.

Spektrum paling kanan adalah kapitalisme. Inti dari kapitalisme adalah liberalisme dan pengakuan atas kepemilikan pribadi. Sistem ini percaya dengan hukum pasar, bahwa pasar harus dibiarkan sebebas mungkin sehingga setiap orang bisa bersaing dengan bebas. Negara harus dibatasi seminimal mungkin karena intervensi dan peran negara akan mengganggu persaingan yang sehat. Persaingan yang bebas memungkinkan orang bisa mendayagunakan potensinya secara maksimal, dan pada akhirnya kesejahteraan dan kebahagiaan akan tercapai. Di spektrum yang lain adalah sosialisme. Berlawanan dengan kapitalisme, sosialisme berpandangan bahwa kepemilikan pribadi dan hukum pasar akan membuat distribusi kekayaan tidak merata. Masyarakat akan terbagi ke dalam dua kelas, yakni kelas pengusaha (kaya) dan kelas pekerja yang miskin yang tidak memiliki alat produksi. Sistem sosialisme mengandaikan bahwa kebahagiaan akan tercapai jika terjadi kondisi masyarakat tanpa kelas, kepemilikan dimiliki secara bersama-sama oleh semua orang.

Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) berada di tengah-tengah di antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini seperti mengambil hal-hal yang baik dari kapitalisme dan sosialisme. Hal baik dari kapitalisme yang diadopsi oleh negara kesejahteraan adalah kepemilikan pribadi dan pasar yang bebas. Individu boleh memiliki kekayaan. Pasar juga dibuat terbuka dan bebas, sehingga setiap orang bisa bersaing dengan sehat. Persaingan yang sehat membuat warga diuntungkan karena akan mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif. Di sisi lain, negara kesejahteraan juga mengambil hal-hal yang positif dari sosialisme, yakni peran negara. Negara tidak boleh hanya pasif, sebaliknya negara harus berperan dalam menciptakan distribusi yang lebih merata. Negara juga bisa melakukan intervensi untuk melayani warga, sehingga warga akan mendapatkan jaminan sosial yang layak (pendidikan, kesehatan, pensiun, dan sebagainya). Layanan sosial ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pasar. Negara

sebaliknya harus aktif dan berperan dalam menjamin setiap warga negara mendapatkan jaminan hidup yang layak.

Hal baik lain dari sosialisme yang diadopsi oleh negara kesejahteraan adalah serikat pekerja. Negara kesejahteraan umumnya ditandai oleh adanya serikat pekerja yang kuat, di mana para pekerja bersatu dalam sebuah organisasi (serikat) dan merundingkan hak-haknya kepada pengusaha. Hanya bentuk serikat pekerja di negara sosialisme dan negara kesejahteraan punya wajah yang berbeda. Dalam sistem sosialisme, buruh digambarkan bersatu, kemudian melakukan revolusi dengan menguasai alat-alat produksi yang dimiliki oleh pengusaha. Ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Sementara pada sistem negara kesejahteraan, pengusaha tidak ditempatkan sebagai musuh dari serikat pekerja. Posisi pengusaha dan serikat pekerja sama-sama penting. Serikat pekerja adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan pekerja, seperti jaminan gaji yang layak, pengakuan akan hak-hak pekerja, dan mencegah terjadinya eksploitasi pekerja.
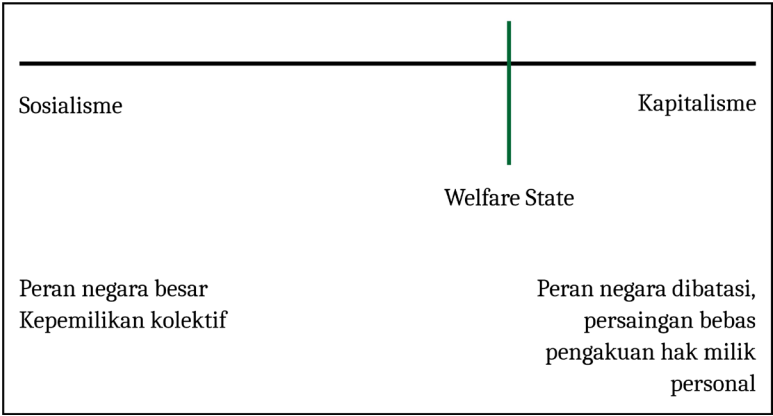
Gambar 6.1. Kontinum SIstem Ekonomi Dunia

SISTEM KAPITALISME-LIBERALISME

Sistem kapitalisme didasarkan pada pandangan setiap individu mempunyai kepentingan dan ego, seperti memupuk kekayaan, memaksimalkan keuntungan dan sebagainya. Ini adalah sifat alamiah manusia. Yang perlu dilakukan adalah mengatur kepentingan-kepentingan individu tersebut dalam sebuah pasar (*market*) sehingga persaingan tersebut berlangsung secara adil. Negara tidak boleh campur tangan pada pasar, karena jika dilakukan pasar tidak bekerja secara sempurna. Negara sebaliknya harus membiarkan pasar sebagai arena pertukaran dari kepentingan-kepentingan individu. Kapitalisme percaya, pasar mempunyai kemampuan untuk koreksi dan menciptakan keseimbangan. Pasar tidak akan bekerja dengan baik ketika negara ikut serta memengaruhinya sehingga persaingan yang terjadi bukan persaingan alamiah.

Kapitalisme percaya bahwa kesejahteraan akan tercipta jika pasar bekerja dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan persaingan yang bebas, menerapkan aturan agar persaingan bisa bekerja dengan baik. Lewat pasar yang terbuka, individu bisa memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Pasar yang terbuka menguntungkan baik produsen ataupun konsumen. Produsen diuntungkan karena memiliki kebebasan untuk memasarkan dan menghasilkan produk yang berkualitas. Sementara konsumen juga diuntungkan, karena persaingan yang terjadi akan menghasilkan produk yang kompetitif dengan kualitas yang baik. Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana posisi individu dalam sistem kapitalisme dan bagaimana kebahagiaan dan kesejahteraan bisa tercapai lewat kapitalisme. Seperti terlihat dalam gambar, kapitalisme mengandaikan individu memiliki kepentingan dan ego masing-masing. Pasar mewadahi kepentingan tersebut sehingga masing-masing individu dengan kepentingan masing-masing bisa bersaing secara sehat. Negara berkewajiban menjaga agar persaingan tersebut tetap terbuka secara luas.
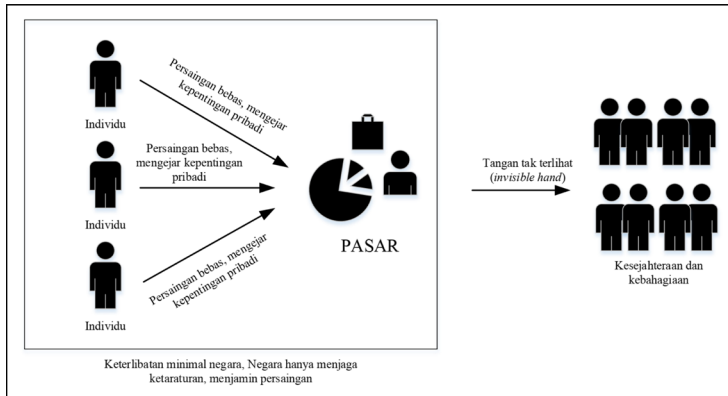
Gambar 6.2. Gambaran Sistem Liberalisme
Sumber: diadaptasi dari Vault (et.al, 2014)

Sistem kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari pemikiran liberalisme. Karena itu sistem kapitalisme sering disebut sebagai kapitalisme-liberalisme. Kapitalisme bersumber dari pandangan liberalisme yang menempatkan individu dalam posisi sentral. Ada 5 pandangan utama liberalisme (Rosser, 2003). Pertama, individualisme. Manusia dalam pandangan liberalisme digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepentingan, kemauan bekerja sama, kompetitif secara konstruktif, dan rasional. Kedua, kepemilikan pribadi. Liberalisme menghargai kepemilikan pribadi. Setiap orang bebas dan berhak memiliki sesuatu dan orang lain (termasuk negara) wajib menghormati kepemilikan individu, seperti harta benda, hingga hak cipta, Ketiga, kesetaraan (ekualitas). Setiap individu dilahirkan setara. Individu harus diberikan kesempatan yang sama, agar bisa mewujudkan potensi masing-masing. Keempat, kebebasan. Agar individu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki, individu harus diberikan kebebasan. Kelima., peran negara minimalis. Negara bisa mengancam kebebasan individu, karena itu dalam liberalisme peran negara harus dikurangi seminim mungkin. Liberalisme percaya bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengatur, dan mengontrol diri, sehingga negara tidak perlu

terlibat terlalu jauh yang dampaknya akan merugikan masyarakat luas.

Sistem kapitalisme terutama bersumber pada pemikiran Adam Smith (1723-90) dan David Ricardo (1772-1823). Mereka memandang pasar sebagai mekanisme yang dapat mengatur diri sendiri (*self-regulating*) yang akan dengan sendirinya bergerak ke arah keseimbangan. Smith dan Ricardo berpendapat bahwa campur tangan terhadap pasar bebas akan mengganggu efisiensi alamiah mekanisme pasar. Pemikiran Smith disampaikan pada buku “The Wealth of Nations” yang terbit pada tahun 1776. Pemikirannya tidak bisa dilepaskan dengan kondisi merkantilisme yang berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-18. Saat itu, kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh kebijakan kerajaan. Pihak kerajaan yang mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari ekspor, impor, produksi, distribusi barang, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi baru bisa dilakukan ketika mendapatkan izin dari negara. Kondisi ini, menurut Smith, menjadi penyebab kondisi tidak efisien, birokratis, dan perekonomian yang tidak sehat (Vault, et. al, 2014).

Menurut Smith (dikutip dari Vault, et. al, 2014), terdapat tiga kondisi yang membuat kemakmuran suatu negara tercapai. Pertama, kepemilikan pribadi. Individu digerakkan oleh kepentingan pribadi mereka. Individu saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Ini bukan hal yang buruk, karena dengan kepentingan tersebut orang akan terus menerus termotivasi menghasilkan produk yang paling baik. Kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Pembagian kerja mampu menunjang dan memperbaiki kekuatan produktivitas kerja. Seorang pekerja setiap harinya hanya mampu memproduksi beberapa peniti. Ketika proses produksi dibagi dalam beberapa langkah pekerjaan dan diselesaikan oleh sekian pekerja spesialis yang masing-masing berkonsentrasi pada satu proses penyelesaian, maka setiap harinya ribuan peniti mampu dihasilkan. Ketiga, perdagangan dan persaingan bebas. Mirip dengan pembagian kerja antara berbagai pekerja, para pihak yang terlibat dalam perdagangan, melakukan spesialisasi sesuai kemampuan. Dengan demikian, produktivitas

secara keseluruhan akan meningkat. Menurut Smith, pembagian lewat "tangan tak terlihat" lebih efisien dan akan lebih merangsang ekonomi dibandingkan semua bentuk perencanaan ekonomi.

Pemikir lain yang penting dalam memberikan fondasi kapitalisme-liberalisme adalah David Ricardo. Sama dengan Smith, Ricardo menentang merkantilisme sebagai strategi untuk meraih kemakmuran bagi negara. Pada masa merkantilisme, negara (kerajaan) memproduksi semua kebutuhan warga negaranya. Sebagai akibatnya, ekonomi menjadi tidak efisien karena mungkin saja negara tersebut tidak mempunyai kemampuan dan keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Ricardo memperkenalkan konsep keunggulan komparatif. Negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional.

Sistem kapitalisme masih bertahan hingga kini. Dalam perjalanannya, sistem ini pernah dinilai tidak berhasil. Dari awal abad 18 hingga awal abad 20, sistem kapitalisme dianggap sebagai sistem terbaik yang bisa menciptakan kesejahteraan warga. Tetapi peristiwa depresi ekonomi (*Great Depression*, tahun 1929-1939) menyadarkan bahwa sistem ini memiliki kelemahan. Peristiwa ini dianggap terjadi sebagai akibat dampak buruk kapitalisme. Kapitalisme melahirkan kelompok orang kaya dan pekerja dengan penghasilan yang minim. Kelompok kaya lebih memilih menyimpan kekayaannya ke bank agar mendapatkan bunga yang besar. Sebagai akibatnya, produksi menjadi mandek, dan efek lanjutannya adalah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja. Karena produksi terhenti, pasokan barang-barang di pasar sedikit, dan efek lanjutannya adalah harga barang kemudian menjadi naik (inflasi). Kondisi ini melahirkan tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak warga masyarakat yang tidak memiliki daya beli untuk membeli produk di pasar. Kapitalisme ternyata tidak bisa bekerja. Pandangan bahwa pasar adalah kekuatan tidak terlihat dan akan

bekerja untuk meyeimbangkan kondisi, ternyata tidak terjadi.

Peristiwa depresi besar ini dalam sejarahnya membuat banyak negara tersadar bahwa kapitalisme tidak ideal. Posisi negara yang memilih tidak ikut campur tangan pada pasar justru membuat kondisi ekonomi memburuk. Negara dengan sumber daya yang dimiliki seharusnya bisa memengaruhi pasar. Peristiwa depresi ekonomi (1929-1939) seharusnya bisa dihindari jika saja negara ikut campur tangan pada pasar. Misalnya dengan membelanjakan uang untuk sektor publik (membangun infrastruktur dan proyek lain yang bisa menciptakan permintaan tenaga kerja). Negara juga bisa menurunkan suku bunga, sehingga lebih banyak investasi yang bisa mendatangkan lapangan kerja. Kebijakan ini tidak bisa dilakukan negara dengan dalih tidak boleh ikut campur untuk memengaruhi pasar. Pasca tahun 1939-an, berkembang pandangan yang melihat negara seharusnya ikut campur tangan dalam pasar. Kepercayaan bahwa negara harus terlibat dalam pasar berkembang hingga tahun 1970-an.

Di tahun 1970-an, terjadi peristiwa stagflasi yang membuat pandangan liberalisme-kapitalisme dengan peran negara minimal, seolah bangkit kembali. Pada masa itu, terjadi kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya biaya produksi menjadi naik. Inflasi menjadi tinggi, banyak orang yang tidak mampu membeli produk akibat inflasi yang tinggi. Negara mencoba melakukan intervensi pasar dengan cara menaikkan daya beli masyarakat dan kebijakan untuk menaikkan upah pekerja. Kondisi ini justru membuat perekonomian menjadi mandek, tidak bergerak. Pendukung liberalisme-kapitalisme seolah mendapatkan momentum dari peristiwa stagflasi ini. Intervensi negara pada pasar dianggap sebagai sumber dari mandeknya ekonomi, di mana pasar tidak cepat pulih akibat campur tangan negara yang berlebihan.

Pasca tahun 1970-an, yang terjadi adalah liberalisme-kapitalisme makin meluas. Muncul pemikir baru yang menekankan pentingnya liberalisme dan pembatasan negara pada pasar, seperti Friedrich von Hayek (1899-1992) dan Milton Friedman (1912 - 2006). Hayek menolak

segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik. Hayek bertumpu pada liberalisme klasik, yang menjunjung hak-hak individu dan keutamaan moral dari kebebasan individu, keunggulan pasar bebas, dan keharusan pemerintah yang terbatas di bawah supremasi hukum. Sementara Friedman menekankan tugas pokok pemerintah adalah melindungi kebebasan melalui penegakan hukum dan ketertiban, memperkuat sektor swasta, dan melindungi pasar yang kompetitif.

Perkembangan liberalisme-kapitalisme juga didorong oleh kegagalan sosialisme. Banyak negara sosialis yang runtuh (seperti Uni Soviet, Jerman Timur) dan kemudian beralih ke kapitalisme. Kapitalisme dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Muncul bentuk baru dari liberalisme, yang dikenal dengan neo-liberalisme. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme (paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu), dan pasar bebas dalam tradisi ekonomi neo-klasik. Gagasan tersebut kemudian tertuang dalam dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Pandangan ini secara praktis tertuang dalam 'Washington Consensus,' sebuah agenda teknokratis berisi daftar kebijakan dalam menghadapi defisit dan inflasi yang tinggi. Disebut Washington Consensus karena merupakan kesepakatan kebijakan antara World Bank, IMF, dan Kementrian Keuangan USA yang berpusat di Washington. Ada 10 resep atau kebijakan, yakni (1) Disiplin fiskal, dengan menjaga defisit serendah-rendahnya, karena defisit yang tinggi akan mengakibatkan inflasi dan pelarian modal; (2) Prioritas-prioritas belanja pemerintah, dengan mengurangi atau menghilangkan subsidi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya; (3) Reformasi perpajakan; (4) Liberalisasi keuangan; (5) Nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang harus mengadopsi nilai tukar

yang kompetitif agar memacu ekspor; (6) Liberalisasi perdagangan, dengan meminimumkan hambatan-hambatan tarif dan perizinan; (7) Penanaman modal asing harus dibuat seliberal mungkin karena dapat membawa masuk keuntungan modal dan keahlian dari luar negeri; (8) Privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah (9) Deregulasi sektor ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang kuat dan berlebihan dapat menciptakan korupsi; (10) Penghargaan terhadap hak milik harus ditegakkan, karena hukum yang lemah dan sistem peradilan yang buruk dapat mengurangi insentif untuk akumulasi modal.

SISTEM SOSIALISME

Sistem sosialisme bersumber terutama dari pemikiran Karl Marx (1818-1898). Sistem ini adalah kritik langsung terhadap kapitalisme yang berkembang sejak abad 18. Pada awal abad 19, gambaran yang muncul di banyak negara adalah munculnya kelompok pengusaha yang memiliki kekayaan yang besar sebagai akibat dari industrialisasi. Di sisi lain, terdapat pekerja dengan kondisi yang memprihatinkan. Pekerja ini hidup dengan gaji pas-pasan dengan standar hidup yang buruk. Menurut Marx, kondisi kehidupan dan pekerjaan yang tidak manusiawi itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah akibat logis dari kapitalisme (Vault, et. al, 2014). Kapitalisme memunculkan dua kelas yang bertentangan, yakni kelas pengusaha (pemilik modal) dan pekerja. Karena persaingan bebas di pasar, pengusaha berusaha untuk membuat produk dengan harga yang paling murah dan kompetitif di pasar. Pengusaha juga bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena lewat keuntungan tersebut pengusaha bisa memperluas produksi dan perusahaannya. Korban dari sistem ini adalah pekerja. Untuk menghemat biaya produksi, pengusaha mengeksploitasi pekerja dengan upah yang minim.

Dalam sistem kapitalisme, pekerja adalah bagian dari komoditas yang

digunakan untuk menciptakan nilai lebih (surplus). Pemilik modal memiliki Uang (*M-Money*), dan lewat uang tersebut kemudian membeli Pekerja (*L-Labour*) dan Alat Produksi (*MP-Means of Productions*). Lewat pekerja dan alat produksi tersebut dilakukan proses produksi yang menghasilkan produk (P). Produk itu kemudian dijual (sirkulasi) di pasar sehingga terjadi nilai lebih. Ada selisih antara uang yang dikeluarkan dengan uang didapat. Surplus ini kemudian diakumulasikan kembali ke dalam kapital, sehingga makin membesar perusahaan dari waktu ke waktu. Menurut Marx (dikutip dari Fuch, 2014; Eriyanto, 2022), dalam sistem kapitalisme pekerja pada dasarnya adalah komoditas. Pekerja memiliki tenaga, dan kemudian menjualnya kepada pemilik modal (kapitalis). Pemilik modal membeli pekerja tersebut dengan imbalan berupa gaji (upah). Pekerja di sini tidak memiliki alat produksi (seperti tanah, pabrik, mesin, teknologi, dsb). Pemilik modal (kapitalis) dengan demikian memiliki tenaga kerja dan alat produksi, yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk, untuk kemudian dijual di pasar. Orientasi dari pemilik modal adalah keuntungan, di mana harga produk tersebut harus lebih tinggi daripada harga beli tenaga kerja dan alat produksi (pabrik, mesin, teknologi, dsb).

Pekerja berbeda dengan budak. Jika budak dimiliki secara privat oleh pemilik modal, pekerja bebas dengan dirinya sendiri. Sepintas tidak terjadi eksploitasi. Tetapi pada kenyataannya telah terjadi eksploitasi dengan cara yang berbeda, yakni eksploitasi melalui apa yang disebut dengan nilai lebih (Fuch, 2014; Eriyanto, 2022). Seharusnya, pekerja diberikan upah setara dengan waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan produk. Pemilik modal akan memaksimalkan tenaga kerja agar bisa memproduksi lebih dari waktu yang dikeluarkan. Misalnya, pekerja dibayar Rp100 ribu untuk bekerja selama 8 jam per hari untuk menghasilkan sebuah produk. Pekerja ternyata bisa menyelesaikan produk hanya 4 jam, atau 2 produk dalam 8 jam. Pekerja tidak dibayar Rp200 ribu, tetapi hanya Rp100 ribu. Di sini ada perbedaan (selisih) yang disebut sebagai nilai lebih. Nilai lebih menjadi orientasi dari pemilik

modal agar mendapatkan keuntungan di pasar.

Bila persaingan dan pembagian kerja bagi Smith adalah sumber kemajuan, sebaliknya bagi Marx persaingan dan pembagian kerja adalah kebobrokan mendasar dari kapitalisme dan penyebab penindasan dan keterasingan. Kemajuan produksi hanya menguntungkan pemilik modal, sedangkan para pekerja semakin menderita (Vault, et. al, 2014). Pekerja tidak memiliki alat produksi. Pekerja juga tidak memiliki objek hasil produksi. Baik alat produksi maupun produk adalah milik pemilik modal (kapitalis). Bekerja di sini tidak lagi menjadi ekspresi atau tujuan hidup dari seseorang. Bekerja adalah bagian dari komoditas yang diperjualbelikan. Karena pekerja tidak memiliki kontrol atas alat produksi dan produk yang dihasilkan, terjadi apa yang disebut dengan alienasi (keterasingan). Alienasi ini terjadi pada tiga aspek. (a) Alienasi alat produksi. Pekerja menghasilkan produk yang bukan milik mereka sendiri. (b) Alienasi aktivitas produktif. Pekerja memproduksi objek yang bukan gagasan atau ide mereka sendiri. Mereka membuat produk yang sudah ditentukan oleh pemilik modal. (c) Alienasi sesama pekerja. Terdapat persaingan di antara sesama pekerja. Berbagai mekanisme dibuat oleh pemilik modal (seperti bonus, jenjang karier dsb.) yang membuat antar-pekerja saling bersaing.

Kapitalisme sebagai sebuah sistem akan terus berkembang. Kapitalisme melahirkan konsentrasi modal di tangan beberapa kapitalis, dan pada saat bersamaan berakibat membesarnya jumlah pekerja yang tidak menguasai alat produksi. Pekerja kerap tidak menyadari dan mengabaikan kondisi eksploitasi yang diterimanya. Hal ini karena pemilik modal (pengusaha) dengan sumber daya yang dimiliki terus menerus berusaha menciptakan kesadaran palsu. Pemilik modal menciptakan kepercayaan dan ideologi, sehingga eksploitasi yang diterima oleh pekerja dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Bagaimana eksploitasi pekerja ini bisa dihentikan? Marx sampai pada kesimpulan bahwa, kondisi ini hanya bisa dihentikan lewat revolusi

untuk menguasai alat produksi yang berada di tangan pengusaha (kapitalis). Pekerja harus disadarkan mengenai kondisi eksploitasi dan ketidakadilan yang mereka terima. Ketika kesadaran pekerja ini muncul, pekerja bisa membuat revolusi untuk merebut alat produksi dari pemilik modal ke pekerja. Dengan cara ini akan lahir masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dikuasai dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Kesejahteraan dan kemakmuran hanya bisa diperoleh jika tidak ada penindasan dan eksploitasi, dan ini hanya mungkin muncul pada sistem sosialisme. Menurut pandangan sosialisme, sistem kapitalisme pasti akan menciptakan eksploitasi karena sistem ini memunculkan kelas atau kelompok masyarakat pemilik modal di satu sisi dan pekerja di sisi lain.

Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana kesejahteraan dan kebahagiaan bisa diperoleh pada sistem sosialisme. Penganut sosialisme percaya bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hanya muncul pada masyarakat tanpa kelas. Di kondisi masyarakat yang ideal ini, tidak ada kelas pekerja dan kelas pengusaha (pemilik modal). Sumber eksploitasi adalah karena ada kelas dominan (pemilik modal) yang memaksakan dan mengeksploitasi kelas lain. Pertarungan antara kelas pemilik modal dan pekerja akan memuncak pada revolusi proletariat. Pandangan sosialisme mengembangkan sebuah utopia masyarakat tanpa kelas, tanpa persaingan, dan tanpa pemilikan pribadi atas alat produksi. Pada kondisi ini, kebahagiaan dan kesejahteraan akan tercapai. Manusia bisa mengembangkan potensi dirinya tanpa ada sistem yang mengeksploitasi.

Namun, sejarah memperlihatkan bahwa apa yang digambarkan Marx tentang keterpurukan buruh dan semakin kuatnya akumulasi kepemilikan pada pemilik modal tidak sepenuhnya terbukti. Eksperimen sosialisme negara yang mengacu pada Marx, telah gagal. Sebagai sebagai sebuah sistem, negara yang menganut sosialisme banyak yang kemudian hancur dan berganti ke kapitalisme. Meski demikian, sosialisme tetap merupakan konsep yang sangat penting. Selama ini belum ada alternatif yang berfungsi dan bertahan dalam praksis terhadap tatanan ekonomi

berbasiskan efisiensi pasar dan kepemilikan pribadi. Menurut Vault (et. al, 2014), ramalan Marx banyak yang tidak terbukti. Meski demikian, pandangan Marx dan sosialisme mengenai eksploitasi pekerja tetap sangat penting untuk menyadarkan bahaya dari kapitalisme.
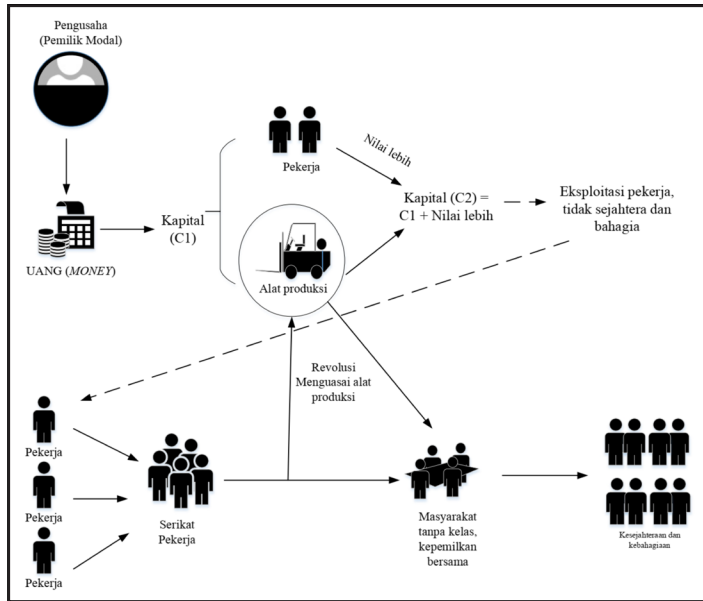
Gambar 6. 3. Gambaran Sistem Sosialisme

NEGARA KESEJAHTERAAN

Sistem kapitalisme dan sosialisme adalah dua sistem yang saling berseberangan. Kedua sistem ini berbeda dan bertolak belakang satu sama lain. Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti sistem yang berada di tengah-tengah. Sistem ini mengambil beberapa prinsip liberalisme-kapitalisme, dan di saat yang sama juga mengambil semangat sosialisme. Dari kapitalisme, negara kesejahteraan mengambil prinsip

kebebasan dan kepemilikan hak pribadi. Sementara dari sosialisme, negara kesejahteraan mengambil prinsip penting mengenai pentingnya peran negara dan serikat pekerja.

Menurut Vault (et. al, 2014), prinsip negara kesejahteraan bisa ditelusuri dari pemikiran ekonom John Maynard Keynes. Berbeda dengan Smith yang berpendapat bahwa negara tidak boleh ikut campur, Keynes justru berpendapat sebaliknya. Negara dengan sumber daya yang dimiliki bisa mengintervensi pasar untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Keynes mempertanyakan kebenaran "tangan-tangan tak terlihat" dari pasar yang ternyata tidak berfungsi mengacu pada krisis perekonomian dunia pada tahun 1929. Pasar, tidak seperti yang diasumsikan Smith, tidak kembali membaik melainkan melanggengkan pengangguran dalam jumlah yang besar sekaligus melumpuhkan perekonomian. Keynes memastikan terjadinya pembalikan spiral, yaitu ketika produksi berkurang dan semakin banyak pekerja yang di-PHK, para konsumen dan produsen pun merasa tidak aman, sehingga semakin sedikit mengeluarkan uang. Yang terjadi adalah, permintaan semakin menurun, pengusaha kemudian menurunkan produksi dan mengurangi lapangan kerja, sehingga penghematan pun semakin ketat dan seterusnya. Krisis semakin meningkat dan perekonomian akan mengalami depresi berat yang berkelanjutan.

Tidak hanya memahami situasi ketika pasar tidak berfungsi, Keynes lewat analisis pengendalian antisiklus mengembangkan sebuah konsep mengatasi permasalahan tersebut. Dalam masa kesulitan ekonomi, negara harus mengintervensi pasar dan menaikkan permintaan lewat pengambilan utang dan peningkatan belanja, termasuk lewat pemberian uang langsung kepada warga, atau dengan menurunkan pajak. Meskipun, hal tersebut mengandung bahaya dan tidak menghasilkan apapun, karena akibat ketidakpastian masyarakat masih terus menghemat. Karena itu, akan lebih membawa dampak jika negara secara langsung berbelanja, misalnya dengan membangun jalan dan sekolah. Dengan pengeluaran tambahan ini tercipta lapangan kerja,

yang pada gilirannya, meningkatkan konsumsi, melahirkan permintaan dan memicu spiral ekonomi positif (Vault, et al., 2014).

Sejak tahun 1930-an hingga 1970-an, pandangan Keynes ini sangat populer. Pendapat Keynes menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi di banyak negara terutama akibat Perang Dunia. Hanya saja, pandangan Keynes ini dianggap gagal dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 1970-an (lihat analisis Vault, et al., 2014). Kebijakan anggaran belanja antisiklus tidak berfungsi dengan baik seperti yang dikonsepkan oleh Keynes. Pengeluaran di masa krisis memang ditingkatkan, namun ketika perekonomian membaik, utang tidak (bisa) dibayar. Sebagai akibatnya, utang publik membengkak dan ruang gerak bagi pengeluaran menurun dari satu krisis ke krisis berikutnya. Selain itu, muncul dua krisis minyak. Akibat peningkatan drastis harga minyak, terjadi lingkaran setan: gaji meningkat, namun peningkatan harga BBM menelan penghasilan, kembali gaji ditingkatkan yang memicu inflasi untuk kemudian memicu peningkatan gaji. Dengan demikian, program stimulus lewat negara tidak berdampak sama sekali. Perekonomian pun menjadi stagnan pada saat inflasi meroket (stagflasi).

Meskipun teori Keynes tidak bisa menjelaskan dan menjadi solusi stagflasi ekonomi tahun 1970-an, pemikiran Keynes dianggap penting. Salah satu pemikiran pentingnya adalah mengenai peran negara. Berbeda dengan liberal klasik, Keynes berpendapat bahwa negara tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan kepada pasar. Lepasnya peran negara dalam ekonomi justru menimbulkan instabilitas dan tingginya tingkat pengangguran. Gagasan lain dari Keynes yang penting adalah tenaga kerja penuh (*full employment*). Menurut Keynes, salah satu prasyarat agar kapitalisme dapat terus berkembang adalah *full employment* yang hanya akan dapat dicapai jika pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi. Peran positif pemerintah dapat bermanfaat mengatasi persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pasar seperti inflasi dan pengangguran.

Menurut Vault (et al., 2014) gagasan Keynes mengenai peran negara banyak mengilhami pemikiran sosial demokrat di Eropa Barat. Negara punya tanggung jawab untuk menciptakan kondisi *full employment* dan memberi layanan sosial kepada masyarakat. Menurut sistem negara kesejahteraan, kesejahteraan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Karena jika pasar yang bekerja, akan terjadi pemupukan kekayaan hanya pada sekelompok orang. Negara kesejahteraan juga menolak sistem sosialisme, yang menggambarkan masyarakat tanpa kelas. Dalam pandangan negara kesejahteraan, negara harus melindungi kebebasan termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan untuk memiliki harta benda. Negara kesejahteraan seperti sebuah gabungan antara kapitalisme dan sosialisme.
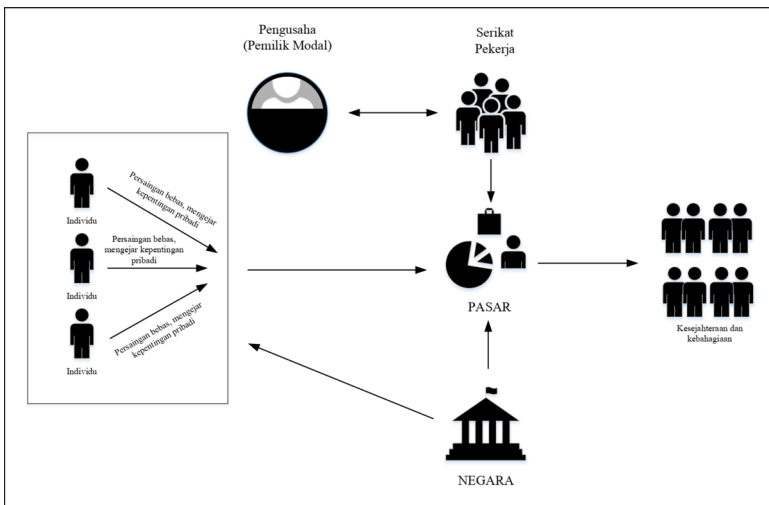
Gambar 6. 4. Gambaran Sistem Negara Kesejahteraan

VII. Model Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang menjadikan kesejahteraan warga sebagai tujuan utama. Negara penganut sistem ini dicirikan oleh besarnya layanan sosial untuk warga seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pensiun, dan sebagainya. Ada banyak negara kesejahteraan. Masing-masing negara mempunyai jalan dan cara tersendiri untuk mewujudkan kesejahteraan warga. Dalam berbagai pemikiran yang dipublikasikan dalam berbagai medium (buku, artikel surat kabar, hingga tulisan populer di Facebook dan video Youtube), Denny JA selalu menempatkan negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia) sebagai model negara kesejahteraan yang ideal.

MODEL NEGARA KESEJAHTERAAN

Ada banyak negara kesejahteraan. Bagaimana membedakan negara kesejahteraan satu dengan lainnya? Misalnya, apa yang membedakan tipe negara kesejahteraan Denmark dengan Jerman dan Amerika? Salah satu pembagian terkenal dan dipakai hingga saat ini adalah pembagian negara kesejahteraan yang dibuat oleh sosiolog asal Denmark, Gøsta Esping-Andersen (1990).

Esping-Andersen (1990) membuat dua kategori utama untuk membedakan model negara kesejahteraan. Pertama, dekomodifikasi. Istilah ini diambil dari kata Inggris (commodity=barang). Barang yang dimaksud di sini adalah pasar tenaga kerja. Konsep ini mengacu kepada sejauh mana ketergantungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan pasar tenaga kerja. Apakah untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut (makan/minum, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya) seseorang menggantungkan sepenuhnya pada pasar tenaga kerja ataukah ada sumber lain.

Dekomodifikasi rendah terjadi ketika pasar tenaga kerja menjadi sumber utama. Agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasar, ia harus memiliki uang, dan agar memiliki uang seseorang harus bekerja. Orang tidak mempunyai alternatif atau sumber lain dalam memenuhi kebutuhan dasar. Orang bisa jatuh pada kemiskinan atau ekstremnya kelaparan jika tidak bekerja. Sebaliknya, dekomodifikasi tinggi terjadi ketika pasar tenaga kerja tidak menjadi satu-satunya sumber utama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Negara memberikan layanan dasar yang dibutuhkan oleh warga. Ekstremnya, tanpa bekerja pun warga tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan bantuan negara. Jika ada warga negara yang tidak mampu memperoleh pekerjaan, negara membantu memberikan pekerjaan atau memberikan uang hingga mendapat pekerjaan.

Kedua, stratifikasi. Ini merujuk lapisan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti kelompok penghasilan tinggi, menengah dan rendah. Masyarakat terbagi ke dalam beberapa tingkatan atau strata. Konsep stratifikasi dipakai oleh Esping-Andersen dalam konteks, apakah model negara kesejahteraan yang dipakai memperkuat atau memperlemah stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Apakah kebijakan yang dipilih memperlebar jarak sosial antara lapisan tersebut ataukah sebaliknya justru kebijakan tersebut secara sengaja diarahkan untuk menghilangkan perbedaan strata yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan 2 konsep tersebut (dekomodifikasi dan stratifikasi), Esping-Andersen kemudian mengklasifikasikan negara kesejahteraan ke dalam tiga model: liberal, konservatif, (korporatisme) dan sosial demokrasi.
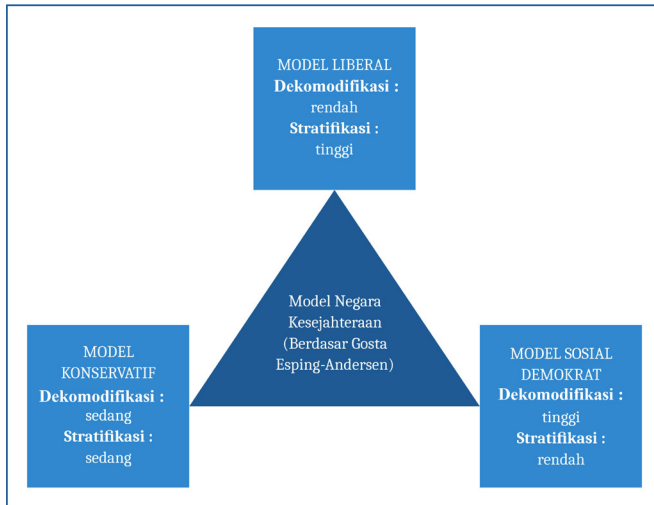
Gambar 7.1. Model Negara Kesejahteraan

Model Liberal

Model ini diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kanada. Ciri penting dari model negara kesejahteraan ini adalah tingkat dekomodifikasi rendah. Negara bertanggung jawab memberikan lapangan pekerjaan, agar warga bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan dasar. Negara tidak memberikan intervensi agar warga mendapatkan pekerjaan. Masing-masing orang harus bersaing di pasar kerja agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Intervensi negara hanya diberikan kepada kelompok khusus (seperti warga miskin, penyandang disabilitas dan sebagainya). Untuk mendapat layanan sosial (misalnya bantuan keuangan, layanan gratis untuk kesehatan dan pendidikan), negara menerapkan syarat-syarat khusus. Bantuan dan layanan sosial

tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang memenuhi persyaratan. Karena hanya diberikan kepada orang dengan syarat khusus, penerima bantuan sosial ini kerap mendapatkan stempel dan stereotipe yang buruk--seperti warga miskin, warga kelas dua dan sebagainya. Mereka juga mendapatkan fasilitas dan layanan yang kurang baik. Misalnya, saat mendapatkan layanan kesehatan gratis, hanya diberikan rumah sakit lokal dengan fasilitas terbatas.

Sumber utama pembiayaan layanan sosial berasal dari pajak. Umumnya, tarif pajak dilakukan dengan sistem proporsional. Orang (tidak peduli berapa pun penghasilan yang diperoleh), akan dikenakan pajak dengan jumlah proporsi tertentu--misalnya pajak penghasilan sebesar 15%. Orang dengan penghasilan tinggi atau rendah sama-sama akan dipotong sebesar 15%. Karena bantuan dan layanan sosial hanya diberikan kepada orang dengan syarat khusus, maka warga yang tidak masuk dalam kategori khusus tersebut, harus mencari dan memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya. Pada titik ini akan berlaku hukum pasar, di mana warga bisa memenuhi kebutuhan dasar (misalnya pendidikan, kesehatan) sesuai dengan penghasilan masing-masing. Terjadi proses privatisasi, yang ditandai oleh banyaknya lembaga dan layanan swasta (seperti sekolah dan kampus swasta, asuransi swasta, rumah sakit swasta) yang bersaing memberikan layanan kepada warga. Orang dengan penghasilan tinggi, bisa mencari sekolah, asuransi dan rumah sakit terbaik sesuai dengan penghasilannya.

Layanan dan bantuan sosial pemerintah sifatnya terbatas dan hanya ditujukan kepada orang dengan syarat tertentu. Warga di luar syarat tersebut harus mencari sendiri layanan sosial sesuai dengan penghasilan masing-masing. Kebijakan dan desain semacam ini akan menghasilkan stratifikasi sosial yang tinggi. Terdapat jurang perbedaan antara warga berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Ciri penting dari model negara kesejahteraan liberal adalah negara tidak melakukan intervensi dan kebijakan khusus untuk mengatasi kesenjangan. Orang bisa bersaing secara bebas untuk mendapatkan kekayaan. Layanan umumnya

diserahkan kepada sektor swasta, sebagai akibatnya akan menghasilkan kualitas layanan yang berbeda untuk masing-masing orang. Warga dengan penghasilan tinggi bisa mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik. Sebaliknya, warga dengan penghasilan rendah terpaksa harus menerima layanan yang kurang baik.

Model Konservatif

Model konservatif dikenal juga dengan model korporatisme, dan dipraktekkan di Jerman, Italia, dan Prancis. Sesuai dengan sifat umum dari korporatisme, negara diibaratkan keluarga besar yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Pada awalnya layanan sosial dilakukan oleh gereja, di mana gereja memberikan bantuan sosial kepada jamaah yang kekurangan. Seiring dengan industrialisasi, peran itu kemudian dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dianggap sebagai kepala keluarga yang harus memberikan proteksi dan jaminan kepada karyawan dan keluarganya. Gagasan dasar dari model ini adalah: warga bekerja ke dalam perusahaan dan kelompok profesi. Layanan diberikan kepada masing-masing anggota profesi dan pekerjaan. Pembiayaan layanan sosial berasal terutama dari kontribusi, baik karyawan ataupun perusahaan.

Negara yang menganut model ini mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan penghasilan untuk fasilitas dan kesejahteraan karyawan. Kebutuhan dasar karyawan (pendidikan, kesehatan, pensiun, dan sebagainya) bersumber di antaranya dari kontribusi tersebut. Selain kontribusi perusahaan, karyawan sendiri juga melakukan kontribusi individu berupa potongan gaji untuk asuransi. Besarnya kontribusi disesuaikan dengan besarnya penghasilan. Karyawan dengan gaji besar akan dipotong lebih besar dibandingkan dengan karyawan bergaji kecil. Kontribusi individu karyawan akan menentukan besarnya manfaat yang diperoleh. Karyawan dengan kontribusi besar (potongan gaji besar) akan mendapatkan manfaat lebih besar, seperti uang pensiun dengan jumlah lebih besar.

Model konservatif secara teoretis ditandai oleh tingkat dekomodifikasi sedang. Orang harus bekerja di pasar kerja agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Hanya saja berbeda dengan model liberal, pasar kerja tidak menjadi satu-satunya sumber memenuhi kebutuhan dasar. Ketika seseorang pensiun atau kehilangan pekerjaan, orang bisa tetap memenuhi kebutuhan dasar dari asuransi yang diberikan oleh perusahaan atau asuransi individu yang bersumber dari kontribusi selama bekerja. Perusahaan (termasuk serikat pekerja) menjadi jangkar pengaman yang memastikan setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan dasar. Perbedaan lain dengan model liberal adalah privatisasi. Pada model liberal, orang bisa memilih layanan yang disesuaikan dengan penghasilan. Sementara pada model konservatif, layanan dan asuransi menginduk ke perusahaan atau serikat pekerja.

Kelemahan dari model konservatif adalah berbasis pada profesi dan pekerjaan. Orang yang bekerja secara bebas (*freelance*) dan tidak masuk ke dalam perusahaan atau serikat pekerja tertentu, tidak mendapatkan jaminan proteksi. Demikian juga dengan ibu rumah tangga. Asuransi dan layanan bias kepada laki-laki sebagai orang yang bekerja mencari nafkah. Desain demikian, secara teoretis akan menghasilkan tingkat stratifikasi sedang. Negara memang mewajibkan perusahaan dan individu untuk berkontribusi dengan memotong bagian dari penghasilan untuk kontribusi layanan sosial. Manfaat yang diterima tergantung kepada jumlah kontribusi yang diberikan, sehingga kebijakan ini tidak akan mengurangi kesenjangan atau lapisan sosial secara drastis. Orang dengan penghasilan tinggi akan menikmati layanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dengan penghasilan menengah dan rendah.

Model Sosial Demokrat

Model negara kesejahteraan sosial demokrat dipraktikkan di negara-negara Skandinavia (Denmark, Swiss, Finlandia, Norwegia). Ciri penting dari model ini adalah tingkat dekomodifikasi yang tinggi. Orang

tidak bergantung pada pasar tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, uang pensiun, dan sebagainya). Negara bertindak sebagai penyedia layanan sosial. Semua kebutuhan dasar dipenuhi oleh negara. Salah satu perbedaan mendasar antara model liberal dan sosial demokrat adalah, pada model sosial demokrat layanan sosial bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Hal ini berbeda dengan model liberal di mana layanan sosial hanya diperuntukkan untuk orang dengan syarat tertentu (misalnya warga miskin). Pada negara sosial demokrat, semua orang mendapat layanan yang sama. Warga mendapatkan layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Di negara-negara dengan model liberal, penerima layanan sosial sering dicap dengan stereotipe buruk (seperti miskin, kurang mampu, dan sebagainya). Stereotipe ini tidak akan muncul pada model sosial demokrat, karena layanan sosial ini diterima oleh semua warga, tanpa kecuali.

Selain bersifat universal, layanan sosial juga menjangkau semua aspek. Pada negara kesejahteraan model liberal atau konservatif, layanan sosial ini umumnya terbatas pada uang pensiun, kesehatan, dan pendidikan. Pada negara dengan model sosial demokrat, layanan sosial sangat luas, termasuk bantuan kehamilan hingga perawatan anak. Layanan sosial juga mencakup uang pengangguran. Mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan atau diberhentikan dari pekerjaan, akan mendapatkan bantuan uang sampai mendapat pekerjaan. Negara juga terlibat aktif untuk membantu warga mendapat pekerjaan (dari mulai memberikan pelatihan, pendidikan hingga memberikan kesempatan kerja). Negara-negara ini ditandai oleh tingkat tenaga kerja penuh (*full employment*). Hampir semua orang bekerja atau mendapat pekerjaan.

Pembiayaan layanan sosial bersumber paling utama dari pajak. Ini perbedaan mendasar antara model sosial demokrat dan model konservatif, di mana pada model konservatif pembiayaan utamanya dari kontribusi pekerja. Karena layanan sosial bersifat universal dan memenuhi banyak aspek, pajak di negara-negara yang menganut model

ini sangat tinggi. Angkanya berkisar 50%. Artinya, hampir separuh dari penghasilan warga negara dipotong untuk pajak. Selain pajak yang tinggi, pajak di negara-negara Skandinavia juga bersifat progresif. Orang dengan penghasilan tinggi akan mendapatkan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan rendah. Dengan desain seperti ini, model negara kesejahteraan akan menghasilkan pemerataan yang baik. Tingkat kesenjangan di antara strata sosial (tinggi, menengah, dan rendah) akan mengecil. Ini konsekuensi dari penerapan pajak progresif, yang membuat warga dengan penghasilan tinggi mendapatkan bagian potongan pajak lebih besar.

PERBEDAAN MODEL

Pembagian model negara kesejahteraan yang dibuat oleh Esping-Andersen (1990), mendapat beberapa kritik. Ada tiga kritik utama. Pertama, pembagian didasarkan pada tipe ideal. Esping-Andersen membangun terlebih dahulu tipe ideal, dan kemudian memverifikasi model yang dibuat dengan data (lihat Aspalter, 2018). Kecenderungan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang Esping-Andersen sebagai seorang sosiolog. Kelemahannya, dengan membangun tipe ideal terlebih dahulu, kerap ada beberapa negara yang secara model masuk dalam kategori tertentu tetapi tidak sesuai dengan data. Kedua, terdapat beberapa anomali berupa pencampuran karakteristik dari model. Ada beberapa negara (seperti Belanda dan Swiss) yang tidak bisa dikelompokkan berdasar kategori yang ada (lihat Arts & Gelissen, 2002). Di satu sisi kedua negara tersebut memenuhi syarat sebagai negara sosial-demokratis, tetapi juga menjalankan praktek korporatisme. Ketiga, pembagian tidak memasukkan beberapa negara mediterania, seperti Spanyol, Portugal, Italia dan Yunani.

Sejumlah ahli mengajukan pembagian lain sebagai alternatif dari pembagian negara kesejahteraan yang ditawarkan oleh Esping-Andersen.

Tabel di bawah ini merangkum pembagian negara kesejahteraan dari berbagai ahli. Ada ahli yang membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga hingga lima kelompok. Dari tabel ini terlihat, pembagian dari berbagai ahli ini tidak meruntuhkan atau membatalkan pembagian klasik dari Esping-Andersen. Untuk memudahkan pemetaan yang dibuat oleh para ahli, Arts & Gelissen (2002) membagi pengelompokan ke dalam tipe I hingga III. Pengelompokan negara kesejahteraan Tipe I-III, dengan nama yang berbeda, mengukuhkan kategori yang dibuat Esping-Andersen. Perbedaan hanya terletak pada tipe IV dan V, di mana kedua tipe ini merupakan kategori negara kesejahteraan yang tidak tercakup dalam pembagian yang dibuat oleh Esping-Andersen.

Tabel 7.1. Model-Model Negara Kesejahteraan

MODEL	TIPE				
	I	II	III	IV	V
Esping-Andersen (1990)	1. Liberal: Dekomodifikasi tingkat rendah; diferensiasi pasar kesejahteraan	2. Konservatif : Tingkat dekomodifikasi sedang; manfaat sosial terutama tergantung pada kontribusi dan status sebel-umnya	3. Sosial-demokratis: Dekomodifi-kasi tingkat tinggi; manfaat universal dan persamaan manfaat tingkat tinggi		
	Australia; Kanada; Amerika; Selandia Baru; Irlandia: Inggris Raya	Italia; Jepang; Prancis; Jerman; Swiss	Denmark; Fin-landia; Norwegia; Swedia		
Leibfried (1992)	1. Anglo–Saxon (Residual): Hak atas transfer pendapatan; negara kese-jahteraan sebagai kompensasi upaya terakhir dan penegakan kerja yang ketat di pasar	2. Bismarck (Institusional): Hak atas jaminan sosial; kesejahter-aan negara se-bagai kompensasi pilihan terakhir	3. Skandinavia (Modern): Hak bekerja untuk semua orang; universalisme; kesejahteraan negara sebagai pilihan pertama	4. Latin Rim (Rudimentary): Hak untuk bekerja dan mendapatkan kesejahteraan; negara kese-jahteraan sebagai institusionalisasi harapan	

MODEL	TIPE				
	I	II	III	IV	V
	Australia; Amerika; Selandia Baru; Inggris	Jerman; Austria	Denmark; Finlandia; Norwegia; Belgia	Spanyol; Portugal; Italia; Yunani; Prancis	
Castles & Mitchell (1993)	1. Liberal: Pengeluaran sosial rendah dan tidak ada adopsi instrumen pemerataan dalam kebijakan sosial	2. Konservatif: Pengeluaran sosial tinggi, sedikit penerapan instrumen penyetaraan dalam sosial	3. Hegemoni Non-Kanan: Pengeluaran sosial tinggi; adanya penggunaan instrumen pemerataan yang tinggi dalam kebijakan sosial		4. Radikal: Pencapaian kesetaraan pendapatan sebelum pajak, pendapatan sebelum transfer (adopsi pemerataan instrumen dalam kebijakan sosial), tetapi sedikit pengeluaran sosial
	Irlandia; Jepang; Amerika; Swiss	Jerman; Italia; Belanda	Denmark; Finlandia; Norwegia; Belgia		Australia; Selandia Baru; Inggris
Ferrera (1996)	1. Anglo–Saxon: Cakupan negara kesejahteraan yang cukup tinggi; bantuan sosial dengan syarat tertentu; sistem pembiayaan campuran; kerangka organisasi yang sangat terintegrasi; seluruhnya dikelola oleh administrasi publik	2. Bismarck: hubungan yang kuat antara posisi kerja (dan/atau status keluarga) dan hak sosial; manfaat sebanding dengan pendapatan; pembiayaan melalui iuran; skema asuransi terutama diatur oleh serikat pekerja dan organisasi pemberi kerja	3. Skandinavia: perlindungan sosial sebagai hak kewarganegaraan; cakupan universal; manfaat tetap untuk berbagai risiko sosial; pembiayaan terutama melalui pendapatan fiskal; integrasi organisasi kuat	4. Selatan: sistem jaminan pendapatan yang terfragmentasi terkait dengan posisi kerja; manfaat yang luas tanpa jaringan perlindungan sosial minimum; perawatan kesehatan sebagai hak kewarganegaraan; partikularisme dalam pembayaran manfaat tunai pembiayaan melalui iuran dan pendapatan fiskal	
	Inggris; Irlandia	Jerman; Prancis; Belgia; Belanda; Luxemburg; Austria; Swiss	Swedia; Finlandia; Norwegia; Denmark	Italia; Spanyol; Yunani; Portugal	

MODEL	TIPE				
	I	II	III	IV	V
Bonoli (1997)	1. Inggris: Persentase rendah dari pengeluaran sosial yang dibiayai melalui kontribusi (Beveridge); persentase pengeluaran sosial yang rendah dari PDB	2. Kontinental: Persentase pengeluaran sosial yang tinggi yang dibiayai melalui kontribusi (Bismarck); persentase pengeluaran sosial yang tinggi dari PDB	3. Nordik: Persentase rendah dari pengeluaran sosial yang dibiayai melalui iuran (Beveridge); persentase pengeluaran sosial yang tinggi dari PDB	4. Selatan: Persentase pengeluaran sosial yang tinggi yang dibiayai melalui kontribusi (Bismarck); persentase pengeluaran sosial yang rendah dari PDB	
	Inggris; Irlandia	Belanda; Prancis; Belgia; Luxemburg; Jerman	Swedia; Finlandia; Norwegia; Denmark	Italia; Swiss; Spanyol; Yunani; Portugal	
Korpi & Palme (1998)	1. Keamanan Dasar: Hak berdasarkan kewarganegaraan atau kontribusi; penerapan tarif tetap	2. Korporatis: Hak berdasarkan kategori pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja; penggunaan prinsip manfaat terkait laba	3. Encompassing: Hak berdasarkan kewarganegaraan dan partisipasi angkatan kerja; penggunaan prinsip terkait pendapatan		4. Ditargetkan: Kelayakan berdasarkan syarat tertentu; penggunaan prinsip manfaat minimum
	Kanada; Denmark; Belanda; Selandia Baru; Swiss; Irlandia; Inggris	Jerman; Italia; Jepang; Belgia; Prancis; Austria	Swedia; Finlandia; Norwegia		Australia

Sumber: Arts & Gelissen (2002)

Tabel di atas juga menegaskan bahwa tiga tipe negara kesejahteraan (liberal, korporatisme, dan sosial-demokrat) tetap relevan digunakan. Uraian di bawah ini akan mengulas lebih lanjut karakteristik penting dari tipe negara kesejahteraan.

Redistribusi Kekayaan

Salah satu perbedaan penting di antara model negara kesejahteraan adalah redistribusi kekayaan. Pada sistem liberal, tidak terjadi redistribusi kekayaan. Hal ini karena pasar menjadi pengendali hubungan di antara individu. Setiap orang bisa bersaing secara besar di pasar, dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya lewat pasar.

Negara tidak ikut campur tangan terhadap bekerjanya pasar. Hal ini berbeda dengan sistem sosial demokrat, di mana negara ikut campur tangan agar jurang kesenjangan penghasilan masyarakat tidak tinggi. Salah satu instrumen tersebut adalah melalui perpajakan. Negara sosial demokrat umumnya menerapkan perpajakan progresif, di mana warga berpenghasilan tinggi akan membayarkan pajak lebih besar dibandingkan dengan warga berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dalam jangka panjang akan menciptakan redistribusi kekayaan.

Privatisasi

Privatisasi merujuk kepada sejauh mana keterlibatan pihak swasta (privat) dalam pemenuhan kebutuhan warga. Negara liberal membolehkan masuknya swasta dalam layanan publik, seperti pengelolaan dana pensiun, asuransi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Negara dengan tipe liberal juga mendorong swasta untuk membangun sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan sebagainya. Sektor swasta ini bisa bersaing secara sehat dengan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah. Warga memiliki kebebasan untuk memilih, apakah cenderung menggunakan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah ataukah oleh lembaga swasta. Karena itu gejala privatisasi ini cenderung tinggi pada tipe negara kesejahteraan liberal.

Hal yang berbeda berlaku pada negara kesejahteraan sosial-demokrat. Pada negara kesejahteraan ini, layanan publik disediakan oleh negara. Pemerintah membangun taman, sekolah, rumah sakit, tempat bermain anak, sekolah hingga perguruan tinggi. Dana hasil pajak dipergunakan untuk membangun berbagai fasilitas dan layanan publik yang tersedia secara bebas (gratis) bagi warga. Negara juga mengelola dana asuransi pensiun dan asuransi pengangguran. Dengan praktik semacam ini, privatisasi di negara kesejahteraan sosial-demokrat cenderung lemah atau rendah. Sementara untuk negara konservatif (korporatis), kecenderungan privatisasi adalah sedang. Pada negara ini, asuransi dikelola oleh perusahaan

atau serikat pekerja. Mereka bekerja sama dengan perusahaan asuransi (bisa perusahaan asuransi swasta) untuk mengelola dana karyawan.

Pajak dan Pembiayaan Layanan Sosial

Karakteristik penting dari negara kesejahteraan adalah pajak dan sumber pendapatan. Pengelolaan negara kesejahteraan membutuhkan dana yang sangat besar. Hal ini karena semua kebutuhan warga (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pensiun dan sebagainya) disediakan oleh negara. Sumber utama pembiayaan diperoleh dari pajak, iuran, dan kontribusi. Penting untuk membedakan tiga konsep pokok: pajak, kontribusi dan iuran. Pajak adalah dana yang diberikan oleh warga kepada negara tanpa adanya imbalan secara langsung. Iuran adalah dana yang dipotong karena adanya manfaat langsung--seperti iuran sampah, iuran parkir, dan sebagainya. Sementara kontribusi adalah dana (uang) yang dipotong yang manfaatnya akan kembali di masa mendatang. Misalnya, potongan gaji yang manfaatnya akan diberikan setelah pensiun. Besarnya manfaat sesuai dengan besarnya gaji yang dipotong.

Pada negara kesejahteraan dengan model konservatif (korporatis), pendanaan untuk layanan sosial utamanya bersumber dari iuran dan kontribusi. Kontribusi ini berasal dari gaji karyawan yang dipotong tiap bulan dan kontribusi perusahaan. Dana tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan terutama untuk layanan asuransi dan uang pensiun. Besarnya uang pensiun tergantung kepada besarnya kontribusi yang diberikan.

Sementara, pada negara kesejahteraan model liberal dan sosial-demokrat, sumber pendanaan utamanya berasal dari pajak, terutama pajak langsung (misalnya pajak penghasilan, pajak kepemilikan, dan pajak warisan). Dari penghasilan yang diterima (gaji dan penghasilan lain), negara mengambil pajak, yang hasilnya kemudian dikelola untuk pembiayaan layanan sosial. Yang membedakan negara liberal dan sosial-demokrat adalah pada besarnya pajak. Besarnya pajak penghasilan di negara liberal relatif rendah atau sedang (berkisar antara 10-25%).

Sementara di negara sosial-demokrat, pajaknya sangat tinggi. Rata-rata pajak langsung di negara Skandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark dan Norwegia) berkisar di angka 50%.

Penerima Layanan Sosial

Perbedaan utama di antara berbagai model negara kesejahteraan terletak pada sifat layanan sosial. Sifat layanan sosial pada negara sosial-demokrat adalah universalitas. Layanan pemerintah bersifat bebas (gratis) dan bisa dinikmati oleh semua warga negara. Tidak ada persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan layanan sosial. Warga bisa mendapatkan layanan gratis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pensiunan, hingga pengangguran. Tidak ada perbedaan kualitas layanan untuk setiap warga negara. Misalnya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama, dan bisa bersaing berdasar kemampuan untuk bisa diterima di kampus terbaik secara gratis.

Di titik yang berbeda adalah negara liberal. Pada negara liberal, layanan sosial yang bersifat bebas (gratis) diberikan dengan syarat khusus. Layanan tidak universal seperti pada negara sosial-demokrat. Umumnya, berbagai layanan sosial hanya diperuntukkan untuk warga miskin. Misalnya, beasiswa pendidikan hanya diberikan kepada warga yang kurang mampu. Bantuan untuk asuransi kesehatan juga hanya ditujukan kepada warga miskin. Berbagai kebijakan dan layanan sosial tersebut dibuat untuk menolong warga miskin agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ekstrem. Layanan sosial membantu warga rentan agar bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk warga di luar kriteria penerima layanan sosial, harus didapatkan dengan berbayar. Negara liberal memberi kesempatan kepada warga mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, disesuaikan dengan penghasilan masing-masing.

Jika di negara sosial demokrat, penerima layanan sosial cenderung

tinggi dan di negara liberal cenderung rendah, maka untuk negara dengan tipe korporatisme, penerima cenderung sedang. Basis dari layanan sosial di negara ini adalah pada asuransi pekerja. Negara mewajibkan karyawan dan perusahaan untuk mengalokasikan penghasilan pada asuransi. Dana asuransi ini kemudian dikelola dan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga bisa memanfaatkan pendidikan, kesehatan, hingga pensiun. Karena berbasis pada pekerja, layanan sosial kurang menyentuh warga yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, hingga karyawan *freelance* yang tidak bekerja di perusahaan tertentu.

VIII. Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Dalam berbagai karyanya, Denny JA mengharapkan Indonesia bisa menjadi negara kesejahteraan. Pertanyaan paling penting, apakah harapan tersebut realistis? Apakah mewujudkan negara kesejahteraan adalah sebuah mimpi ataukah sebuah harapan yang bisa diwujudkan?

FORMULA NEGARA KESEJAHTERAAN

Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara di Skandinavia (Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Islandia) dalam menjalankan negara kesejahteraan. Dari berbagai studi mengenai faktor yang membuat warga di Skandinavia bisa hidup bahagia karena ada 5 faktor. Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain, dan harus ada dalam satu negara jika menginginkan warganya bahagia.

H = R+D+I+2S

H = Happiness (kebahagiaan)
R = Rich (kaya, sejahtera)
D = Democracy, kebebasan warga untuk menentukan pilihan hidup
I = Institution, kelembagaan pemerintahan yang baik

S = Social services (layanan sosial)
S = Social support, dukungan sosial dan kepercayaan warga yang tinggi

Keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kaya (*rich*). Hampir mustahil, warga bisa bahagia kalau mereka tidak memiliki pendapatan yang baik. Syarat awal agar negara bisa menjadikan warganya bahagia adalah harus memiliki kekayaan. Dengan pendapatan yang cukup, warga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada level negara, negara yang kaya (diukur lewat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita) bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya, termasuk kebutuhan akan jaminan dan layanan sosial. Kedua, demokrasi. Negara yang kaya tidak otomatis menjamin warganya hidup bahagia. Ini terbukti dari banyak negara dengan PDB per kapita tinggi (seperti Taiwan, Singapura, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi) tidak menempati posisi atas dalam indeks kebahagiaan. Syarat kedua sebuah negara bisa menjamin warganya bahagia adalah adanya jaminan kebebasan warga untuk menentukan pilihan hidup. Negara memberikan kebebasan warganya untuk memilih keyakinan (agama), mengekspresikan pendapat, hingga orientasi seksual. Ini hanya mungkin terjadi pada negara dengan tingkat demokrasi yang baik. Di negara demokrasi, negara bukan hanya menjamin kebebasan individu. Lebih jauh, negara juga memproteksi warga dari upaya warga lain yang mengganggu kebebasan warga lain. Di negara demokrasi, warga lebih bahagia karena warga bisa bebas tanpa rasa takut memilih apa yang diinginkan dan membuat bahagia, tanpa takut dihukum dan didiskriminasi oleh warga lain.

Ketiga, kelembagaan (institusi). Demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak didukung oleh kelembagaan yang baik. Banyak negara yang telah menjalankan praktik demokrasi prosedural (misalnya adanya pers yang bebas, kebebasan berorganisasi, hingga adanya pemilihan umum yang bebas dan adil). Hanya saja, banyak di antara negara demokrasi tersebut yang belum berhasil menjalankan demokrasi

substansial, seperti praktik hukum yang adil, birokrasi yang melayani warga, hingga pemerintahan bebas korupsi. Syarat penting sebuah negara bisa membahagiakan warganya adalah adanya kelembagaan yang baik dari institusi negara. Ibarat sebuah rumah tangga, seorang anak akan lebih bahagia jika tinggal di keluarga yang melayani anak-anaknya dengan baik. Dalam konteks negara, warga membutuhkan pemerintahan yang bersih (bebas korupsi), birokrasi yang bekerja dengan cepat, dan hukum yang adil. Kelembagaan negara yang kuat dan bersih membuat warga cenderung percaya pada institusi politik, dan pada akhirnya akan berujung pada tingkat kebahagiaan warganya. Hampir mustahil, warga di suatu negara bisa bahagia di sebuah negara dengan pemerintahan yang korup, praktik hukum yang tidak adil, dan birokrasi yang tidak melayani warga.

Keempat, layanan sosial (*social services*). Pengalaman negara-negara dengan indeks kebahagiaan yang tinggi mengajarkan bahwa warga akan bisa bahagia tinggal di sebuah negara dengan standar layanan sosial yang baik. Layanan sosial ini meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua (pensiun), jaminan ketika tidak mendapat pekerjaan (asuransi pengangguran), dan sebagainya. Di negara-negara Skandinavia, layanan tersebut bukan hanya bebas (gratis) tetapi juga dengan kualitas yang baik. Warga bisa memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar hingga tinggi, secara bebas (gratis). Ketika sakit, warga juga mendapat layanan kesehatan secara bebas (gratis) dengan fasilitas kesehatan yang baik. Di hari tua, warga tidak perlu gelisah, karena akan mendapatkan tunjangan hari tua sehingga bisa menjalani masa tua dengan baik. Bahkan, ketika warga tidak mendapat pekerjaan karena satu dan lain hal, warga juga tidak gelisah. Pemerintah akan memberikan tunjangan pengangguran dengan nilai hampir setara dengan gaji yang diterima saat bekerja. Tunjangan itu akan diberikan sampai ia mendapat pekerjaan baru. Kita dengan mudah mencari kaitan antara layanan sosial dan kebahagiaan. Dengan layanan sosial yang luas dan baik, warga akan terjamin kehidupannya. Warga tidak lagi ketakutan menghadapi kesulitan dan masalah yang ada dalam hidupnya.

Kelima, dukungan sosial (*social support*). Layanan sosial umumnya membutuhkan dukungan sosial. Negara yang memberikan layanan sosial secara luas, membutuhkan dukungan dari warga. Hal ini karena layanan sosial adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Layanan sosial membutuhkan biaya yang sangat besar, dan biaya itu sebagian besar bersumber dari pajak. Di negara-negara Skandinavia, besarnya pajak penghasilan berkisar 50%. Artinya, separuh dari penghasilan warga harus direlakan untuk pajak. Ini membutuhkan kesadaran akan bekerja secara bersama-sama dan mengatasi masalah bersama-sama (gotong royong). Warga rela berkorban dengan cara gajinya dipotong separuhnya untuk membantu negara dalam memberikan layanan sosial. Adanya dukungan sosial menjadi syarat penting dari terwujudnya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan kurang cocok di negara-negara dengan tipe individualis, di mana warganya kurang mau berkorban untuk membantu sesamanya.

DI MANA POSISI INDONESIA?

Lima syarat di atas menjadi formula jika sebuah negara (termasuk Indonesia) ingin menjadi negara kesejahteraan dengan model Skandinavia. Kelima syarat tersebut harus hadir secara bersama-sama. Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia bisa menjadi negara kesejahteraan, kita bisa melihat sejauh mana posisi Indonesia dalam mengejar lima syarat di atas.

Kondisi Ekonomi yang Maju

Negara kesejahteraan tidak mungkin diwujudkan jika negara tersebut tidak memiliki pendapatan yang baik. Mirip dengan kehidupan sehari-hari, di mana orang tidak mungkin bisa bahagia jika tidak memiliki cukup uang. Demikian juga negara. Negara tidak akan bisa membahagiakan warganya jika tidak memiliki pendapatan yang tinggi.

Pendapatan ini diukur lewat pendapatan per kapita. Pendapatan Per Kapita (GDP per kapita) adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita suatu negara dihitung dengan membagi jumlah pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Negara-negara Skandinavia adalah negara yang kaya. Ini ditandai oleh pendapatan per kapita yang tinggi. Tabel di bawah ini menyajikan data pendapatan per kapita negara-negara Skandinavia dan perbandingannya dengan Indonesia. Rata-rata negara Skandinavia memiliki pendapatan per kapita per tahun sebesar US$60 ribu atau 900 juta/tahun. Jika dibagi per bulan, pendapatan rata-rata warga adalah Rp75 juta. Sementara kondisi pendapatan per kapita di Indonesia masih timpang. Pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar US$4 ribu atau sekitar Rp65 juta per tahun. Jika dibagi per bulan, pendapatan rata-rata warga adalah Rp5 juta. Jika dibandingkan, pendapatan per kapita di negara Skandinavia 15 kali lipat lebih besar dibandingkan Indonesia.

Selain memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, negara-negara Skandinavia juga memiliki kesenjangan pendapatan yang relatif rendah. Perbedaan pendapatan di antara warga tidak terlalu tinggi. Kesenjangan pendapatan dalam banyak studi memiliki hubungan dengan tingkat kebahagiaan warga negara. Negara dengan kesenjangan yang rendah bisa membuat warganya tidak saling curiga. Kesenjangan ini bisa diukur lewat Indeks Gini atau Koefisien Gini. Indeks ini mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 (0%) sampai 1 (100%). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan. Indeks gini di negara-negara Skandinavia kurang dari 0.3. Sementara indeks gini Indonesia mencapai hampir 0.4.

Tabel 8.1. Perbandingan Indikator Ekonomi Negara Skandinavia dan Indonesia

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
DEMOGRAFI						
Penduduk	5,789,957	5,515,525	352,722	5,311,916	10,175,214	275,770,000
Luas wilayah (meter persegi)	41,990	303,910	100,250	365,123	407,310	1,9 juta
Kepadatan penduduk (per km persegi)	138.1	18.2	3.5	14.6	25	143,86
EKONOMI						
GDP per kapita ($)	68.007	53.654	68.727	89.154	61.028	4.332
GNI per kapita ($)	68.300	53.510	63.460	83.880	59.540	4.180
Inflasi	0.80%	1.10%	2.70%	2.80%	2.00%	6.0
KESEJAHTERAAN						
Tingkat ketenagakerjaan (Employment rate)	75.40%	72.10%	85.10%	74.80%	77.50%	
Rasio penduduk yang bekerja dengan total penduduk usia kerja						
Pengeluaran pemerintah (% GDP)	51.50%	53.10%	41.70%	48.70%	49.90%	
Eksport (% GDP)	59.7	39.4	38.2	41.6	45.5	21.6
Hutang pemerintah (% GDP)	48.00%	69.20%		45.50%	58.40%	44.4%
Persentase pekerjaan di sektor publik (dari total pekerjaan)	75.40%	72.10%	85.10%	74.80%	77.50%	
KETIMPANGAN						
Gini	0.275	0. 271	0.261	0. 277	0. 289	0.379
Penduduk miskin (pengel-uaran di bawah $2,15 per hari)	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	2.5

Keterangan: Data negara Skandinavia dikutip dari Deloitte (2021); data Indonesia diolah dari Bank Dunia (https://databank.worldbank.org/country/IDN/556d8fa6/Popular_countries)

Luasnya Cakupan Layanan Sosial

Negara Skandinavia adalah model negara kesejahteraan sosial demokrat yang ditandai oleh luasnya program kesejahteraan. Negara-negara ini tidak hanya menggratiskan atau membuat sangat mudah dijangkau aneka fasilitas untuk umum: pendidikan, kesehatan, perumahan, tunjangan pengangguran, jaminan hari tua, pensiun, bahkan bantuan untuk bayi yang lahir, bantuan hiburan untuk para senior, usia lanjut. Luasnya cakupan *Welfare Program Nordic Model* ini membuatnya disebut *generous welfare state*. Selain luasnya cakupan layanan sosial yang diberikan, model negara Skandinavia dicirikan oleh sifat universalitas. Artinya, layanan sosial tersebut terbuka untuk semua orang tanpa harus ada persyaratan khusus. Semua warga bisa mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, penitipan anak, pensiun, pengangguran, dan sebagainya.

Tabel di bawah ini menyajikan cakupan layanan sosial yang diberikan oleh negara-negara Skandinavia. Kita bisa membandingkan data negara Skandinavia tersebut dengan Indonesia. Layanan sosial di Indonesia selama ini sudah diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial gratis. Layanan sosial ini tidak bersifat universal, hanya diberikan kepada warga dengan kriteria khusus--dalam hal ini adalah warga miskin. Untuk layanan pendidikan, program ini berupa bantuan uang tunai yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Uang tunai tersebut dapat mereka gunakan untuk membayar iuran sekolah, membeli buku, membeli seragam, membeli alat tulis, dan lainnya.[1] Layanan kesehatan di Indonesia diberikan lewat bantuan pemerintah kepada warga miskin, dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan (Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Melalui program ini, warga miskin bisa

1. Penerima PIP di jenjang sekolah dasar (SD) mendapatkan bantuan dana sebesar Rp450.000 per tahun, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp750.000 per tahun, dan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar Rp1.000.000. Pada tahun 2022, total penerima PIP berjumlah 17,9 juta siswa Program ini telah berhasil mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses warga miskin pada pendidikan. Meski demikian, program ini memiliki beberapa kelemahan: keterlambatan memasukkan data penerima, salah sasaran, atau hambatan pencairan dana (https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=26572)

mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan secara gratis.[2] Dari tabel ini terlihat, kondisi Indonesia masih jauh untuk mengejar apa yang dilakukan negara Skandinavia.

Tabel 8.2. Perbandingan Cakupan Layanan Sosial Negara Skandinavia dan Indonesia

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
LAYANAN SOSIAL						
Penitipan anak	Membayar 25% tergantung provinsi	Gratis	Gratis	Membayar 25% tergantung provinsi	Gratis	Tidak ada
Pendidikan	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Pendidikan gratis (jenjang dasar hingga menengah) hanya diberikan kepada warga dengan syarat khusus (warga miskin).
Kesehatan	Gratis	Gratis	Sebagian besar gratis: biaya tetap dasar berlaku untuk perawatan kesehatan primer	Sebagian besar gratis: biaya tetap dasar berlaku untuk perawatan kesehatan primer	Sebagian besar gratis: biaya tetap dasar berlaku untuk perawatan kesehatan primer	Asuransi kesehatan gratis hanya diberikan kepada warga dengan syarat khusus (warga miskin).
ASURANSI PENGANGGURAN						
Sifat	Sukarela	Sukarela	Wajib	Wajib	Keduanya (sukarela dan wajib)	Tidak ada
Periode pemberian	24 bulan	24 bulan	18 bulan	24 bulan	11 bulan	Tidak ada
Besarnya asuransi	Maksimal 90% dari gaji sebelumnya	Antara 48-69% tergantung pada level gaji	Maksimal 70% dari gaji sebelumnya	Maksimal 62% dari gaji sebelumnya	Maksimal 80% dari gaji sebelumnya	Tidak ada

2. Program ini menjamin 96,8 juta masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini mampu menghindarkan masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat membayar biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik yang notabene berbiaya tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Program ini telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, program juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah (https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/783/Silaturahmi-Presiden-RI-dengan-Peserta-Penerima-Manfaat-Jaminan-Kesehatan-Nasional-Kartu-Indonesia-Sehat-JKN-KIS).

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
ASURANSI PENSIUN						
Umur pensiun	65	63	67	67	65	Privat, hanya kepada pegawai negeri sipil. Tidak berlaku ke semua warga
Besarnya uang pensiun (persentase, setelah pajak)	44%	26%	55%	41%	28%	Privat, hanya kepada pegawai negeri sipil. Tidak berlaku ke semua warga

Keterangan: Data negara Skandinavia dikutip dari Deloitte (2021)

Pajak Tinggi

Layanan sosial dengan cakupan luas (pendidikan, kesehatan, pensiun, hingga pengangguran) dan universal (diterima oleh semua orang), tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari mana sumber pembiayaan layanan sosial di negara Skandinavia? Sebagian besar bersumber dari pajak. Ini yang membedakan negara Skandinavia dengan negara-negara di Timur Tengah atau negara Brunei Darussalam yang membiayai layanan sosial dari penjualan minyak bumi. Di negara Skandinavia, pajak penghasilan sangat tinggi. Besarnya pajak penghasilan di negara Skandinavia antara 45-60%. Selain pajak yang tinggi, negara di Skandinavia umumnya juga mempraktikkan pajak progresif. Artinya, warga dengan penghasilan tinggi, akan mendapatkan beban pajak yang lebih besar. Negara kesejahteraan Skandinavia sering pula disebut Robin Hood modern yang dilegalkan. Itu karena negara memungut pajak yang besar, terutama dari orang kaya, untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Pajak yang diperoleh oleh negara kemudian didistribusikan dalam berbagai pengeluaran layanan sosial.

Tabel berikut ini menyajikan perbedaan pajak di negara Skandinavia dan Indonesia. Di Indonesia, pajak penghasilan berkisar antara 5% hingga 30% tergantung jumlah penghasilan. Penghasilan sampai 60 juta per tahun, besarnya pajak adalah 5%. Pajak paling besar (35%) dibebankan kepada warga dengan penghasilan di atas

Rp5 miliar setahun. Dengan pajak yang besar, negara Skandinavia mampu mengalokasikan pengeluaran untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain. Untuk kesehatan, rata-rata negara Skandinavia mengalokasikan antara 13-19% dari total GDP. Sementara Indonesia sekitar 10%.

Tabel 8.3. Perbandingan Pajak Negara Skandinavia dan Indonesia

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
Pajak personal (penghasilan)	55.9	49.1	44.4	46.4	55.2	Antara 5-35%, tergantung jumlah peng-hasilan
Penerimaan pajak (% GDP)	35.5	20.6	21.6	26.2	27.4	9.1
Pengeluaran pemerintah (% GDP)	50.80	55.84	49.33	48.29	49.43	
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% GDP)	6.4	5.9	7.7	5.9	7.2	3.5
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	18.17	13.69	16.34	17.55	18.79	10.10

Keterangan: Data negara Skandinavia dikutip dari Deloitte (2021); data Indonesia diolah dari Bank Dunia (https://databank.worldbank.org/country/IDN/556d8fa6/Popular_countries)

Demokratis

Negara Skandinavia juga ditandai oleh penerapan demokrasi. Negara-negara ini bukan hanya makmur, tetapi juga demokratis. Negara Skandinavia juga ditandai oleh penerapan demokrasi secara penuh (*full-democracy*). Di sana, tak hanya diselenggarakan pemilu reguler yang bersih dan terbuka. Dalam sistem *full democracy*, hak asasi manusia juga dilindungi. Warga negara bebas memilih gaya hidupnya sendiri, sejauh tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan soal gaya hidupnya kepada orang lain. Orientasi seksual tertentu (seperti LGBT) juga dibiarkan hidup di sana. Pernikahan sesama jenis itu dilegalkan di negara Swedia,

Finlandia, dan juga Norwegia. Tentu saja tetap ada warga di sana yang tak setuju pernikahan sejenis. Mereka yang tak setuju dibolehkan, tapi mereka tak bisa melarang warga lain yang setuju *same sex marriage*.

Tingkat demokrasi yang tinggi di negara Skandinavia tercermin dari berbagai indeks demokrasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga (lihat tabel). Seluruh negara Skandinavia (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Islandia) menempati posisi 10 besar dalam indeks demokrasi yang dilakukan oleh *The Economist*. Hasil yang sama juga dikukuhkan oleh indeks sejenis yang dibuat oleh *Association for Development and Advancement of the Democracy*. Kecuali Islandia, negara-negara Skandinavia menempati posisi atas sebagai negara dengan tingkat kebebasan pers terbaik di dunia. Kita bisa bandingkan tingkat demokrasi di Skandinavia ini dengan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi masih dalam taraf prosedural, yang ditandai oleh pelaksanaan pemilu dan adanya lembaga-lembaga perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tetapi demokrasi di Indonesia belum terlembaga dalam bentuk toleransi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Dari indeks demokrasi yang dilakukan oleh berbagai negara, Indonesia berada di ranking 50 ke atas.

Tabel 8.4. Perbandingan Indeks Demokrasi Negara Skandinavia dan Indonesia

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
Indeks Kebebasan Pers (RSF, 2022)	3	5	18	1	4	108
Indeks Demokrasi (The Economist, 2022)	6	5	3	1	4	54
Indeks Demokrasi (Association for Development and Advancement of the Democracy, 2022)	5	4	Tidak ada data	1	3	68

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
Indeks Kualitas Demokrasi (Universität Würzburg, 2022)	1	3	15	2	4	77

Sumber: ***Reporters Without Borders (2022);*** *Economist Intelligence Unit (2022); Association for Development and Advancement of the Democracy (2022); Universität Würzburg (2022).*

Kelembagaan

Negara-negara di Skandinavia bukan hanya demokratis tetapi juga mempunyai kelembagaan yang baik. Ini dicerminkan lewat birokrasi yang sederhana, perlakuan atas hukum yang setara, dan bebas korupsi. Kualitas kelembagaan yang sangat baik di negara-negara Skandinavia tercermin dari hasil indeks yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Aspek penting dari kelembagaan adalah bebas korupsi. Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Transparency International selalu menempatkan negara-negara Skandinavia di posisi atas. Sebanyak 4 negara Skandinavia (Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia) menempati posisi 5 besar sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi. Negara-negara Skandinavia sejak lama terkenal sebagai negara yang bebas dari korupsi. Kualitas kelembagaan juga tercermin dari birokrasi. Negara di Skandinavia juga terkenal sebagai negara dengan transparansi bisnis terbaik di dunia. Ini dibuktikan dari berbagai indeks mengenai kemudahan bisnis dan kebebasan ekonomi yang selalu menempatkan Skandinavia di posisi atas (20 besar terbaik).

Kita bisa bandingkan kondisi negara Skandinavia ini dengan Indonesia. Untuk indeks persepsi korupsi, Indonesia berada di posisi 110 negara di dunia. Ini menandakan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Indeks kebebasan ekonomi dan kemudahan berusaha/ bisnis, juga menempatkan Indonesia di posisi di atas 50 besar. Data ini menggambarkan, Indonesia belum mempunyai kelembagaan yang kuat. Birokrasi di Indonesia masih menghadapi masalah seperti ruwetnya perizinan, dan tidak transparan.

Tabel 8.5. Perbandingan Indeks Kelembagaan Negara Skandinavia dan Indonesia

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International), 2022	1	2	14	4	5	110
Indeks Kebebasan Ekonomi (The Heritage Foundation, 2023)	9	11	19	12	10	60
Global entrepreneur-ship index (GEDI, 2020)	4	11	7	24	10	75
Best countries for business (Forbes, 2018)	7	13	26	15	2	60
Ease of doing Business (World Bank, 2020)	4	20	26	9	10	73

Sumber: Transparency International (2022); The Heritage Foundation (2023); The Global Entrepreneurship and Development Institute (2020); Forbes (2018); World Bank (2020)

Budaya Kedermawanan dan Dukungan Sosial

Kunci lain yang menjelaskan mengapa negara Skandinavia bisa membuat warganya bahagia adalah di negara-negara tersebut memiliki budaya kolektivisme yang tinggi. Sesama warga memiliki kepercayaan sosial yang tinggi. Warga juga saling mendukung jika ada warga lain yang kesulitan. Tidak kalah pentingnya adalah budaya derma, berupa karitas atau tolong menolong dengan memberikan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan. Budaya kolektivisme ini bisa membuat warga bahagia. Ini menjelaskan mengapa indeks kebahagiaan kurang tinggi di negara-negara dengan tipe individualistik. Di negara-negara yang warganya individualistik, sesama warga saling bersaing dan curiga satu sama lain. Ini membuat warga selalu berada dalam suasana tegang dan berakit menjadi kurang bahagia.

Tabel berikut ini menunjukkan dukungan sosial dan kedermawanan negara-negara di Skandinavia. Untuk dukungan sosial, tiga negara Skandinavia (Denmark, Finlandia, dan Islandia) menempati posisi tiga besar. Sementara Indonesia berada di urutan ke-82. Yang menarik adalah tingkat kedermawanan. Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia.

Tabel 8.6. Perbandingan Indeks Budaya Dan Dukungan Sosial Negara Skandinavia dan Indonesia

INDIKATOR	NEGARA SKANDINAVIA					INDONESIA
	Denmark	Finlandia	Islandia	Norwegia	Swedia	
Dukungan sosial (Gallup Poll, 2022)	3	2	1	9	13	82
Tingkat kedermawanan sosial (Gallup Poll, 2022)	15	42	5	10	8	1

Sumber: Gallup Poll (2022)

IX. Membangun Model Negara Kesejahteraan Ala Indonesia

Dalam bab sebelumnya telah dibahas adanya tiga model negara kesejahteraan (liberal, konservatif/korporatisme, dan sosial demokrat). Jika Indonesia ingin mengadopsi negara kesejahteraan, model mana yang lebih cocok diterapkan di Indonesia? Dalam berbagai karyanya (buku, artikel, hingga karya populer berupa posting media sosial), Denny JA mengharapkan Indonesia bisa menjadi negara kesejahteraan sosial demokrat (Skandinavia/Nordik) yang dimodifikasi. Model negara Skandinavia adalah bentuk negara kesejahteraan yang paling ideal. Hanya saja model ini perlu disesuaikan dengan kultur dan budaya Indonesia. Pencarian mengenai model negara kesejahteraan yang khas Indonesia, mewarnai banyak tulisan Denny JA.

DARI MODEL LIBERAL KE SOSIAL DEMOKRAT

Meski tidak menyebut sebagai negara kesejahteraan, pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia sudah membayangkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Ini tercermin dari Pembukaan UUD 1945, berikut: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan*

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial……." Pembukaan UUD 1945 ini secara tegas mengamanatkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat negara kesejahteraan ini bukan hanya tercermin dari tujuan negara (Pembukaan UUD 1945), tetapi juga pada konstitusi (isi UUD 1945). Pasal-pasal dalam UUD 1945 juga mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan kepada warga miskin. Setidaknya terdapat 39 pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip dari negara kesejahteraan. Berikut pasal-pasal tersebut.

Tabel 9.1. Pasal-Pasal dalam UUD 1945 Mengenai Layanan Sosial

NO	PASAL	BUNYI PASAL
1	Pasal 27 ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2	Pasal 27 ayat 2	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3	Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
4	Pasal 28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
5	Pasal 28B ayat 1	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6	Pasal 28C ayat 1	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
7	Pasal 28C ayat 2	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
8	Pasal 28D ayat 1	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
9	Pasal 28D ayat 2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
10	Pasal 28D ayat 3	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
11	Pasal 28E ayat 1	Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
12	Pasal 28E ayat 2	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
13	Pasal 28E ayat 3	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
14	Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

NO	PASAL	BUNYI PASAL
15	Pasal 28G ayat 1	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
16	Pasal 28G ayat 2	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
17	Pasal 28H ayat 1	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
18	Pasal 28H ayat 2	Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
19	Pasal 28H ayat 3	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
20	Pasal 28H ayat 4	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
21	Pasal 28I ayat 1	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
22	Pasal 28I ayat 2	Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
23	Pasal 28I ayat 3	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
24	Pasal 28I ayat 4	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
25	Pasal 28I ayat 5	Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
26	Pasal 28J ayat 1	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
27	Pasal 31 ayat 1	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
28	Pasal 31 ayat 2	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
29	Pasal 31 ayat 3	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
30	Pasal 31 ayat 4	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
31	Pasal 31 ayat 5	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
32	Pasal 32 ayat 1	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
33	Pasal 32 ayat 2	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
34	Pasal 33 ayat 1	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
35	Pasal 33 ayat 2	Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
36	Pasal 33 ayat 3	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
37	Pasal 34 ayat 1	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
38	Pasal 34 ayat 2	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
39	Pasal 34 ayat 3	Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tidak terdapat keterangan yang eksplisit mengenai desain dan model negara kesejahteraan Indonesia. Tetapi berdasarkan praktik yang terjadi selama ini, Indonesia bisa dikategorikan menggunakan model liberal. Seperti yang disajikan pada Bab V, negara dengan model liberal ditandai oleh beberapa karakteristik. Pertama, layanan sosial bersifat terbatas, dengan syarat khusus. Pemerintah umumnya membuat berbagai macam program (seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, bantuan sosial langsung tunai, dan sebagainya) yang ditujukan kepada warga miskin. Layanan sosial, selain terbatas, juga tidak bersifat universal. Kedua, dekomodifikasi rendah. Negara tidak memberikan intervensi agar warga mendapatkan pekerjaan. Masing-masing orang harus bersaing di pasar kerja agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Intervensi negara hanya diberikan kepada kelompok khusus (seperti warga miskin, penyandang disabilitas dan sebagainya). Ketiga, derajat stratifikasi rendah. Negara tidak melakukan intervensi dan kebijakan khusus untuk mengatasi kesenjangan. Orang bisa bersaing secara bebas untuk mendapatkan kekayaan dan layanan sosial. Warga bisa mencari layanan sosial sesuai dengan tingkat pendapatan masing-masing. Karena tidak ada intervensi, kemungkinan kesenjangan akan makin membesar.
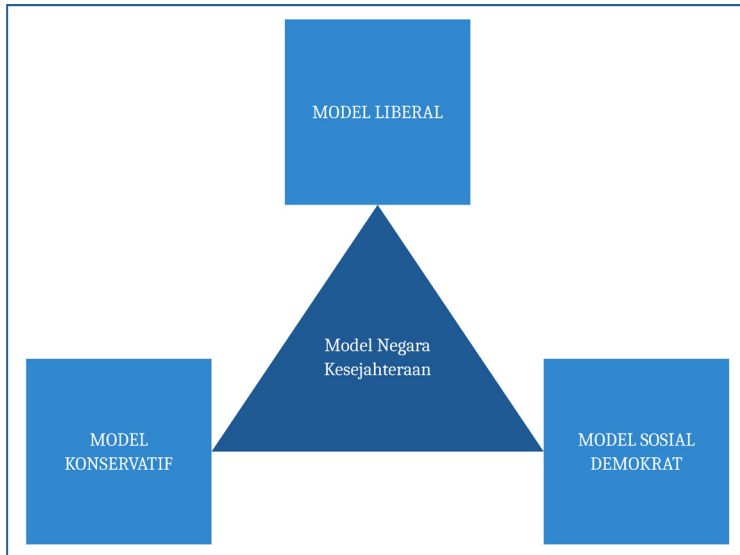
Gambar 9.1. Model Negara Kesejahteraan

Setiap pemerintahan (presiden) berusaha untuk membuat program layanan sosial. Hanya saja, layanan sosial tersebut tidak bersifat universal seperti menjadi ciri dari model sosial demokrat. Layanan sosial yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ditujukan untuk warga masyarakat miskin, agar mereka tidak jatuh dalam kemiskinan. Pola bantuan dan layanan sosial seperti ini menjadi ciri khas dari model liberal. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program layanan sosial ini diwujudkan dalam 4 pilar. Pertama, program Indonesia Pintar. Program ini berupa bantuan uang tunai yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Uang tunai tersebut dapat mereka gunakan untuk membayar iuran sekolah, membeli buku, membeli seragam, membeli alat tulis, dan lainnya. Pada tahun 2022, total penerima program berjumlah 17,9 juta siswa. Kedua, Program Indonesia Sehat. Program ini berupa bantuan pemerintah kepada warga miskin,

dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan (Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Melalui program ini, warga miskin bisa mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan secara gratis. Program ini menjamin 96,8 juta masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini mampu menghindarkan masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat membayar biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik yang notabene berbiaya tinggi. Ketiga, Program Keluarga Sejahtera. Program ini berupa bantuan pemerintah kepada warga miskin berupa beras dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT). Untuk mendapatkan program ini, warga harus terdaftar dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Total penerima KKS adalah 15,5 juta. Keempat, Program Keluarga Harapan. Program ini berupa bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin. Program ini membantu keluarga miskin agar memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.

Dalam banyak tulisannya, Denny JA menilai bahwa desain kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemimpin (presiden) belum cukup. Desain negara kesejahteraan yang dibuat (liberal) tidak mengatasi masalah laten Indonesia, yakni terjadinya jurang atau kesenjangan pendapatan warga Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam banyak kesempatan, Denny JA mengusulkan bentuk negara kesejahteraan sosial demokrat (model negara Skandinavia). Model negara kesejahteraan Skandinavia ini ditopang oleh 4 karakteristik utama. Pertama, pendapatan negara yang tinggi (diukur melalui pendapatan per kapita). Kedua, layanan sosial yang luas dan universal. Ketiga, pelaksanaan demokrasi secara penuh. Keempat, pajak yang tinggi untuk pembiayaan program layanan sosial sekaligus sebagai sarana redistribusi kekayaan.

MENGGALI PEMIKIRAN HATTA

Gagasan mengenai negara kesejahteraan sebenarnya telah muncul dalam pemikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*). Feith & Castles (1970) menggambarkan terdapat 5 aliran pemikiran utama Indonesia yang muncul sejak Indonesia merdeka, yakni komunisme, Islam, nasionalisme radikal, sosial demokrat, dan tradisi. Aliran tersebut muncul akibat terpaan dua pengaruh. Pada satu sisi adalah pengaruh Barat dan pada sisi lain adalah pengaruh tradisi (Hindu-Jawa dan Islam). Pengaruh Barat tercermin dalam pemikiran komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, dan Islam modernis. Pengaruh tradisi Hindu Jawa tercermin dari tradisionalisme dalam nasionalisme radikal, kejawaan di aliran komunisme, dan sebagian aliran Islam tradisionalis. Sementara itu tradisi Islam paling kuat menerpa Islam modernis, Islam tradisionalis, dan sosialisme demokratik.
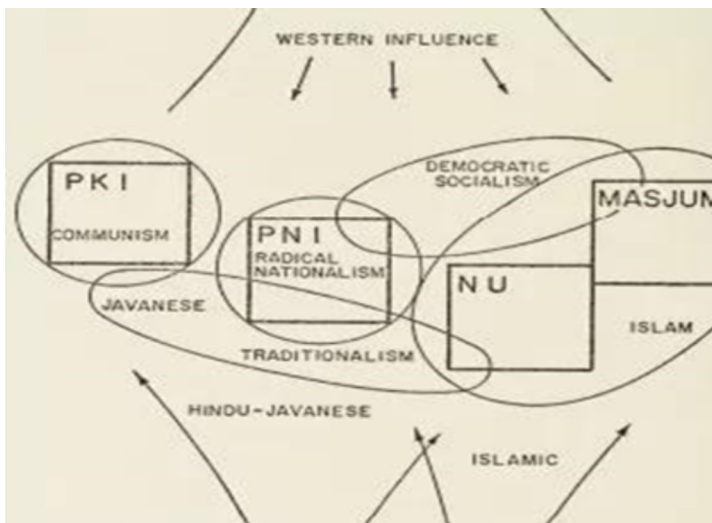
Gambar 9.2. Aliran Pemikiran di Indonesia
Sumber: Feith & Castles (1970: 14).

Salah satu aliran pemikiran yang berkembang sejak awal kemerdekaan adalah sosial demokrat. Tokoh yang banyak membawa pemikiran sosial demokrat adalah Mohammad Hatta. Hatta sendiri mengagumi negara-negara Skandinavia. Hatta mengambil studi ekonomi di Sekolah Tinggi Bisnis (Handels-Hogeschool) Rotterdam sampai meraih gelar doktor selama 11 tahun (1921-1933). Pada masa ini, Hatta menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan akademik sebagai pelajar sekaligus terlibat dalam aktivitas politik melalui Perhimpunan Indonesia (PI). Saat belajar di Belanda ini, Hatta membaca pemikiran ekonomi seperti Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, John Locke, Montesquieu, JJ Rousseau, dan sebagainya. Bacaan tersebut membuat Hatta bisa menilai kelebihan dan kelemahan dari pemikiran liberalisme dan sosialisme (komunisme). Untuk kapitalisme, Hatta melihat sisi buruk yang berwujud dalam kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Dalam tulisan yang dibuat Hatta pada tahun 1932 berjudul "Ke Arah Demokrasi Merdeka" (dikutip dari Pulungan, 2019), ia menyatakan bahwa demokrasi Barat tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Hal ini karena praktik sistem demokrasi Barat tidak dibarengi dengan sistem demokrasi ekonomi. Pada tahun 1925, saat masih kuliah di Belanda, Mohammad Hatta pernah mengunjungi Denmark dan negara-negara Skandinavia untuk mengamati perkembangan koperasi. Sistem negara di Skandinavia, dalam pandangan Hatta, cocok diterapkan di Indonesia.

Gagasan mengenai sosial demokrat ini banyak mewarnai pidato dan tulisan Hatta. Gagasan terlengkap bisa ditemukan dalam buku "Demokrasi Kita" (1980). Dalam buku ini, Hatta mengkritik sistem demokrasi Barat (individualisme-liberalisme). Kritik tersebut, dikutip selengkapnya sebagai berikut:

> *"Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan di kalangan pergerakan nasional berlainan*

dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula berupa perkembangan dari demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun dalam masyarakat sendiri.

Demokrasi barat á priori ditolak. Saat mempelajari Revolusi Prancis 1789, yang terkenal sebagai sumber demokrasi barat, ternyata trilogi "kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan" yang menjadi semboyannya tidak terlaksana dalam praktik. Itu tidak mengherankan, karena Revolusi Prancis meletus sebagai revolusi individual untuk kemerdekaan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam mewujudkannya orang lupa akan rangkaiannya dengan persamaan dan persaudaraan. Selagi Revolusi Prancis tujuannya hendak melaksanakan cita-cita sama rata sama rasa—sebab itu di sebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan—demokrasi yang dipraktikkan hanya membawa persamaan politik. Itu pun terjadi berangsur-angsur. Dalam politik hak seseorang sama dengan yang lainnya: kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, sama-sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Malahan dengan berkobarnya semangat individualisme yang dihidupkan Revolusi Prancis, kapitalisme tumbuh subur. Pertentangan kelas bertambah hebat. Di mana ada pertentangan hebat antara berbagai kepentingan, di mana ada golongan yang menindas dan ditindas, di situ sukar didapat persaudaraan. Nyatalah bahwa demokrasi semacam itu

tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia, yang hendak menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial".

Sebagai gantinya, Hatta menawarkan model sosial demokrasi ala Indonesia. Menurut Hatta (1980), paham demokrasi ini bertumpu pada tiga sumber. Pertama, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme.

Menurut Hatta, demokrasi yang dibangun haruslah sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia, yakni kolektivisme. Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal, yang dikuasai raja otokrat. Meski demikian di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat istiadat. Bukti itu menanamkan keyakinan, bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Hatta menegaskan pentingnya kolektivisme dan musyawarah. Segala hal mengenai kepentingan umum dibicarakan bersama, dan keputusan diambil dengan kata sepakat. Kebiasaan mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat melahirkan lembaga rapat di tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Semua orang dewasa di antara anggota-anggota asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu.

SOSIAL DEMOKRAT DAN ISLAM

Berdasarkan pemikiran Hatta, Denny JA kemudian menawarkan model negara kesejahteraan ala Indonesia. Model negara kesejahteraan yang dibayangkan oleh Denny JA adalah model negara kesejahteraan yang

merupakan modifikasi dari model sosial demokrat negara Skandinavia. Ada beberapa ciri yang diambil dari praktik dari negara Skandinavia, dan ada beberapa karakteristik lain yang digali dari kultur Indonesia.

Mengapa Denny JA melihat model negara kesejahteraan Nordik/ Skandinavia, sebagai model yang cocok untuk Indonesia? Karena model ini yang menjamin tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan warga, sesuai dengan tujuan didirikannya negara Indonesia. Tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan di negara Skandinavia sudah dikonfirmasi dari hasil yang konsisten berbagai lembaga pemeringkatan kebahagiaan. Sistem negara kesejahteraan adalah sistem yang paling bisa menjamin kebahagiaan warga. Dari data World Happiness Index di tahun 2022, Amerika Serikat sebagai wakil pembangunan kapitalistik hanya di peringkat ke-19. Sementara China sebagai wakil pembangunan sosialistik/komunisme hanya di peringkat ke-82. Sementara negara-negara Nordik/Skandinavia, menempati posisi atas dalam peringkat tersebut.

Dari model sosial-demokrat negara Skandinavia/Nordik, Denny JA mencirikan ada 6 ciri utama. Pertama, negara yang sangat besar sekali membiayai program kesejahteraan. Mereka tak hanya menggratiskan atau membuat sangat mudah dijangkau aneka fasilitas untuk umum: pendidikan, kesehatan, perumahan, tunjangan pengangguran, jaminan hari tua, pensiun, bahkan bantuan untuk bayi yang lahir, bantuan hiburan untuk para senior, usia lanjut. Kedua, pajak sangat tinggi. Negara kesejahteraan Skandinavia sering pula disebut Robin Hood modern yang dilegalkan. Itu karena negara memungut pajak yang besar, terutama dari orang kaya, untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Tarif pajak rata-rata di dunia sebesar 31,37%. Rata- rata Eropa: 32%. Rata-rata OECD (Amerika Serikat, Kanada, Prancis hingga Turki) adalah 41,58%. Namun di negara-negara Nordik, tarif pajak lebih tinggi dengan Denmark sebesar 55,56%, Finlandia sebesar 51,25%, Islandia sebesar 46,22%, Norwegia sebesar 47,2% dan Swedia sebesar 57% .

Ketiga, kondisi ekonomi yang maju. Pemerintah di Skandinavia (*Nordic Model*) sanggup menyediakan program kesejahteraan yang

dahsyat karena rata rata penghasilan masyarakatnya juga cukup tinggi. GDP per kapita rata rata penduduk di negara Skandinavia di tahun 2022 di atas 50 ribu USD per tahun. Jika dirupiahkan, sekitar 700 juta rupiah setahun. Atau penghasilan rata rata penduduk sekitar 60 juta rupiah sebulan. Keempat, pemerintahan di negara Skandinavia mempraktikkan demokrasi penuh (*full-democracy*). Di sana, tak hanya diselenggarakan pemilu reguler yang bersih dan terbuka. Dalam sistem *full democracy*, hak asasi manusia juga dilindungi. Warga negara bebas memilih gaya hidupnya sendiri, sejauh tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan soal gaya hidupnya kepada orang lain. LGBT juga dibiarkan hidup di sana. Pernikahan sesama jenis dilegalkan di negara Swedia, Finlandia, dan juga Norwegia. Kelima, mempraktikkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Transparency International setiap tahun mengukur level korupsi sebuah negara. Peringkat teratas negara yang paling bersih korupsi acap kali ditempati oleh negara-negara Skandinavia ini. Keenam, agama tidak lagi dianggap penting. Di bawah 30 persen populasi dì berbagai negara Skandinavia menganggap agama penting. Untuk kasus negara Skandinavia, tidak ditempatkannya agama dalam posisi penting tidak menghalangi terbentuknya pemerintahan yang paling bersih, dan populasi masyarakat yang kini dianggap paling bahagia.

Indonesia di satu sisi bisa mengadopsi karakteristik utama negara kesejahteraan Nordik/Skandinavia tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga bisa mengadopsi kultur yang digali dari Indonesia, seperti disarankan oleh Hatta. Apa yang perlu dimodifikasi dari model negara kesejahteraan Skandinavia/Nordik? Dalam berbagai tulisannya, Denny JA berpendapat bahwa ciri keenam negara kesejahteraan Skandinavia (agama tidak dianggap penting) perlu dimodifikasi. Di sana, agama tak penting. Tapi di Indonesia, agama dianggap sangatlah penting oleh penduduknya.

Menurut Denny JA, modifikasi ciri keenam ini untuk kasus Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, Kementerian Agama dihadirkan sebagai bagian dari model pemerintahan Negara Kesejahteraan Indonesia. Bisa dikatakan ini variasi model demokrasi

ala Indonesia. Hadirnya Kementerian Agama di Indonesia menjadi cara positif dan kompromis agar Indonesia mengakomodasi agama yang menggores batin Indonesia teramat dalam. Di sisi lain, ia juga menjadi cara agar peran agama di ruang publik hanya dibatasi di Kementerian Agama saja. Sedangkan kementerian lain, dan dalam kehidupan ekonomi, politik dan hukum nasional, semua itu tunduk kepada prinsip *public policy* yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

Tahap kedua, pada waktunya, ketika persentase pentingnya agama di kalangan publik luas merosot di bawah 50 persen, Kementerian Agama dapat ditransformasikan menjadi Kementerian Spiritualitas dan Kebahagiaan. Kementerian Spiritualitas dan Kebahagian akan menggali sumber spiritualitas lebih luas lagi. Tak hanya dari agama formal, sumber spiritualitas juga digali dari kearifan lokal lain, dan perkembangan terakhir ilmu pengetahuan, seperti *positive psychology* dan neurosains.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, D.J. (2017). *Bahagia itu Mudah dan Ilmiah: Lima Kebiasaan dan Pola Pikir Bahagia*. Jakarta: Inspirasi.

Ali, D.J. (2018). *Hak Asasi Manusia dengan Spirit La Ilaha Illallah: Catatan tentang Agama dan Demokrasi*. Jakarta: Inspirasi.

Ali, D.J. (2020). *Spirituality of Happiness*. Jakarta: Inspirasi.

Arif, I. S. (2016). *Psikologi Positif*. Jakarta: Gramedia.

Aspalter, C. (2018). Ten Worlds of Welfare Capitalism An Ideal-typical Perspective. Dalam C. Aspalter (ed), Routledge Handbook of the Welfare State. London: Routledge.

Arts, W. & Gelissen, J. (2002). Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A State-of-the-art Report. Journal of European Social Policy, 12 (2), 137-158.

Association for Development and Advancement of the Democracy. (2022). Democracy Ranking. http://democracyranking.org/wordpress/rank/

Bonoli, G. (1997). Classifying Welfare States: a Two-dimension Approach. *Journal of Social Policy,* 26 (3): 351–72.

Castles, F. G. & Mitchell, D. (1993). Worlds of Welfare and Families of Nations. Dalam F. G. Castles (ed.) *Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies.* Aldershot: Dartmouth Publishing Company.

Delhey, J., & Dragolov, G. (2016). Happier Together. Social Cohesion and Subjective Well-being in Europe. *International Journal of Psychology*, 51(3), 163–176.

Deloitte. (2021). *The Nordic Social Welfare Model: Lessons for Reform*. Diakses dari https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/nordic-social-model-lessons.html.

Diener, Ed. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. *American Psychologist, 55,* 34 – 43.

Diener, Ed. (2006). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-being and Ill-being. *Applied Research in Quality of Life, 10*, 1-7.

Diener, Ed & Martin Seligman. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-being. *Psychological Science in the Public Interest, 5*, 1-31.

Dolan, P. & White, M.P. (2007). How Can Measures of Subjective Well-being be Used to Inform Public Policy? *Perspectives on Psychological Science, 2*, 71-85.

Economist Intelligence Unit. (2022). Democracy Index 2022. Diakses dari https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism.* Oxford: Polity Press.

Esping-Andersen, G. (1993). The Comparative Macro-sociology of Welfare States. Dalam L. Moreno (ed.) *Social Exchange and Welfare Development* (pp. 123–36). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Esping-Andersen, G. (1994). Welfare States and the Economy. Dalam N. J. Smelser and R. Swedberg (eds) *The Handbook of Economic Sociology* (pp. 711–32). Princeton/New York: Princeton University Press/Russel Sage Foundation.

Feith,F & Castles, L. (1970). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Ferrera, M. (1996). The “Southern” Model of Welfare in Social Europe. *Journal of European Social Policy,* 6 (1): 17–37.

Forbes. (2018). Best Countries for Business. Diakses dari https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/.

Forgeard, M. J. C., Jayawickreme, E., Kern, M.L & Seligman,M. (2011). Doing the Right Thing: Measuring Wellbeing for Public Policy. *International Journal of Wellbeing*, *1*(1), 79-106.

Frederickson, B. (2009). *Positivity*. New York: Three Rivers Press.

Gallup Poll. (2022). Diakses dari https://worldhappiness.report/ed/2022/

Gertner, J. (2010). The Rise and Fall of the G.D.P. *The New York Times*, 16 Mei 2010. https://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16PDB-t.html.

Hall, J., Giovannini,E., Morrone, A. & Ranuzzi,G. (2010). *A Framework to Measure the Progress of Societies*. Paris: OECD Statistics Directorate Working Paper No 34.

Hatta, M. (1980). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masjarakat.

Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2014). Social Capital and Well-Being in Times of Crisis. *Journal of Happiness Studies*, 15(1), 145–162.

Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2018). New Evidence on Trust and Well-being. Dalam E. M. Uslaner (Ed.), *The Oxford Handbook of Social and Political Trust* (p. 409). Oxford University Press.

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., Aknin, L. B., De Neve, J.-E., & Wang, S. (Eds.). (2023). *World Happiness Report 2023* (11th ed.). Sustainable Development Solutions Network.

Inglehart, R. (2010). Faith and freedom: Traditional and Modern Ways to Happiness. Dalam E. Diener, D. Kahneman, & J. Helliwell (Eds.), *International Differences in Well-Being* (pp. 351–397). Oxford University Press.

Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., & Welzel, C. (2008). Development, Freedom, and Rising Happiness: A Global Perspective (1981–2007). *Perspectives on Psychological Science*, 3(4), 264–285.

Jørgensen, I.S & Nafstad, H.E. (2012). Positive Psychology: Historical, Philosophical, and Epistemological Perspectives. Dalam P. Alex Linley and Stephen Joseph (eds). *Positive Psychology in Practice* (pp. 15-33). New York: John Wiley & Sons.

Jørgensen, I.S & Nafstad, H.E. (2012). Positive Psychology: Historical, Philosophical, and Epistemological Perspectives. Dalam P. Alex Linley and Stephen Joseph (eds). *Positive Psychology in Practice* (pp. 15-33). New York: John Wiley & Sons.

Korpi, W. & Palme, J. (1998). The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries. *American Sociological Review* 63 (5): 661–87.

Leibfried, S. (1992). Towards a European Welfare State? On Integrating Poverty Regimes into the European Community. Dalam Z. Ferge and J. E. Kolberg (eds) *Social Policy in a Changing Europe.* Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Lyubumirsky, S., Sheldon. K.M & Schkade,D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. *Review of General Psychology*, 9(2), 111-131.

Martela, F, Greve,B, Rothstein, B & Saari, J. (2020). The Nordic Exceptionalism: What Explains Why the Nordic Countries Are Constantly Among the Happiest in the World. World Happiness Report, Chapter 7.

New Economic Foundation (NEF). (2011). *Measuring Our Progress The Power of Well-being*. London: New Economic Foundation.

New Economic Foundation (NEF). (2012). *Measuring Well-being: A Guide for Practitioners*. London: New Economic Foundation.

Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species.* Cambridge, MA: The Belknap Press.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). *How's Life?: Measuring Well-being*. Paris: OECD Publishing.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). *OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being*. Paris: OECD Publishing.

Pacek, A. C., & Radcliff, B. (2008). Welfare Policy and Subjective Well-being across Nations: An Individual-level Assessment. *Social Indicators Research*, 89(1), 179–191.

Rawls, J. (1971). *A theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Reporters Without Borders (RSF). (2022). RSF's 2022 World Press Freedom Index : A New Era of Polarization. Diakses dari https://rsf.org/en/rsf-s-2022-world-press-freedom-index-new-era-polarisation?year=2022&data_type=general

Rosser, M.V & Barkley, J. (2003). *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. MIT Press.

Samuel, R & Hadjar, A. (2016). How Welfare-State Regimes Shape Subjective Well-Being Across Europe. *Social Indicators Research*, 129, 565–587.

Santrock, J.W. (2011). *Educational Psychology*. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill.

Seligman, M.E.P & Mihaly Csikszentmihalyi.M. (2000). Positive Psychology. *American Psychologist*, 55 (1), 5-14.

Seligman, M.E.P (2001). Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy. Dalam C.R. Snyder & Shane J. Lopez (eds), *Handbook of Positive Psychology* (pp. 3-9).

Seligman, M.E.P (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. New York: Free Press.

Seligman, M.E.P (2006). *Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life*. New York: Vintage.

Seligman, M.E.P (2012). *Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being*. New York:Simon and Schuster.

Sen, A. K. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.

Sen, A.K. (2004). Elements of a Theory of Human Rights. *Philosophy and Public Affairs, 32*, 315-356.

Stiglitz, J. , Sen,A.K & Fitoussi, J. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Diakses dari https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/090914mesure_perf_eco_progres_social/synthese_ang.pdf.

The Global Entrepreneurship and Development Institute. (2020). Global Entrepreneurship Index. Diakses dari http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/

The Heritage Foundation. (2023). Imdex of Economic Freedom. Diakses dari https://www.heritage.org/index/

Time. (2005). The New Science of Happiness. *Time,* 24 Januari 2005.

Transparency International. (2022), Corruption Perceptions Index 2022. Diakses dari https://www.transparency.org/en/cpi/2022.

United Nations Development Programme. (2022). Human Development Report. Diakses dari https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads.

Universität Würzburg. (2022). Democracy Matrix. Diakses dari https://www.democracymatrix.com/

Vaut, S. (2014). *Ekonomi dan Sosial Demokrasi*. Diterjemahkan dari Wirtschaft und Soziale Demokratie. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia

Veenhoven, R. (2000). Well-being in the Welfare State: Level not Higher, Distribution not More Equitable. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 2(1), 91–125.

World Bank (2020). Doing Business 2020. Diakses dari https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf

Profil Penulis

ERIYANTO

Saat ini adalah pengajar tetap sekaligus Ketua Program Pascasarjana Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia (UI).

Sebelum menjadi dosen, ia adalah praktisi di bidang riset komunikasi. Ia pernah bekerja di banyak lembaga penelitian, seperti Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Taylor Nelson Sofres, dan sebagainya. Pernah menjadi direktur riset di berbagai lembaga penelitian, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), SIGI dan Lingkaran Survei Indonesia. Eriyanto telah menulis lebih dari 25 buku mengenai media, opini publik, dan metode penelitian. Ia bisa dihubungi di alamat email: eriyanto09@ui.ac.id

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA – INDONESIA